

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Wilayah Pinggiran

Kelurahan Tunggulwulung memiliki luas wilayah 187,90 Ha yang terdiri dari 6 RW dan 43 RT. Sedangkan Desa Tegalondo memiliki luas wilayah 230,65 Ha yang terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Ketangi, Dusun Gondang, Dusun Wunutsari, Dusun Babatan dan Dusun Dawuhan. Secara administratif batas wilayah pinggiran (Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo) adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Tasikmadu Kota Malang dan Desa Ampeldento Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kelurahan Mojolangu Kota Malang
- Sebelah Selatan : Kelurahan Tlogomas Kota Malang
- Sebelah Barat : Desa pendem Kota Batu

Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo adalah salah satu wilayah pinggiran Kota Malang bagian utara. Sebagai wilayah yang memiliki letak startegis, yaitu penghubung Kota Malang dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu, Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo menjadi lokasi yang dianggap menarik bagi *developer* untuk dikembangkan sebagai perumahan. Hal tersebut menyebabkan banyaknya pembangunan perumahan baru di wilayah pinggiran yang merubah pola penggunaan lahan dan karakteristik lainnya. Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo merupakan wilayah pinggiran yang memiliki karakteristik yang khas. Kelurahan Tunggulwulung memiliki karakteristik wilayah pinggiran yang lebih dominan merupakan wilayah yang diinvansi masyarakat perkotaan dengan karakter sosial perkotaan dan merupakan wilayah yang menjadi tujuan perkembangan kota dan pembangunan oleh *developer*. Sedangkan Desa Tegalondo lebih dominan sebelumnya merupakan wilayah pedesaan dengan dominasi lahan pertanian dan komunitas pedesaan. Selain itu keunikan karakteristik kedua wilayah tersebut juga terlihat dari perpaduan karakteristik wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan yang meliputi karakteristik fisik, sosial dan ekonomi.

4.1.1 Karakteristik fisik binaan

Lingkungan fisik binaan yang terbentuk di wilayah pinggiran pada umumnya dapat ditunjukkan oleh jenis dan intensitas penggunaan lahan yang terus mengalami

perkembangan selama kurun waktu tertentu. Perkembangan fisik binaan di Kelurahan Tunggulwulung mulai berkembang pesat saat perumahan baru dibangun oleh *developer*. Perumahan yang dibangun oleh *developer* pertama kali dibangun di Kelurahan Tunggulwulung pada tahun 1992. Sedangkan perkembangan fisik binaan di Desa Tegalondo mulai berkembang saat dibangun sarana pendidikan Universitas pada tahun 1992 dan perumahan yang dibangun *developer* pada tahun 2002. Namun di dalam penelitian ini, pembahasan dilakukan lebih kepada karakteristik wilayah pinggiran mulai tahun 2007-2011 (kurun waktu 5 tahun).

a. Penggunaan lahan

Sebelum terjadi perkembangan wilayah Kota Malang ke arah wilayah pinggiran, penggunaan lahan wilayah pinggiran didominasi oleh guna lahan pedesaan terutama lahan pertanian. Namun dengan adanya pembangunan perumahan oleh *developer* dan pembangunan sarana pendidikan universitas pada tahun 1992, pola penggunaan lahan mulai berubah menjadi perpaduan antara guna lahan perkotaan dan guna lahan pedesaan. Hal tersebut disebabkan karena adanya pembangunan perumahan oleh *developer* dan sarana pendidikan merubah lahan pertanian menjadi lahan terbangun sekaligus mendorong munculnya bangunan pendukung lainnya seperti perdagangan atau jasa.

Penggunaan lahan wilayah pinggiran meliputi guna lahan perumahan, sarana dan prasaran, lahan pertanian dan lahan kosong. Penggunaan lahan tersebut terus mengalami perkembangan baik dari jenis, fungsi maupun luasnya.

Penggunaan lahan wilayah pinggiran baik di Kelurahan Tunggulwulung maupun di Desa Tegalondo didominasi oleh guna lahan pertanian sawah masing-masing seluas 134,76 Ha dan 178,06 Ha pada tahun 2007. Keberadaan lahan sawah tersebut terus berkurang dari tahun 2007-2011 dan beralih menjadi lahan terbangun berupa perumahan yang dibangun oleh *developer* dan sarana permukiman. Perubahan terbesar terjadi pada tahun 2011 dimana lahan sawah Kelurahan Tunggulwulung berkurang seluas 10,6 Ha dan beralih fungsi menjadi perumahan tidak teratur yang dibangun individu dan perumahan yang dibangun oleh *developer*. Perkembangan perumahan yang dibangun oleh *developer* di Kelurahan Tunggulwulung terus bertambah hingga tahun 2011 mencapai luas 26,96 Ha atau sebanyak 13 blok perumahan dan 7 blok rencana perumahan. Sedangkan di Desa Tegalondo, lahan sawah lebih banyak berkurang karena perkembangan sarana perdagangan dan jasa serta pembangunan sarana

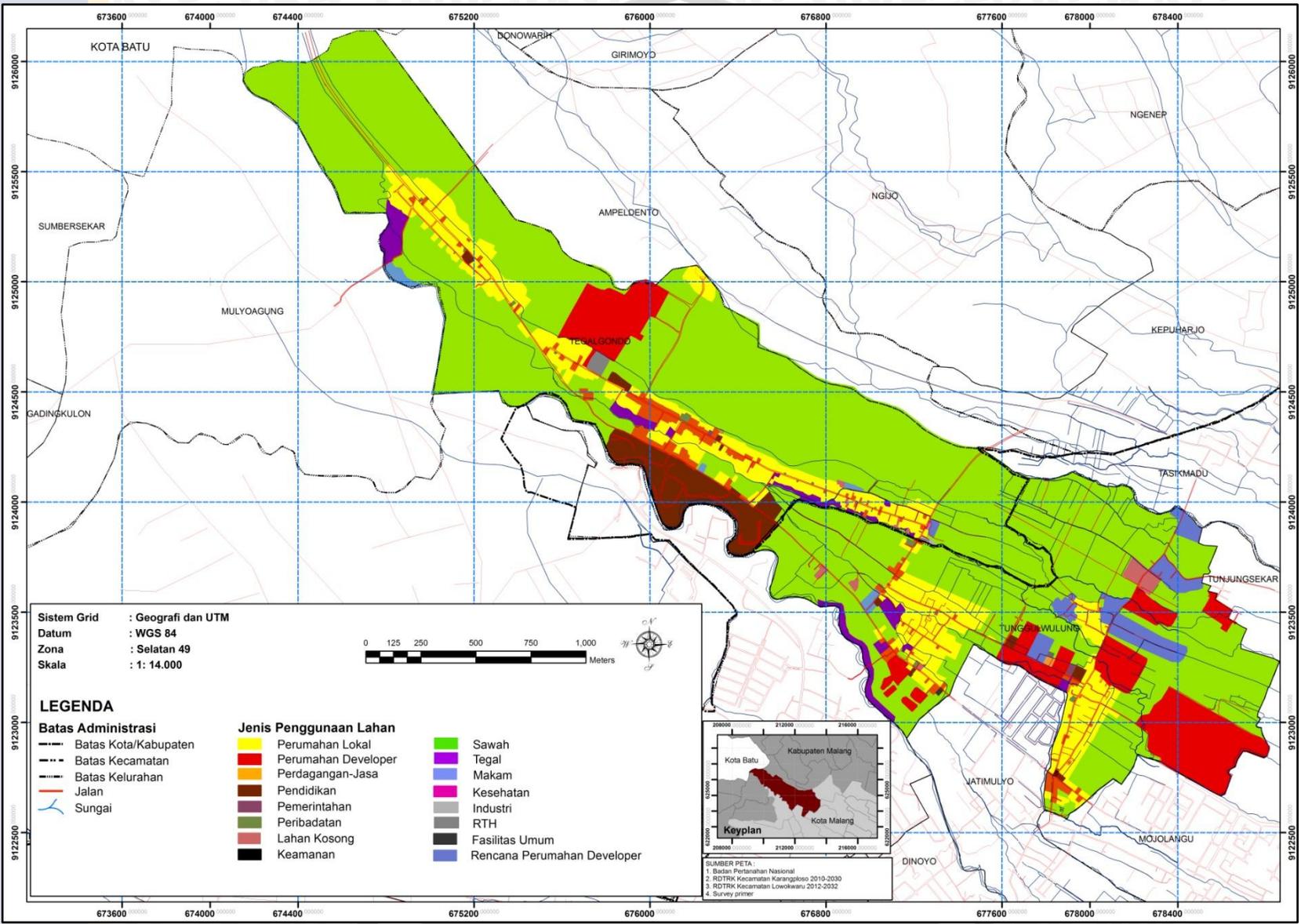
pendidikan. Konversi lahan sawah menjadi perumahan yang dibangun oleh *developer* di Desa Tegalondo telah terjadi pada tahun 2002 seluas 10,33 Ha.

Tabel 4.1 Perkembangan Penggunaan Lahan Wilayah Pinggiran

Jenis Guna Lahan	Tunggulwungu					Tegalondo				
	Luas (Ha)					Luas (Ha)				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Perumahan	24.15	25.76	25.81	31.47	35.22	20.05	27.35	30.47	31.15	33.98
Perumahan yang dibangun oleh <i>developer</i>	16.32	20.33	22.68	23.59	26.96	10.33	10.33	10.33	10.33	11.45
Perdagangan /jasa	0.35	0.36	0.38	0.38	0.84	1.17	1.41	2.23	4.87	4.91
Pendidikan	0.37	0.37	0.37	1.52	1.52	11.31	11.31	11.55	11.55	11.89
Pemerintahan	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
Peribadatan	0.02	0.02	0.02	0.02	0.12	0.28	0.28	0.35	0.4	0.44
Kesehatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Industri /pergudangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13
Fasilitas umum	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Makam	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
Sawah	136.76	131.13	128.71	120.72	109.23	178.06	172.10	168.54	165.36	160.73
Ladang	4.98	4.98	4.98	4.98	8.16	5.3	3.97	3.31	3.16	2.91
Lahan kosong	4.77	4.77	4.77	4.77	4.44	0.84	0.59	0.56	0.52	0.32
Keamanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.79	0.79	0.79	0.79	1.5
RTH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	20.05	27.35	30.47	31.15	33.98

Sumber: Monografi Kelurahan 2003-2011
RDTRK Kecamatan Lowokwaru 2012-2032
RDTRK Kecamatan Karangploso 2010-2030
Badan Pertanahan Nasional

Keberadaan perumahan yang dibangun oleh *developer* di wilayah pinggiran masih akan bertambah. Hal tersebut ditunjukkan adanya rencana pembangunan perumahan di Kelurahan Tunggulwungu seluas 6,47 Ha dan di Desa Tegalondo seluas 1,12 Ha. Rencana pembangunan perumahan yang dibangun oleh *developer* di wilayah pinggiran terdiri dari rencana lokasi perumahan dan blok perumahan yang sedang dalam proses pembangunan dengan luas yang berbeda-beda.



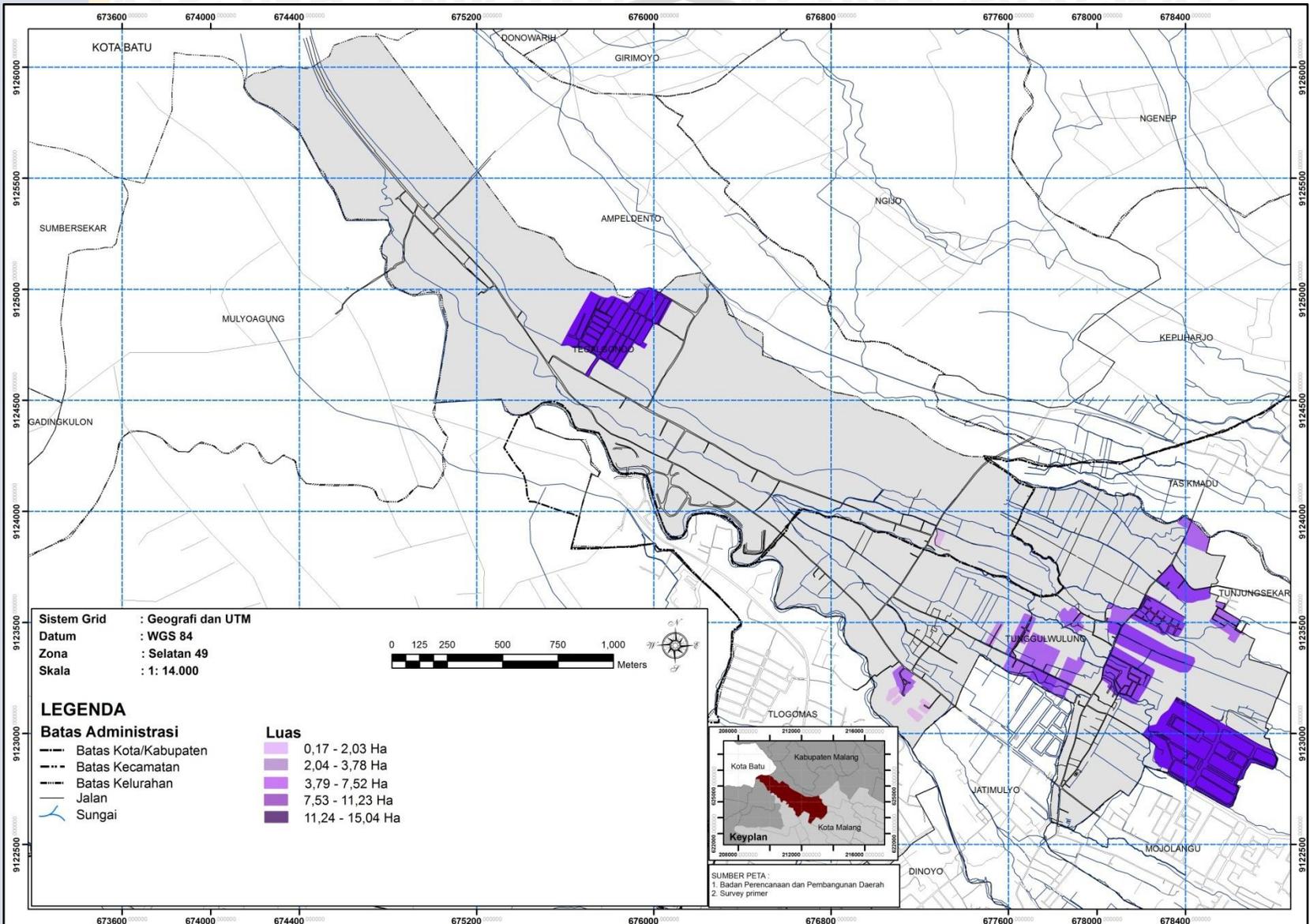
Gambar 4.1 Peta penggunaan lahan tahun 2011

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perumahan yang dibangun oleh *developer* di wilayah pinggiran akan bertambah dengan adanya rencana pembangunan perumahan sebanyak 7 blok perumahan di Kelurahan Tunggulwulung dan 1 blok perumahan di Desa Tegalgondo. Jumlah perumahan yang dibangun oleh *developer* di Kelurahan Tunggulwulung adalah 13 blok dan di Desa Tegalgondo hanya 1 blok. Luas perumahan tersebut mencapai 26,96 Ha di Kelurahan Tunggulwulung dan 11,45 Ha di Desa Tegalgondo. Luas terbesar perumahan yang dibangun oleh *developer* di Kelurahan Tunggulwulung adalah 15,04 Ha yang terdapat di RW 6 dan luas terkecil adalah 0,17 Ha yang terdapat di RW 5.

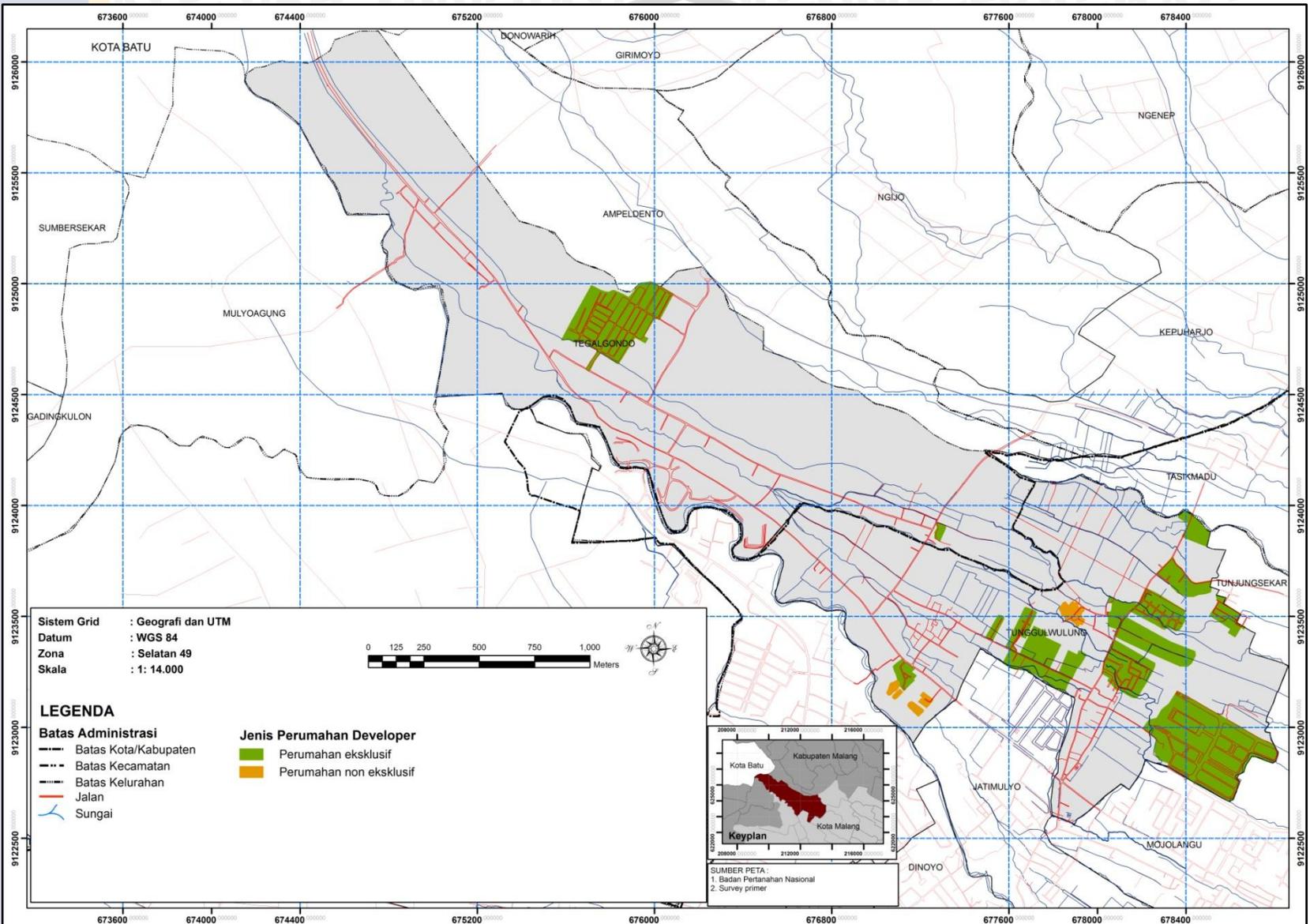
Perumahan yang dibangun oleh *developer* di wilayah pinggiran terdiri dari perumahan eksklusif dan perumahan non eksklusif. Perumahan eksklusif ditandai dengan sistem masuk satu akses yang biasanya berupa satu pintu atau gerbang masuk (*one gate system*). Selain itu perumahan eksklusif dikelilingi oleh dinding pembatas yang membatasi dengan perumahan yang dibangun swadaya oleh masyarakat. Desain perumahan yang eksklusif ternyata menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses perumahan tersebut sehingga membatasi interaksi antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang.

Perumahan yang dibangun oleh *developer* di Desa Tegalgondo dan di Kelurahan Tunggulwulung adalah perumahan eksklusif. Namun lokasi perumahan tersebut dekat dengan perumahan yang dibangun swadaya oleh masyarakat sehingga terjadi kesenjangan antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang.

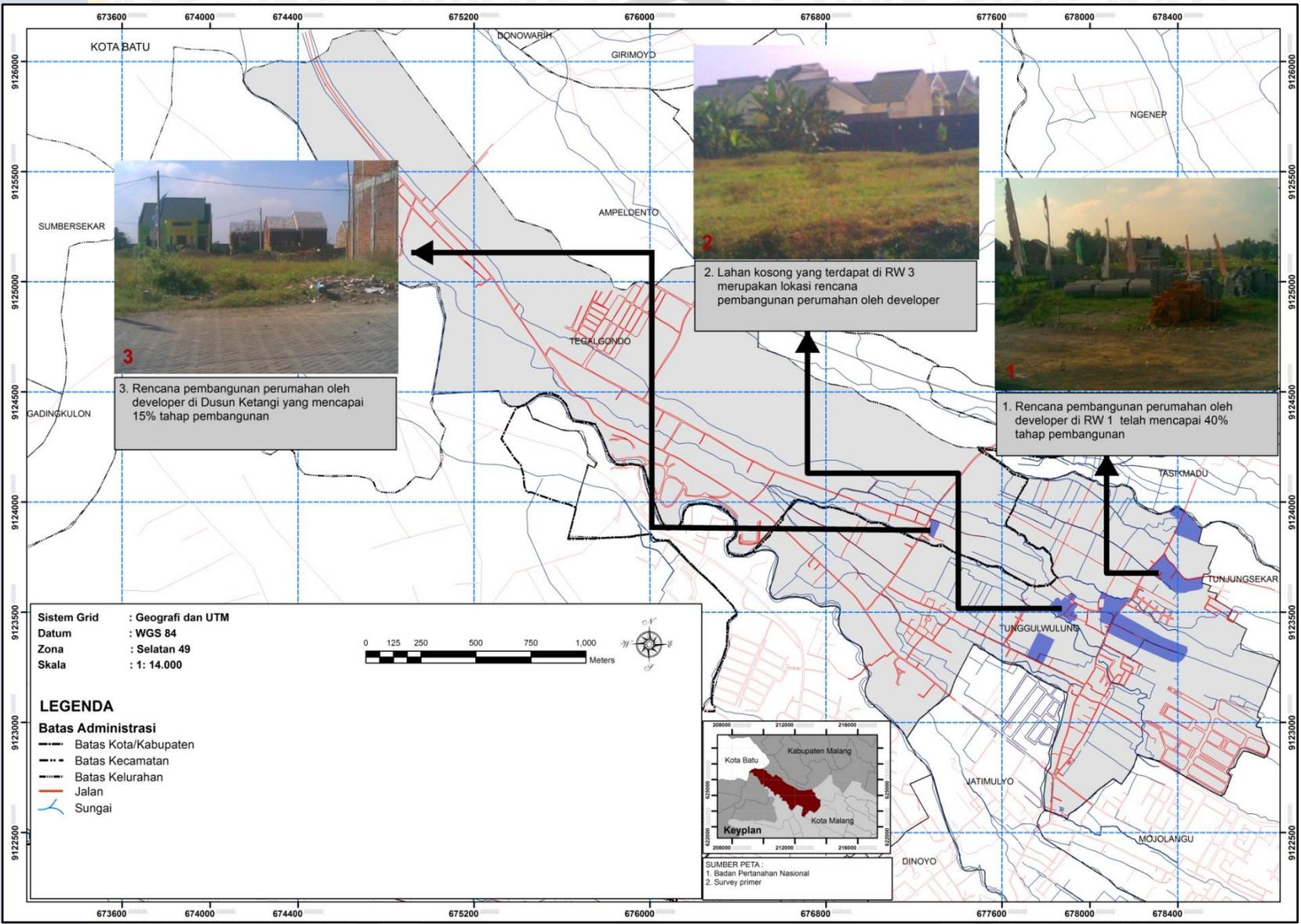
Eksklusifitas perumahan yang dibangun oleh *developer* di wilayah pinggiran menyebabkan beberapa masalah seperti terbatasnya interaksi antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang dan munculnya kesenjangan sosial dan konflik sosial karena masyarakat tidak dapat menerima eksklusifitas yang dianggap tidak sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat. Pola penggunaan lahan antara perumahan yang dibangun oleh *developer* dengan perumahan yang dibangun oleh individu harus didesain dengan baik tanpa membatasi interaksi antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang namun tetap dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat pendatang. Pola penggunaan lahan yang tepat dapat menciptakan suasana lingkungan perumahan yang nyaman bagi masyarakat lokal dan masyarakat pendatang.



Gambar 4.2 Peta persebaran perumahan yang dibangun developer



Gambar 4.3 Peta jenis perumahan yang dibangun developer



Gambar 4.4 Foto mapping rencana pembangunan perumahan oleh *developer*

Perkembangan penggunaan lahan yang terjadi di wilayah pinggiran tidak hanya berpengaruh terhadap jenis dan luas guna lahan tetapi juga intensitas penggunaan lahan yang dapat ditunjukkan oleh kepadatan bangunan. Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kepadatan bangunan di Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo masing-masing adalah 12 unit/Ha dan 8 unit/Ha.

b. Kondisi sarana

Sarana permukiman di wilayah pinggiran mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan penduduk yang membutuhkan berbagai sarana penunjang. Sarana permukiman yang terdapat di Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo meliputi sarana kesehatan, pendidikan dan peribadatan serta fasilitas umum lainnya.

Berdasarkan hasil survey diketahui setiap perumahan yang dibangun *developer* di Kelurahan Tunggulwulung harus menyediakan sarana makam khusus bagi masyarakat pendatang. Sarana makam tersebut hanya diperuntukkan bagi masyarakat perumahan pendatang sehingga masyarakat lokal tidak dapat mengakses sarana makam tersebut. Namun kondisi ini tidak menyebabkan masalah karena masyarakat lokal Kelurahan Tunggulwulung telah memiliki sarana makam yang dapat diakses seluruh masyarakat lokal.

Penyediaan makam telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang nomor 3 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Makam. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sarana makam umum yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dapat dikelola oleh pemerintah maupun pribadi atau badan, termasuk *developer*. Jadi penyediaan makam di Kelurahan Tunggulwulung dapat dilakukan oleh *developer* terutama bagi masyarakat pendatang yang bertempat tinggal di perumahan yang dibangun *developer* tersebut. Dengan ketentuan sebagai berikut:

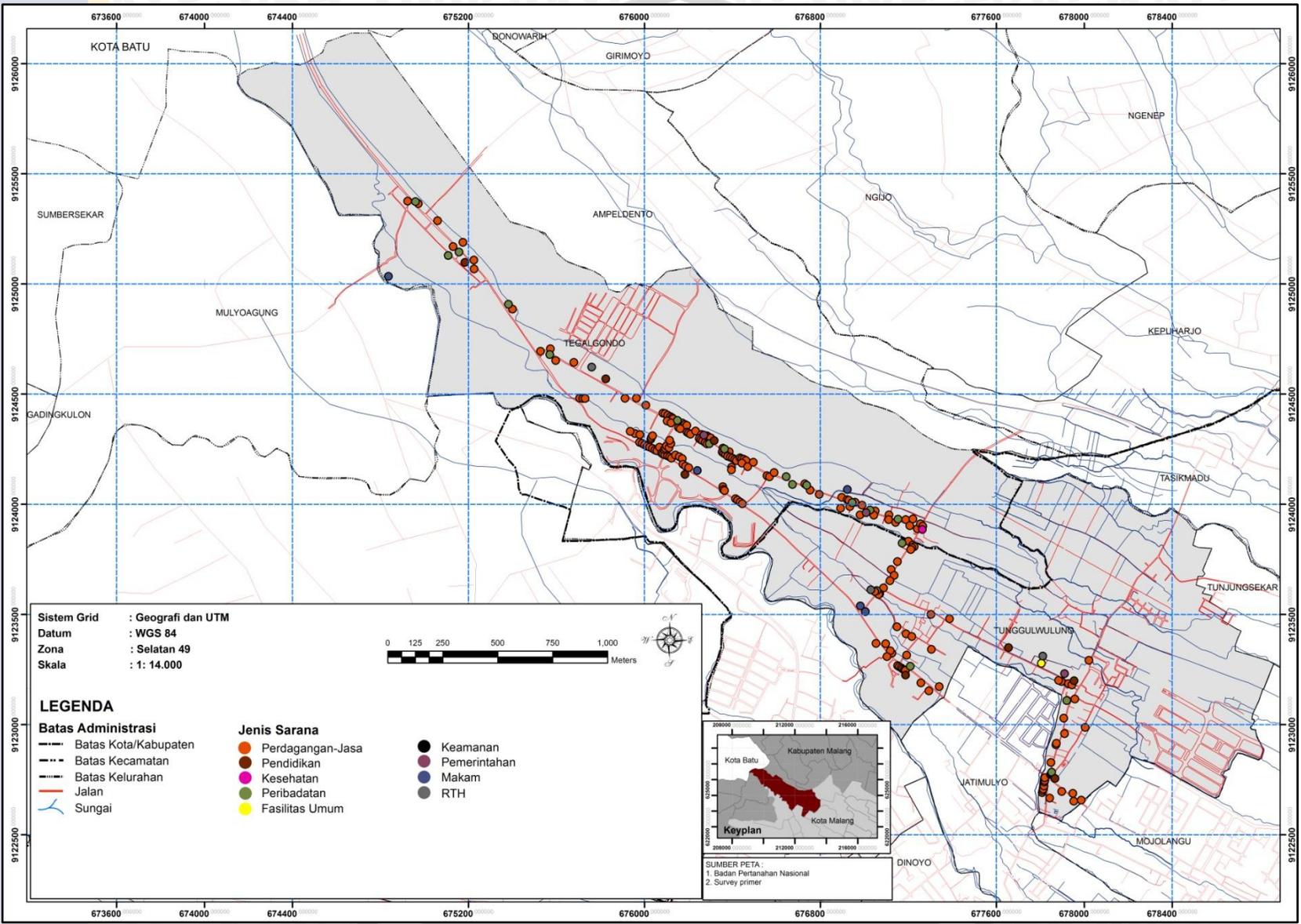
- 1) Setiap *developer* perumahan/pengusaha *real estate* dan sejenisnya berkewajiban menyediakan lahan utilitas umum untuk tempat pemakaman penduduk yang tertuang dalam rencana tapak (site plan) atau Advis Planning (AP) seluas minimal 2% dari luas tanah yang akan dibangun oleh pengembang atau sejenisnya pada lokasi tersebut;
- 2) Apabila dalam kawasan tersebut tidak memungkinkan untuk disediakan utilitas umum untuk tempat pemakaman penduduk, maka *developer* perumahan/pengusaha *real estate* sebelum ditetapkan rencana tapak (site plan) atau Advis Planning (AP)

harus menyediakan lahan pengganti di tempat lain yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau memberikan dana pengganti;

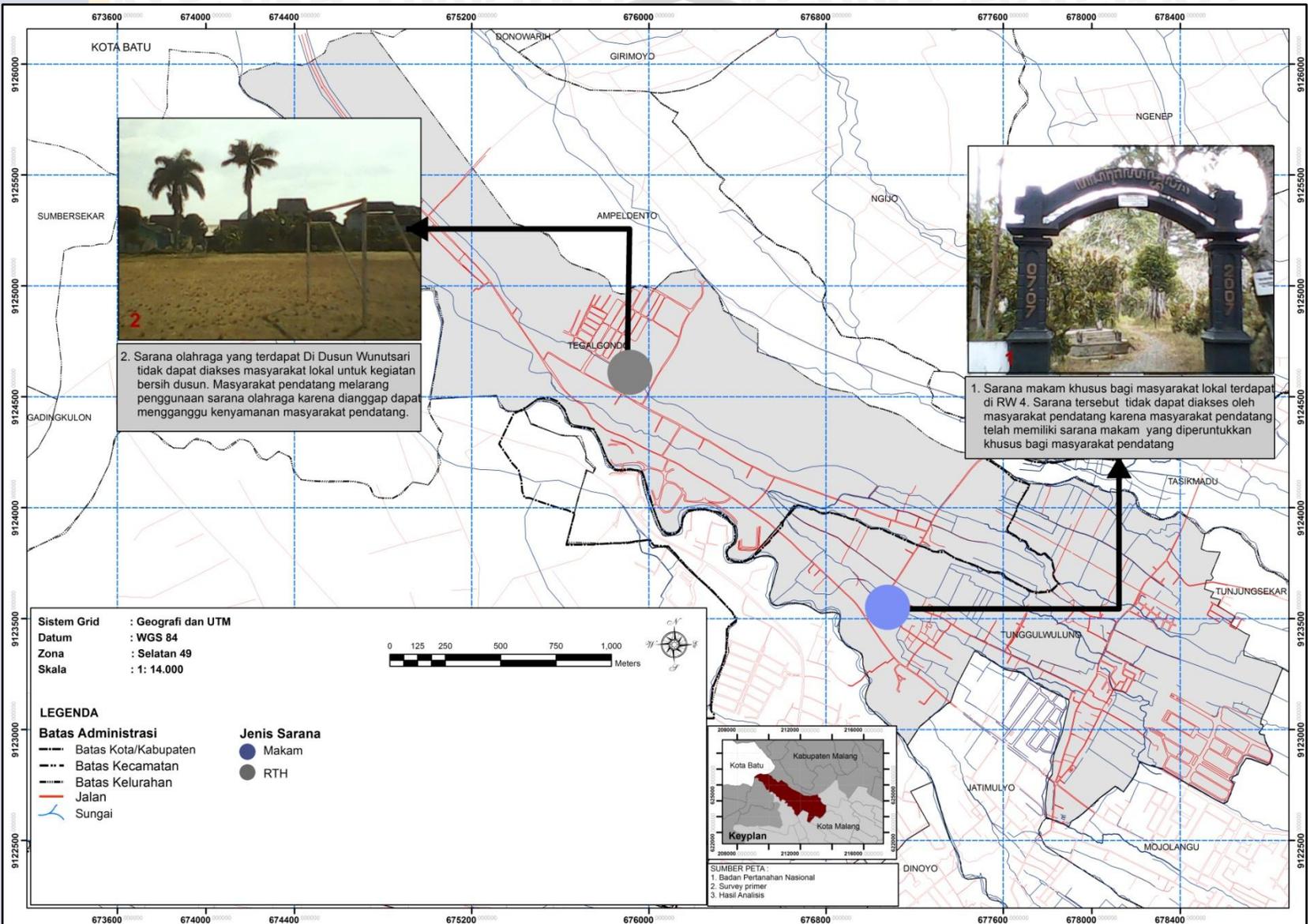
- 3) Untuk penyediaan lahan utilitas umum sebagai tempat pemakaman penduduk, apabila lahan terbatas maka *developer* perumahan/pengusaha *real estate* wajib memberikan dana pengganti penyiapan lahan atau tempat pemakaman kepada Pemerintah Daerah sebanding dengan harga tanah yang seharusnya disediakan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan dana pengganti wajib mencarikan dan menyediakan lahan sebagai tempat pemakaman.

Perumahan yang dibangun oleh *developer* di Desa Tegalgondo tidak memiliki sarana khusus, jadi masyarakat pendatang menggunakan sarana desa yang tersedia untuk mendukung aktifitas seperti sarana peribadatan dan sarana olahraga. Keberadaan sarana olah raga berupa lapangan sepak bola di dekat perumahan yang dibangun oleh *developer* ternyata menyebabkan masyarakat lokal kesulitan untuk mengakses sarana olahraga tersebut. Berdasarkan hasil survey wawancara dengan tokoh kunci diketahui bahwa pernah terdapat konflik sosial antara masyarakat pendatang dengan masyarakat perumahan lokal terkait penggunaan sarana olahraga. Konflik tersebut berupa pemblokiran lapangan olahraga oleh masyarakat pendatang yang akan dipergunakan oleh masyarakat lokal dalam rangka kegiatan bersih dusun pada tahun 2011.

Secara umum, kondisi sarana di wilayah pinggiran telah tersebar merata dan dapat melayani seluruh kalangan masyarakat tetapi akses terhadap sarana tersebut masih belum optimal karena masih terdapat konflik di dalam pemanfaatan sarana tersebut. Oleh karena itulah diperlukan pengaturan penggunaan sarana di wilayah pinggiran agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya.



Gambar 4.5 Peta persebaran sarana



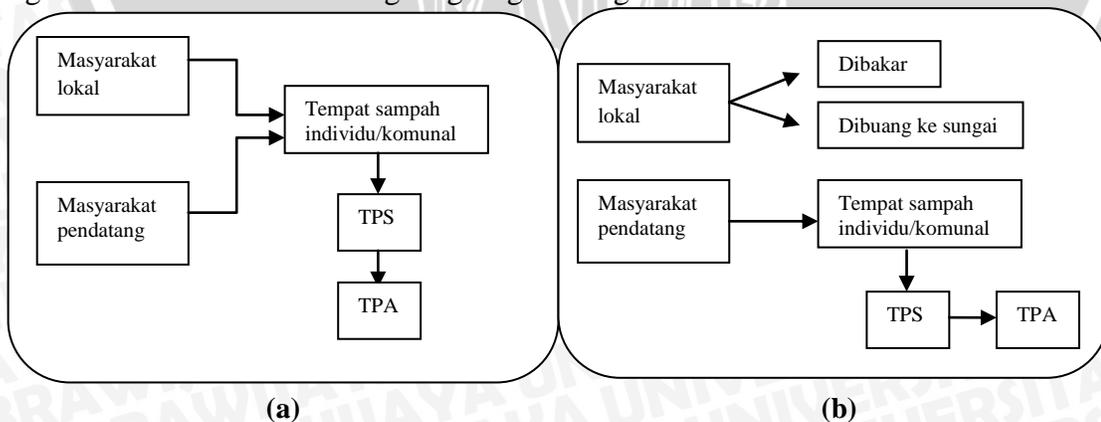
Gambar 4.6 Foto mapping aksesibilitas terhadap sarana

c. Kondisi prasarana

Perkembangan wilayah pinggiran menuntut perkembangan prasarana permukiman yang layak dan dapat melayani seluruh kalangan masyarakat. Prasarana tersebut meliputi pinggiran meliputi jaringan jalan, drainase, listrik, air bersih, persampahan dan sanitasi.

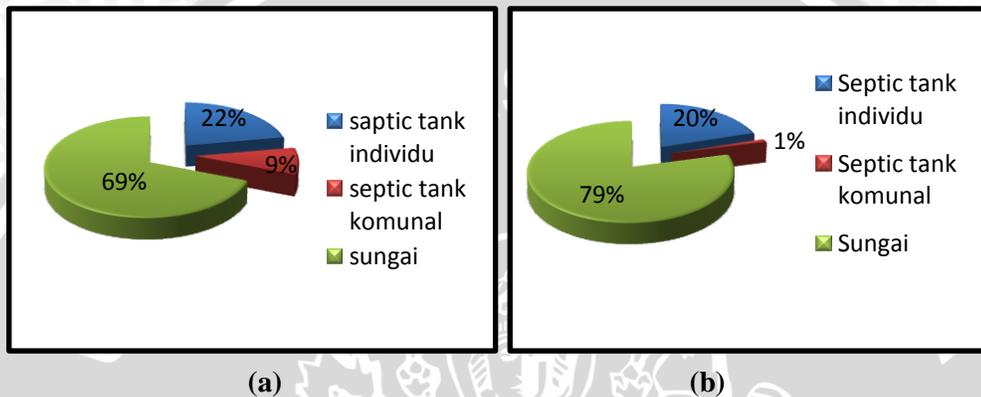
Jaringan jalan, drainase dan listrik telah menjangkau seluruh wilayah pinggiran di Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo. Berdasarkan monografi desa/kelurahan dan hasil observasi, kondisi jaringan tersebut baik dan dapat dipergunakan seluruh masyarakat wilayah pinggiran. Sedangkan jaringan air bersih yang berasal dari PDAM menjangkau perumahan yang dibangun *developer* dan 40% masyarakat lokal Kelurahan Tunggulwulung dan 10% masyarakat lokal Desa Tegalgondo dan selebihnya menggunakan sumur atau masih belum memiliki sumber air bersih.

Berbeda dengan jaringan jalan, drainase dan listrik, sistem persampahan di wilayah pinggiran masih belum merata dan cenderung beragam bentuk pengelolaannya. Sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Tunggulwulung dilakukan dengan pembuangan sampah menggunakan tempat sampah individu maupun komunal yang kemudian diangkut oleh petugas kebersihan untuk dibuang ke TPS. Sistem tersebut telah dilakukan di seluruh wilayah Kelurahan Tunggulwulung baik di perumahan yang dibangun oleh *developer* maupun individu. Sedangkan di Desa Tegalgondo, sistem pengelolaan sampah di perumahan yang dibangun *developer* berbeda dengan perumahan yang dibangun swadaya. Masyarakat pendatang di Desa Tegalgondo terlayani pengangkutan sampah yang dilakukan petugas kebersihan, sedangkan sebagian masyarakat lokal masih membuang sampah dengan cara dibakar dan dibuang langsung ke sungai.



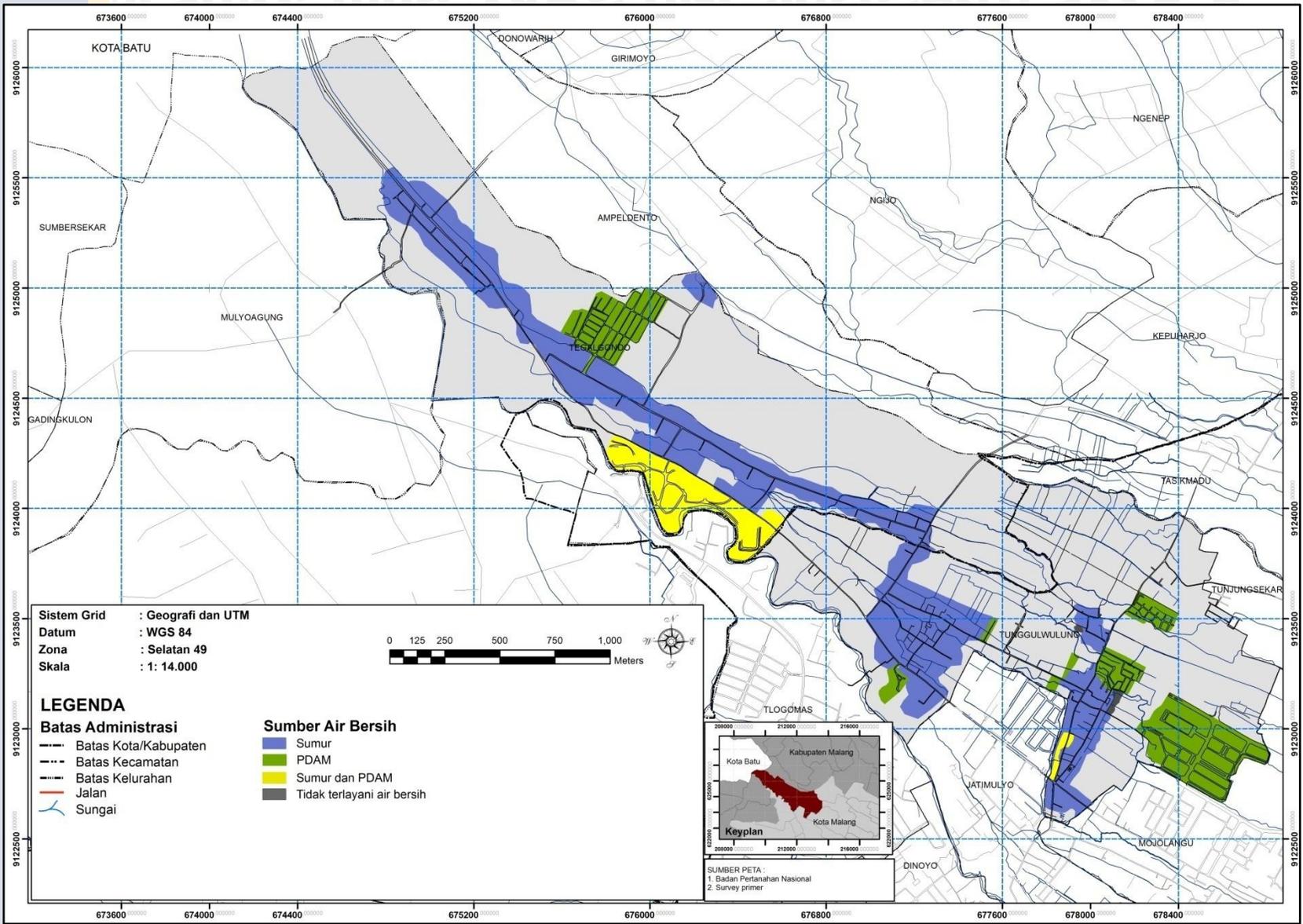
Gambar 4.7 Sistem persampahan wilayah pinggiran (a) Kelurahan Tunggulwulung; (b) Desa Tegalgondo

Prasarana lain yang terdapat di wilayah pinggiran adalah sistem sanitasi atau pengelolaan limbah. Masyarakat lokal yang melakukan pengelolaan limbah dengan membuang limbah ke *saptic tank* individu sebanyak 352 KK dan 365 KK di Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo dan sisanya membuang langsung ke sungai (Monografi Desa/Kelurahan, 2011). Sedangkan masyarakat pendatang seluruhnya telah memiliki *septic tank* baik individu maupun komunal di Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo.

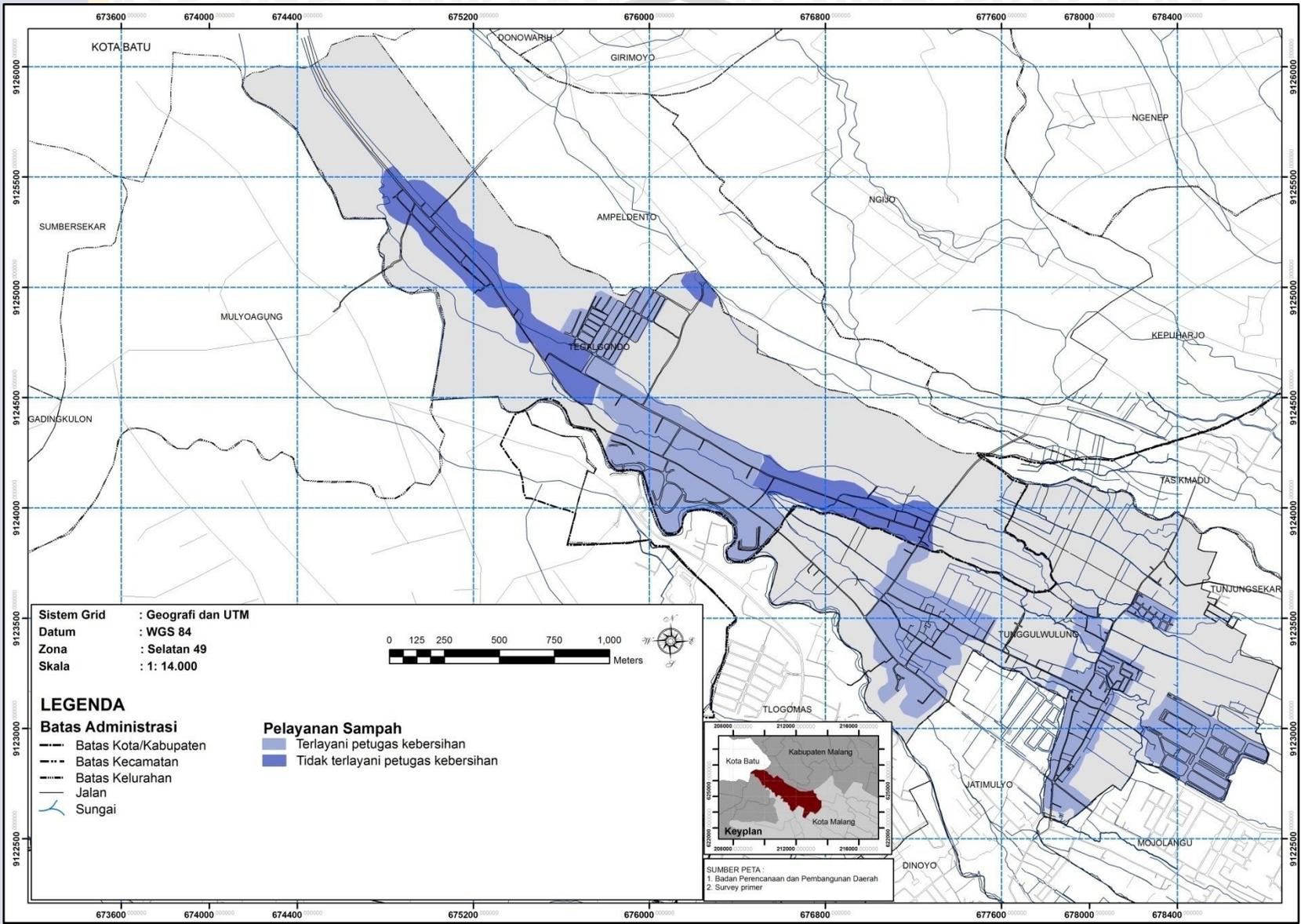


Gambar 4.8 Sistem sanitasi wilayah pinggiran (a) Kelurahan Tunggulwulung; (b) Desa Tegalondo

Prasarana permukiman di wilayah pinggiran yang berupa jaringan, jalan, drainase dan listrik telah menjangkau seluruh wilayah pinggiran dan melayani seluruh kalangan masyarakat. Namun sistem persampahan dan air bersih masih belum sepenuhnya dapat melayani seluruh kalangan masyarakat dan hanya terbatas pada masyarakat pendatang padahal kebutuhan masyarakat akan prasarana sanitasi dan persampahan sangat mendesak sehingga diperlukan pengadaan prasarana tersebut. Pengadaan prasarana yang belum merata dapat dilakukan melalui swadaya masyarakat dan *developer* sebagai bentuk komitmen *developer* dalam pembangunan perumahan di wilayah pinggiran.



Gambar 4.9 Peta pelayanan air bersih



Gambar 4.10 Peta pelayanan sampah

4.1.2 Karakteristik sosial

Salah satu karakteristik yang khas yang terbentuk di wilayah pinggiran selain karakteristik fisik binaan adalah karakteristik sosial. Karakteristik sosial wilayah pinggiran menjadi khas dan berbeda dari wilayah lainnya karena adanya perpaduan masyarakat perkotaan dan pedesaan yang berada di wilayah yang sama. Karakteristik sosial tersebut meliputi karakteristik kependudukan, konflik sosial, kelembagaan dan adat budaya masyarakat wilayah pinggiran.

a. Kependudukan

Kependudukan merupakan salah satu bagian dari aspek sosial yang dapat menunjukkan karakteristik sosial suatu wilayah, termasuk wilayah pinggiran. Pertumbuhan penduduk wilayah pinggiran di Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo mengalami pertumbuhan yang cenderung linier dan bertambah setiap tahun dengan laju pertumbuhan yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Pinggiran

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)	
	Tunggulwulung	Tegalgondo	Tunggulwulung	Tegalgondo	Tunggulwulung	Tegalgondo
2007	5222	3988	5,82	0,04	27,79	17,29
2008	5643	4169	8,06	0,05	30,03	18,08
2009	5962	4171	5,65	2,36	31,73	18,08
2010	6071	4273	1,83	0,50	32,31	18,53
2011	6354	4396	4,66	0,05	33,82	19,06

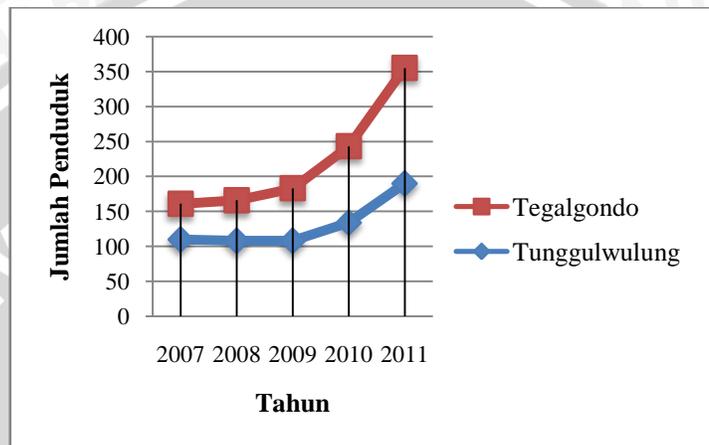
Sumber: Monografi Desa/Kelurahan Tahun 2006-2011

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa jumlah penduduk wilayah pinggiran terus bertambah setiap tahun dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kelurahan Tunggulwulung sebesar 5,05% per tahun. Laju pertumbuhan penduduk tersebut berarti bahwa setiap tahun jumlah penduduk bertambah rata-rata 354 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Desa Tegalgondo adalah 2,48% per tahun atau sebanyak 102 jiwa penduduk bertambah setiap tahun.

Pertumbuhan penduduk wilayah pinggiran diiringi oleh perubahan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk wilayah pinggiran meningkat setiap tahun dengan penambahan jumlah penduduk. Rata-rata kepadatan penduduk selama kurun waktu 5 tahun (tahun 2007-2011) di Kelurahan Tunggulwulung adalah 31 jiwa/Ha dan 19 jiwa/Ha di Desa Tegalgondo. Berdasarkan RDTRK Kecamatan Lowokwaru tahun 2012-2032 dan RDTRK

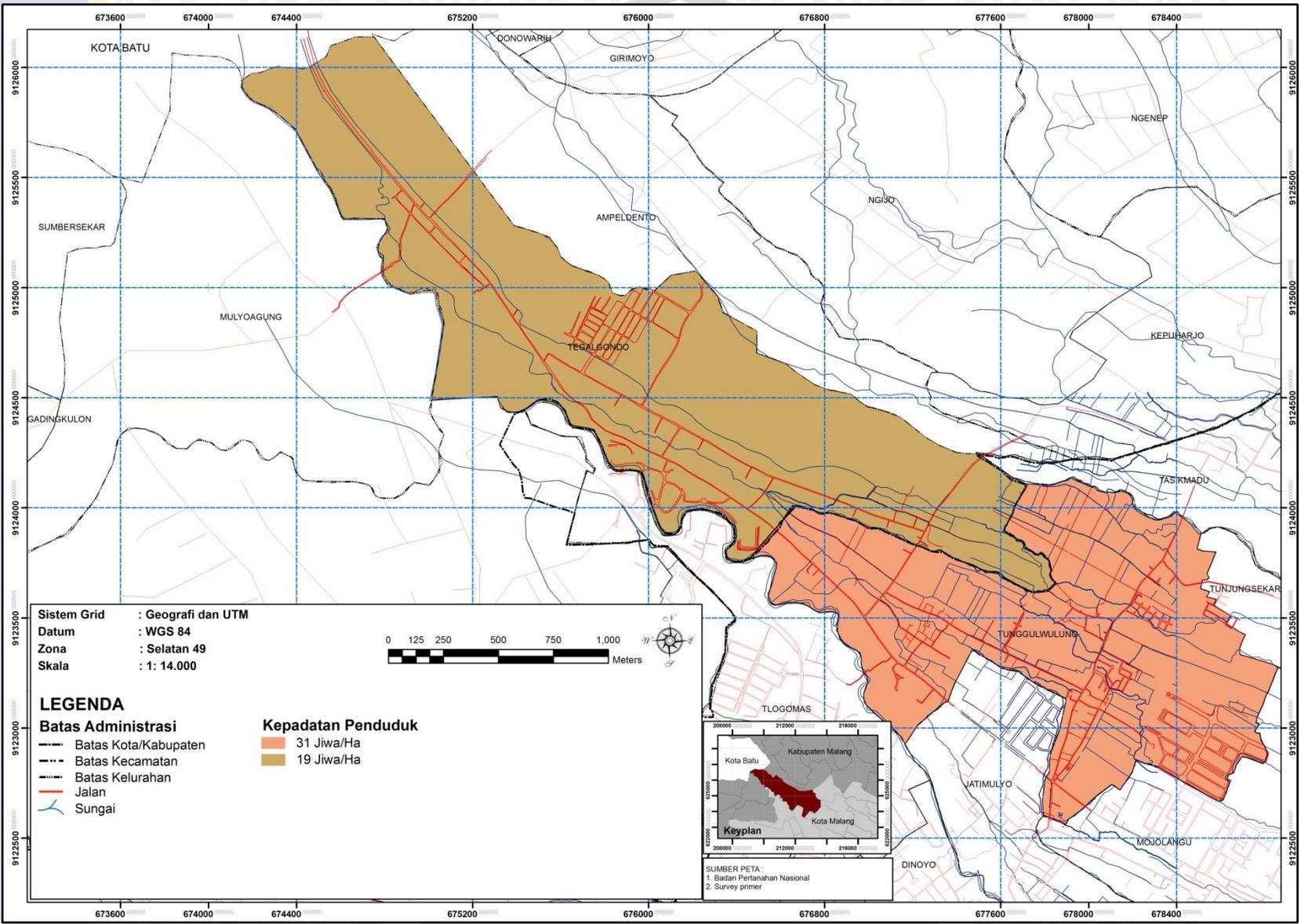
Kecamatan Karangploso tahun 2010-2030, kepadatan penduduk wilayah pinggiran tergolong kepadatan sedang.

Pertambahan jumlah penduduk wilayah pinggiran tidak hanya dari faktor kelahiran tetapi juga dari perpindahan penduduk masuk. Banyaknya perpindahan penduduk masuk dari wilayah lain dipengaruhi oleh banyaknya pembangunan perumahan oleh *developer* dan adanya universitas di Desa Tegalgondo.



Gambar 4.11 Jumlah penduduk masuk wilayah pinggiran

Rata-rata jumlah penduduk masuk di Kelurahan Tunggulwulung mencapai 124 jiwa/tahun. Sedangkan di Desa Tegalgondo, rata-rata jumlah penduduk masuk mencapai 92 jiwa/tahun. Perpindahan penduduk masuk ke wilayah pinggiran tersebut sangat dipengaruhi oleh letak wilayah pinggiran yang sangat strategis. Berdasarkan hasil survey, sebanyak 83% masyarakat pendatang memilih pindah ke wilayah pinggiran karena lokasi perumahan yang dibangun oleh *developer* di wilayah pinggiran dekat dengan tempat kerja maupun tempat pendidikan dan memiliki akses langsung menuju Kabupaten Malang dan Kota Batu. Sementara itu sebanyak 10% masyarakat memilih pindah ke wilayah pinggiran kerana harga perumahan yang dibangun oleh *developer* di wilayah pinggiran lebih murah daripada di wilayah perkotaan dan 7% masyarakat pendatang memilih tinggal di wilayah pinggiran karena mencari suasana lingkungan tempat tinggal yang tenang dan nyaman.



Gambar 4.12 Peta kepadatan penduduk

b. Konflik sosial

Seiring dengan berkembangnya wilayah pinggiran, karakter sosial masyarakat juga mengalami perkembangan menjadi lebih heterogen. Salah satu karakter sosial masyarakat wilayah pinggiran yang terbentuk akibat perkembangan wilayah pinggiran adalah adanya masyarakat pendatang dan masyarakat lokal yang berada di dalam satu wilayah dan sistem sosial yang sama. Kondisi ini seringkali menyebabkan interaksi yang *incompatible* diantara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal. Hal tersebut memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat wilayah pinggiran.

Konflik sosial di wilayah pinggiran tergolong konflik horisontal yaitu antara masyarakat lokal, pendatang, petani dan *developer* dan konflik vertikal antara masyarakat lokal dengan pemerintah lokal. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui terdapat beberapa isu terkait konflik sosial di wilayah pinggiran, yaitu adanya konversi lahan pertanian menjadi perumahan yang dibangun *developer*, adanya eksklusifitas perumahan tersebut adanya adat budaya yang berbeda dalam masyarakat, keterbatasan akses sarana dan adanya penurunan pendapatan petani.

Tabel 4.3 Konflik Sosial Wilayah Pinggiran

Isu Penyebab Konflik	Jenis Konflik	Pihak yang Terlibat
Kelurahan Tunggulwulung		
Konversi lahan pertanian menjadi perumahan yang dibangun <i>developer</i>	Horizontal, vertikal	Masyarakat lokal, pemerintah lokal dan <i>developer</i>
Eksklusifitas perumahan yang dibangun <i>developer</i>	Horizontal	Masyarakat lokal dan masyarakat pendatang
Perbedaan adat budaya antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang	Horizontal	Masyarakat lokal dan masyarakat pendatang
Penurunan pendapatan petani	Horizontal	Petani dan <i>developer</i>
Desa Tegalgondo		
Konversi lahan pertanian menjadi perumahan yang dibangun <i>developer</i>	Horizontal, vertikal	Masyarakat lokal, pemerintah lokal dan <i>developer</i>
Eksklusifitas perumahan yang dibangun <i>developer</i>	Horizontal	Masyarakat lokal dan masyarakat pendatang
Perbedaan adat budaya antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang	Horizontal	Masyarakat lokal dan masyarakat pendatang
Keterbatasan akses terhadap sarana	Horizontal	Masyarakat lokal dan masyarakat pendatang
Penurunan pendapatan petani	Horizontal	Petani dan <i>developer</i>

Sumber: Survey Primer

Konflik sosial yang terjadi di Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo adalah konflik sosial adanya pembangunan perumahan oleh *developer* yang mengkonversi lahan sawah, adanya eksklusifitas perumahan yang dibangun *developer*, adanya perbedaan

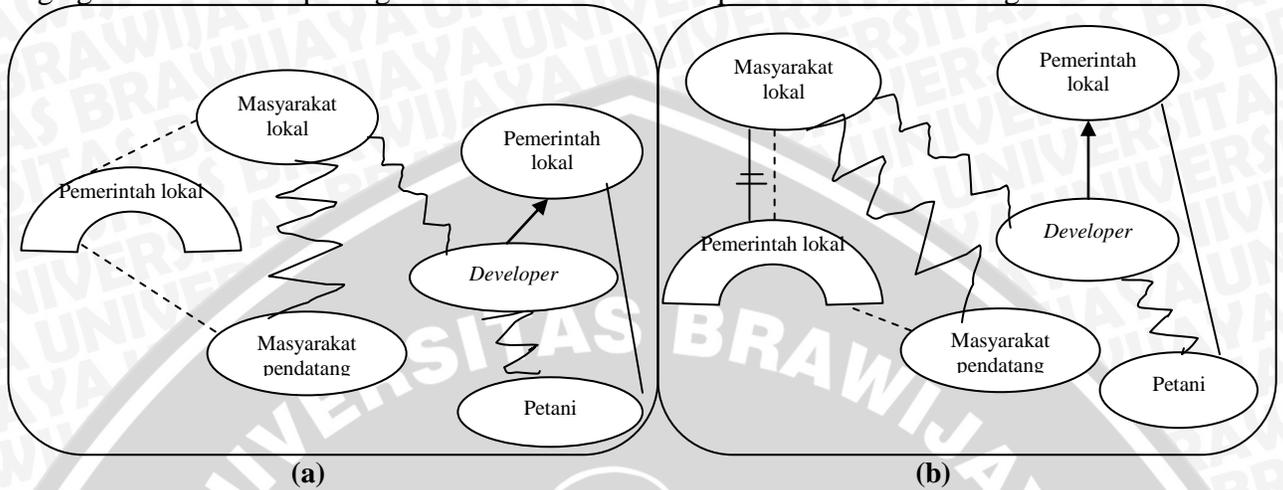
adat budaya antara masyarakat lokal dan pendatang, adanya keterbatasan akses terhadap sarana dan penurunan pendapatan petani karena berkurangnya lahan sawah. Konflik-konflik tersebut terdiri dari konflik horizontal dan vertikal dengan tahap konflik yang berbeda-beda mulai dari tahap konflik yang dapat diamati hingga tahap manifestasi konflik.

Konflik pembangunan perumahan oleh *developer* dimulai dari adanya penolakan oleh masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo terhadap rencana pembangunan perumahan oleh *developer* sejak tahap perencanaan awal karena dianggap merusak lingkungan sawah termasuk saluran irigasi didalamnya dan sekaligus mengurangi pendapatan petani karena lahan sawah berkurang. Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan perumahan oleh *developer* disampaikan pada pemerintah lokal tetapi tidak diterima sehingga ijin pembangunan perumahan tetap diberikan dan *developer* dapat membangun perumahan. Konflik tersebut akhirnya mencapai tahap manifestasi konflik yang berupa penutupan lahan proyek pembangunan perumahan yang dibangun *developer* dan tergolong konflik skala besar karena melingkupi seluruh wilayah kelurahan/desa dan melibatkan seluruh masyarakat.

Selain konflik pembangunan perumahan *developer* terdapat konflik sosial lainnya yaitu konflik eksklusifitas perumahan yang dibangun *developer*. Konflik tersebut berada pada tahap merasakan konflik dimana masyarakat lokal dan pendatang merasakan ada keterbatasan interaksi dan kesenjangan karena masyarakat lokal tidak dapat masuk ke perumahan yang dibangun *developer* yang merupakan tempat tinggal masyarakat pendatang dan mulai terjadi pertengkaran antara masyarakat tersebut. Demikian pula dengan konflik perbedaan adat budaya serta penutupan akses sarana oleh masyarakat pendatang yang juga berada pada tahap merasakan konflik. Konflik perbedaan adat budaya disebabkan karena masyarakat lokal tidak setuju dengan budaya masyarakat pendatang yang beraktifitas tanpa mengenal batas waktu sehingga sering menimbulkan pertengkaran antara kedua belah pihak. Sedangkan konflik pembatasan akses sarana olahraga disebabkan karena masyarakat pendatang tidak nyaman dengan keberadaan banyak orang yang menggunakan sarana olahraga di dekat perumahan mereka.

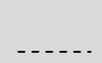
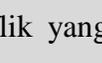
Konflik penurunan pendapatan petani berada pada tahap konflik yang dapat diamati karena pada tahap ini petani menganggap bahwa adanya pembangunan perumahan oleh *developer* dapat mengurangi pendapatan petani atau bahkan menghilangkan pekerjaan

petani. Namun konflik ini belum sampai menimbulkan pertengkaran dan belum termanifestasi. Konflik sosial yang terjadi di Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo tersebut dapat digambarkan di dalam suatu pemetaan konflik sebagai berikut:



Gambar 4.13 Pemetaan konflik sosial (a) Kelurahan Tunggulwulung; (b) Desa Tegalgondo

Keterangan:

-  = pihak yang terlibat konflik
-  = pihak diluar konflik yang melakukan intervensi
-  = hubungan yang mendominasi atas pihak lain
-  = hubungan tidak konflik
-  = hubungan yang lemah antar pihak
-  = hubungan yang terputus antar pihak
-  = hubungan konflik antar pihak

Konflik yang terjadi akibat pembangunan perumahan oleh *developer* di wilayah pinggiran ditunjukkan adanya penutupan lahan perumahan yang dilakukan masyarakat lokal. Hal tersebut dikarenakan pembangunan perumahan oleh *developer* di lahan pertanian dianggap akan mengurangi lapangan kerja dan pendapatan petani sekaligus lahan resapan dan penghasil oksigen serta merusak jaringan irigasi yang sudah ada. Konflik ini terjadi pada tahun 2011 hingga saat ini (tahun 2012) sehingga *developer* tidak dapat melanjutkan pembangunan perumahan yang mencapai tahap persiapan lahan dan pengkavlingan.

Konversi lahan pertanian menjadi perumahan menyebabkan konflik yang melibatkan masyarakat lokal, pemerintah desa/kelurahan dan *developer*. Berdasarkan hasil survey wawancara diketahui bahwa pihak pemerintah lokal telah menyetujui rencana pembangunan perumahan oleh *developer*. Namun masyarakat lokal tidak setuju dan menyampaikan kepada pemerintah lokal. Pendapat masyarakat yang tidak setuju dengan

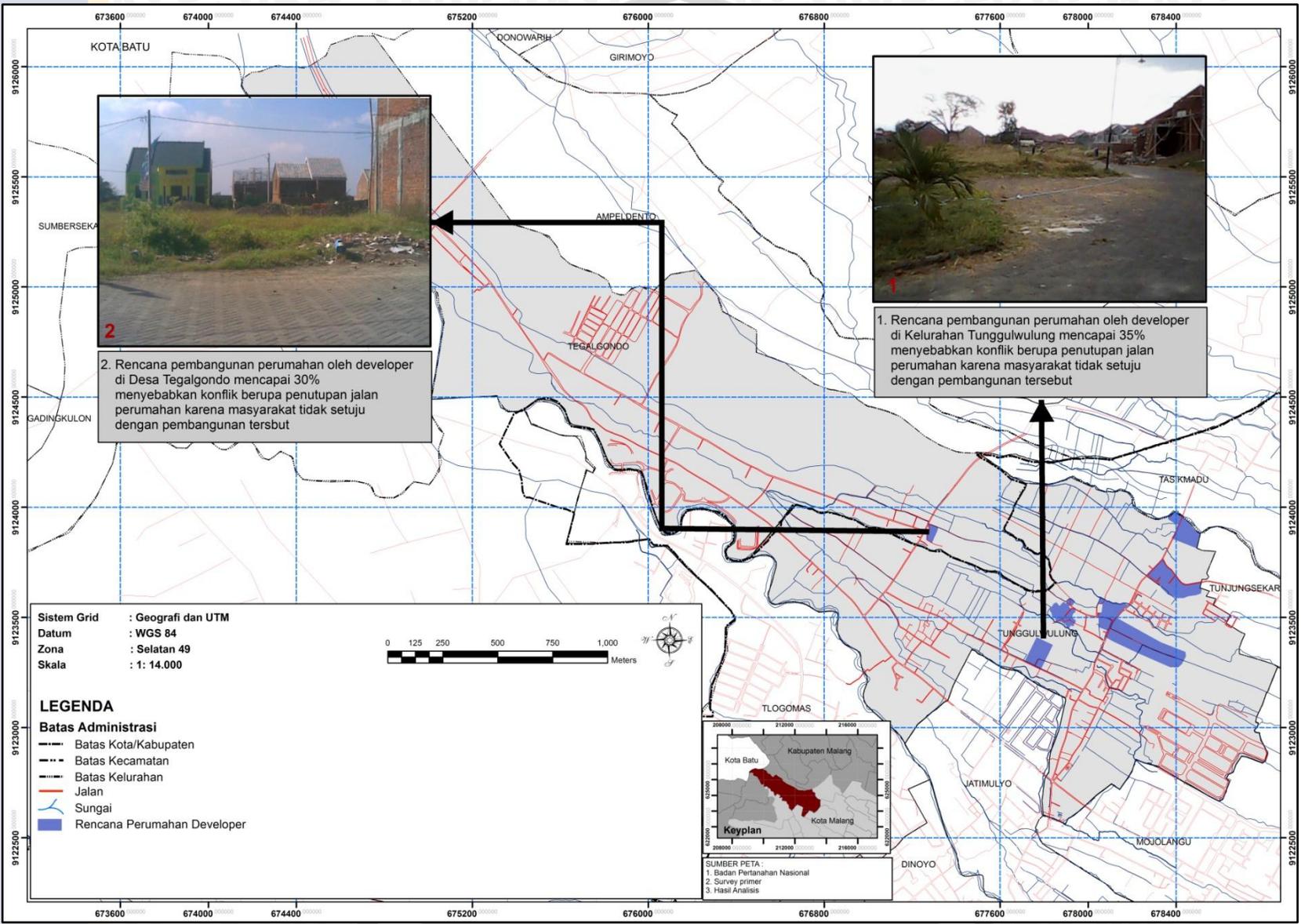
rencana pembangunan perumahan oleh *developer* tidak diterima pemerintah desa Tegalgondo sehingga hubungan kedua pihak tersebut putus. Sedangkan pemerintah Kelurahan Tunggulwulung masih mempertimbangkan rencana pembangunan perumahan oleh *developer* dan pendapat masyarakat lokal yang tidak setuju, sehingga masih terdapat hubungan tetapi sangat lemah dan hanya ditunjukkan dengan intensitas interaksi yang rendah.

Hubungan masyarakat lokal dan *developer* dalam konflik penutupan perumahan adalah hubungan konflik atau hubungan yang saling bersaing dalam memperoleh kepentingan masing-masing. Masyarakat lokal memiliki kepentingan untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian, sedangkan kepentingan *developer* adalah membangun perumahan sebagai bagian dari investasi. Hubungan sebaliknya ditunjukkan oleh hubungan antara pemerintah desa/kelurahan dengan *developer* yang saling bekerja sama namun dengan dominasi pihak *developer* terhadap pemerintah lokal.

Konflik sosial yang terjadi di antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang disebabkan oleh adanya eksklusifitas perumahan yang dibangun *developer* yang menciptakan kesan terisolir dan tidak dapat diakses masyarakat lokal sehingga membatasi interaksi masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal dan menimbulkan pertengkaran. Hal tersebut sangat berbeda dengan budaya masyarakat wilayah pinggiran yang guyub dan tidak individu.

Bentuk konflik sosial lainnya yang terjadi antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang adalah adanya pembatasan akses sarana olahraga untuk masyarakat lokal oleh masyarakat pendatang. Pembatasan akses dilakukan pada saat tertentu seperti tradisi bersih desa dimana masyarakat lokal dilarang menggunakan sarana olahraga tersebut karena dianggap mengganggu aktifitas masyarakat pendatang yang bertempat tinggal di perumahan dekat sarana tersebut. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lokal merasa tersinggung dan menimbulkan pertengkaran kedua pihak.

Konflik terkait penurunan pendapatan petani hanya mencapai tahap konflik dapat diamati dimana konflik terjadi antara petani dengan *developer*. Pada konflik ini tidak terjadi interaksi konflik berupa pertengkaran tetapi hanya berupa ketidaksetujuan petani pada keputusan pemerintah lokal yang menyetujui pembangunan perumahan oleh *developer* yang mengkonversi sawah dan petani merasa tujuannya secara ekonomi telah terganggu.



Gambar 4.16 Foto mapping konflik pembangunan perumahan

c. Kelembagaan

Kehidupan sosial masyarakat wilayah pinggiran tidak terlepas dari sistem sosial yang melibatkan kelembagaan sosial. Keberadaan kelembagaan sosial dapat membantu menjalankan fungsi sosial di dalam kehidupan masyarakat wilayah pinggiran. Kelembagaan sosial di wilayah pinggiran terdiri dari lembaga kemasyarakatan dan kelompok kemasyarakatan.

Lembaga kemasyarakatan merupakan bagian dari kelembagaan desa atau kelurahan yang pada umumnya berada di bawah kepengurusan pemerintah desa atau kelurahan. Lembaga kemasyarakatan meliputi LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), BPD (Badan Pembangunan Desa), dan Karang Taruna.

Keanggotaan di dalam lembaga kemasyarakatan adalah masyarakat wilayah pinggiran baik masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang. Melalui kelembagaan tersebut masyarakat lokal dan masyarakat pendatang dapat saling bekerjasama dan menjalin interaksi.

Kelompok kemasyarakatan meliputi kelompok tani, kelompok keagamaan dan kelompok PKK. Keanggotaan kelompok tersebut adalah masyarakat lokal dan masyarakat pendatang dengan lingkup kegiatan mulai dari RW atau dusun hingga desa atau kelurahan. Adanya lembaga yang diikuti oleh masyarakat lokal dan pendatang dapat mendukung kehidupan masyarakat sekaligus memperserat hubungan antara masyarakat lokal dan pendatang.

Tabel 4.4 Kelembagaan Wilayah Pinggiran

Desa/Kelurahan	Bentuk Kelembagaan	Fungsi	Keanggotaan	Lingkup Kegiatan
Tunggulwulung dan Tegalondo	Lembaga kemasyarakatan			
	LPMD	Menyelenggarakan musrenbang dan rapat desa serta pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat	Masyarakat lokal dan pendatang	Desa/Kelurahan
	BPD	Menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan desa		
	Karang Taruna	Menyelenggarakan kegiatan olahraga dan bakti sosial oleh kalangan remaja	Masyarakat lokal	RW/dusun-Desa/kelurahan
Tunggulwulung dan Tegalondo	Kelompok Kemasyarakatan			
	Kelompok tani	Mengurus kebutuhan pertanian (penyediaan bibit, pengolahan	Masyarakat lokal	Desa

Desa/Kelurahan	Bentuk Kelembagaan	Fungsi	Keanggotaan	Lingkup Kegiatan
		pasca panen, koperasi dan penjualan hasil panen)		
	Kelompok keagamaan PKK	Menyelenggarakan kegiatan keagamaan	Masyarakat lokal Masyarakat lokal dan pendatang	RW/dusun RW/dusun- Desa/kelurahan

Sumber: Survey Primer

d. Adat budaya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat pendatang memiliki karakteristik masyarakat perkotaan dan masyarakat lokal memiliki karakteristik masyarakat yang lebih pedesaan. Masyarakat lokal wilayah pinggiran baik di Kelurahan Tunggulwulung maupun di Desa Tegalgondo masih menjalankan adat budaya atau tradisi yang berlaku sampai saat ini seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Beberapa adat budaya atau tradisi yang masih dilakukan sampai saat ini adalah kegiatan keagamaan setiap minggu berupa kegiatan kelompok pengajian baik lingkup RW, dusun maupun desa; kegiatan bersih desa yang dilakukan setahun sekali; upacara kematian yang masih tradisional dan diatur oleh kepala keagamaan; kegiatan ziarah makam yang dilakukan sebulan sekali dan kegiatan pertanian adat dimana masa tanam dan panen dilakukan bersamaan oleh seluruh petani sesuai adat budaya. Berbeda dengan masyarakat pendatang yang sudah tidak lagi menjalankan adat budaya sejak bertempat tinggal di wilayah perkotaan.

Tabel 4.5 Analisis Adat Budaya Wilayah Pinggiran

Desa/Kelurahan	Budaya/adat	Tipologi Masyarakat			
		Masyarakat lokal		Masyarakat pendatang	
		Sikap	Orientasi Tindakan	Sikap	Orientasi Tindakan
Tunggulwulung dan Tegalgondo	Masyarakat Lokal				
	Kegiatan keagamaan setiap minggu	Menerima (+)	tindakan individu mengacu pada nilai dan norma sosial	Menerima (+)	Kolektif: Tindakan individu mengaju pada nilai dan norma sosial/ agama
	Kegiatan bersih desa 1 tahun sekali	Menerima (+)	tindakan individu mengacu pada nilai dan norma sosial	Tidak menerima (-)	Netralis afektif: Tindakan individu mengacu pada rasionalitas
	Upacara kematian	Menerima (+)	tindakan individu	Tidak menerima (-)	Netralis afektif: Tindakan

Desa/Kelurahan	Budaya/adat	Tipologi Masyarakat			
		Masyarakat lokal		Masyarakat pendatang	
		Sikap	Orientasi Tindakan	Sikap	Orientasi Tindakan
Tegalgondo	Kegiatan ziarah makam	Menerima (+)	mengacu pada nilai dan norma sosial tindakan individu	Tidak menerima (-)	individu mengacu pada rasionalitas Netralis afektif: Tindakan individu mengacu pada rasionalitas
	Pertanian adat	Menerima (+)	mengacu pada nilai dan norma sosial tindakan individu	Menerima (+)	Netralis afektif: Tindakan individu mengacu pada rasionalitas
Tunggulwulung dan Tegalgondo	Beraktifitas maksimal hingga jam 10 malam	Menerima (+)	mengacu pada nilai dan norma sosial tindakan individu	Tidak menerima (-)	Netralis afektif: Tindakan individu mengacu pada rasionalitas
	Masyarakat Pendatang Beaktifitas tanpa batas waktu	Tidak menerima (-)	Tindakan individu mengacu nilai dan norma sosial	Menerima (+)	Orientasi diri: Tindakan individu mengacu pada rasionalitas

Sumber: Survey Primer dan Analisis

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa terdapat beberapa adat budaya yang saling tidak diterima oleh masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di wilayah pinggiran. Bentuk budaya masyarakat lokal yang dapat diterima oleh masyarakat pendatang adalah kegiatan keagamaan. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat pendatang selain bertindak dengan dasar rasionalitas tetapi juga dengan dasar norma agama.

Bentuk budaya masyarakat lokal yang tidak dapat diterima oleh masyarakat pendatang adalah budaya bersih desa, upacara kematian dan ziarah ke makam keluarga. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat pendatang bersifat rasional dan tidak mempercayai budaya-budaya tersebut.

Masyarakat lokal dan masyarakat pendatang saling tidak menyetujui budaya masing-masing pihak terkait kebiasaan beraktifitas hingga larut malam. Masyarakat lokal selalu beraktifitas hingga jam 10 malam karena menganggap beraktifitas lebih dari jam 10 malam tidak sopan dan dapat mengganggu waktu istirahat. Sebaliknya dengan masyarakat pendatang yang seringkali beraktifitas hingga lebih dari jam 10 malam karena terbiasa

ketika masih bertempat tinggal di wilayah perkotaan yang intensitas aktifitasnya lebih padat dan lama.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa masyarakat lokal dan masyarakat pendatang memiliki adat budaya atau tradisi dan kebiasaan yang berbeda. Sebagian budaya tersebut dapat diterima dan sebagian tidak dapat diterima oleh masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang.

4.1.3 Karakteristik ekonomi

Sebelum perkembangan wilayah perkotaan ke arah wilayah pinggiran, kegiatan ekonomi di wilayah pinggiran didominasi oleh pertanian. Kegiatan ekonomi ini didukung oleh keberadaan lahan pertanian yang mendominasi penggunaan lahan wilayah pinggiran. Perubahan fisik binaan wilayah pinggiran mulai merubah kehidupan ekonomi masyarakat wilayah pinggiran baik dari segi pendapatan maupun ketenagakerjaan.

a. Pendapatan

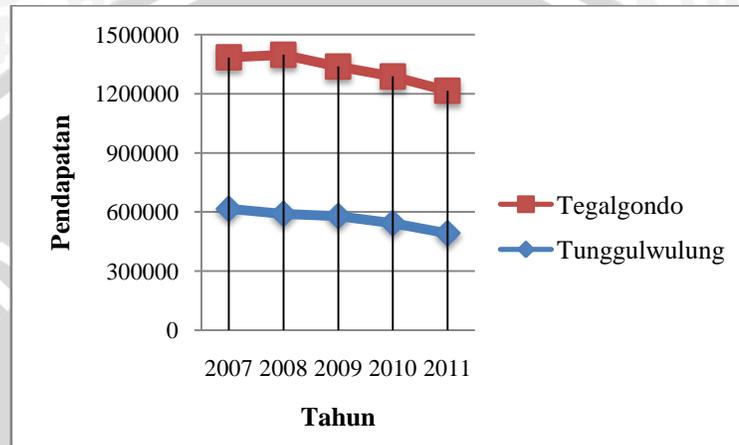
Pendapatan adalah salah satu indikator ekonomi wilayah pinggiran yang ditinjau dari perubahan pendapatan petani yang meliputi petani penggarap dan buruh tani sebagai pihak yang paling terpengaruh dengan perkembangan wilayah pinggiran. Pendapatan petani berubah seiring dengan perubahan penggunaan lahan wilayah pinggiran terutama berkurangnya lahan sawah dari tahun 2007-2011 sebagai berikut:

Tabel 4.6 Perkembangan Pendapatan Petani Wilayah Pinggiran

Desa/Kelurahan	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
Tunggulwulung					
Luas (Ha)	136.76	131.13	128.71	120.72	109.23
Produksi (ton)	2051.4	1966.95	1930.65	1810.8	1638.45
Pendapatan pemilik lahan (Rp)	4102800	3933900	3861300	3621600	3276900
Pendapatan petani (Rp)	615420	590085	579195	543240	491535
Tegalgondo					
Luas (Ha)	170.76	179.40	168.54	165.36	160.73
Produksi (ton)	2561.4	2691	2528.1	2480.4	2410.95
Pendapatan pemilik lahan (Rp)	5122800	5382000	5056200	4960800	4821900
Pendapatan petani (Rp)	768420	807300	758430	744120	723285

Sumber: survey Primer 2012
 Monografi Desa 2005-2011
 Kabupaten Dalam Angka 2008-2010

Perkembangan pendapatan petani terus menurun dari tahun 2007-2011. Rata-rata penurunan pendapatan petani tersebut sebesar Rp 30.971,- dan Rp 11.284,- per tahun di Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo. Penurunan pendapatan petani di wilayah pinggiran dipengaruhi oleh berkurangnya lahan pertanian sawah dari tahun ke tahun dan beralih fungsi menjadi lahan perumahan yang dibangun oleh *developer*. Kondisi tersebut mendorong petani untuk mencari pekerjaan sampingan atau beralih mata pencaharian.



Gambar 4.17 Perkembangan pendapatan petani wilayah pinggiran

b. Ketenagakerjaan

Perkembangan wilayah pinggiran diiringi oleh perubahan mata pencaharian masyarakat lokal. Perubahan mata pencaharian masyarakat dipengaruhi oleh pola penggunaan lahan yang berubah terutama menjadi perumahan yang dibangun oleh *developer*.

Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (Jiwa)									
	Tunggulwulung					Tegalgondo				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Pemilik tanah	93	93	930	900	545	447	447	331	312	295
Petani	85	70	198	115	70	477	331	351	336	325
Pedagang	137	137	145	105	125	134	149	156	158	158
PNS	29	29	29	29	2	319	260	213	175	137
Swasta	99	99	99	143	58	225	297	251	132	132
Buruh	121	221	180	780	110	25	41	41	53	57
Lainnya	17	38	38	42	59	103	144	117	201	201
TOTAL	581	702	654	2227	1369	1530	1369	1160	1067	1005

Sumber: Monografi Desa/Kelurahan Tahun 2005-2011

Masyarakat yang paling terpengaruh oleh pembangunan perumahan oleh *developer* adalah petani yang meliputi buruh tani dan petani penggarap. Masyarakat wilayah pinggiran yang bermata pencaharian sebagai petani mengalami peningkatan pada tahun 2008 sebanyak 198 jiwa dan kembali menurun hingga tahun 2011 menjadi 70 jiwa di Kelurahan Tunggulwulung. Berbeda dengan Kelurahan Tunggulwulung, jumlah petani di Desa Tegalgondo berkurang sejak tahun 2007-2008, yaitu dari 477 jiwa menjadi 331 jiwa. Jumlah petani di Desa Tegalgondo mengalami peningkatan tahun 2008 sebanyak 20 jiwa petani dan kembali menurun hingga tahun 2011 dan menjadi 325 jiwa. Jumlah petani di wilayah pinggiran terus berkurang dalam kurun waktu 5 tahun yaitu sebanyak 385 petani di Kelurahan Tunggulwulung dan 182 petani di Desa Tegalgondo. Hal tersebut disebabkan karena berkurangnya lahan sawah membuat masyarakat yang sebelumnya bermata pencaharian sebagai petani beralih pekerjaan lain seperti menjadi buruh industri, wiraswasta atau tidak bekerja. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi pendapatan petani yang semakin menurun sehingga keberadaan lahan sawah harus dipertahankan. Selain itu pemerintah harus memberikan disinsentif pada *developer* dalam pembangunan perumahan yang dapat berupa penyediaan lapangan kerja bagi petani yang kehilangan pekerjaan.

4.2 Daya Dukung Sosial Wilayah Pinggiran

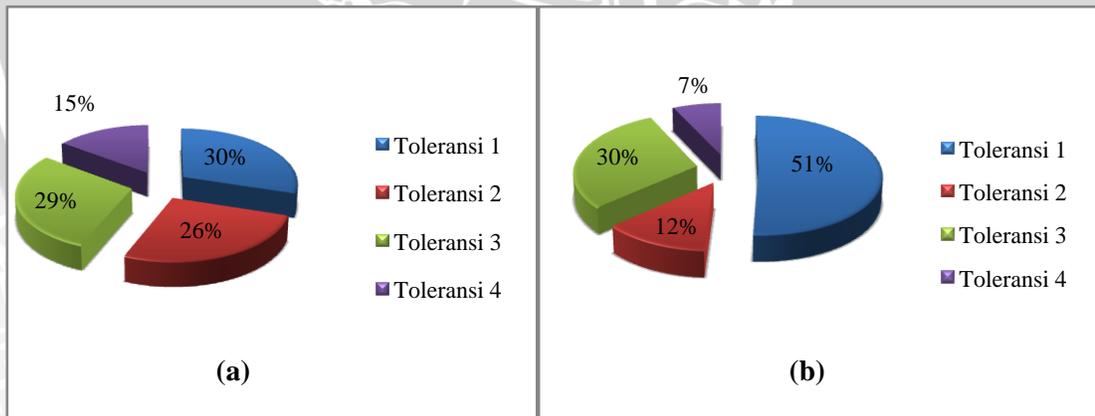
Perkembangan wilayah pinggiran dengan berbagai karakteristik yang kompleks sebagai bentuk perpaduan lingkungan perkotaan dan pedesaan tidak selalu dapat diterima oleh masyarakat. Berbagai karakteristik tersebut dapat menjadi variabel daya dukung sosial masyarakat wilayah pinggiran untuk mengetahui hasil pembangunan wilayah pinggiran diterima atau tidak oleh masyarakat. Berdasarkan hasil survey primer melalui kuisioner diperoleh data mengenai toleransi masyarakat terhadap karakteristik wilayah pinggiran yang menjadi variabel daya dukung sosial. Tingkat toleransi tersebut terdiri dari toleransi 1-4 (tidak dapat diterima-sangat dapat diterima) dengan jumlah toleransi sebagai berikut:

Tabel 4.8 Toleransi Masyarakat Wilayah Pinggiran

Parameter	Tunggulwulung				Tegalgondo			
	Jumlah Toleransi				Jumlah Toleransi			
	1	2	3	4	1	2	3	4
P1 (Luas lahan pertanian yang telah berubah menjadi perumahan)	67	28	4	0	70	21	8	0
P2 (Luas lahan pertanian yang akan berubah menjadi perumahan)	41	50	7	1	65	17	16	1
P3 (Kepadatan bangunan)	0	2	66	31	2	11	71	15
P4 (sarana yang tidak dapat diakses masyarakat)	0	2	67	30	83	8	5	3

Parameter	Tunggulwulung				Tegalondo			
	Jumlah Toleransi							
	1	2	3	4	1	2	3	4
P5 (prasarana air bersih yang tidak dapat diakses masyarakat)	20	50	28	1	28	29	42	0
P6 (prasarana sanitasi yang tidak dapat diakses masyarakat)	53	39	6	1	80	16	3	0
P7 (Prasarana persampahan)	1	2	56	40	90	3	3	3
P8 (Rata-rata penduduk yang masuk/tahun)	1	7	66	25	52	19	22	6
P9 (Laju pertumbuhan penduduk/tahun)	18	26	33	22	21	7	50	21
P10 (Kepadatan penduduk)	43	49	6	1	16	5	54	24
P11 (Jumlah petani kehilangan pekerjaan karena berkurangnya lahan pertanian)	54	38	6	1	88	9	2	0
P12 (Pnurunan pendapatan petani)	92	7	0	0	80	14	5	0
P13 (Jenis, skala, penyebab dan pihak yang terlibat konflik pembangunan perumahan)	71	21	6	1	94	5	0	0
P14 (Jenis, skala, penyebab dan pihak yang terlibat konflik pembatasan sarana)	26	61	7	5	83	10	4	2
P15 (Bentuk, fungsi dan keanggotaan kelembagaan kemasyarakatan)	5	0	40	54	0	4	86	9
P16 (Bentuk, fungsi dan keanggotaan kelompok kemasyarakatan)	1	1	54	43	0	3	91	5
P17 (Budaya masyarakat yang diikuti masyarakat lokal/pendatang)	1	1	77	20	0	1	71	27
P18 (Budaya masyarakat yang tidak diikuti masyarakat lokal/pendatang)	22	67	9	1	18	45	19	17
P19 (Budaya masyarakat pendatang yang tidak diikuti masyarakat lokal)	46	45	7	1	88	8	3	0
Total	562	496	545	278	958	235	555	133

Sumber: Survey Primer



Gambar 4.18 Persentase toleransi mayasrakat (a) Kelurahan Tunggulwulung; (b) Desa Tegalondo

Toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung didominasi oleh toleransi 1 yang berarti dapat menerima kondisi eksisting variabel daya dukung sosial sebanyak 30%. Sedangkan toleransi paling sedikit adalah toleransi 4 yang berarti sangat dapat menerima kondisi eksisting variabel daya dukung sosial sebanyak 15%. Toleransi masyarakat Desa

Tegalondo didominasi toleransi 1 yang berarti tidak dapat menerima kondisi eksisting variabel daya dukung sosial sebanyak 51% dan toleransi paling sedikit toleransi 4 yang berarti sangat dapat menerima kondisi eksisting variabel daya dukung sosial sebanyak 7%.

Tabel 4.9 Jumlah Toleransi Masyarakat Wilayah Pinggiran

Parameter	Jumlah toleransi	
	Tunggulwulung	Tegalondo
P1 (Luas lahan pertanian yang telah berubah menjadi perumahan)	135	136
P2 (Luas lahan pertanian yang akan berubah menjadi perumahan)	166	151
P3 (Kepadatan bangunan)	326	279
P4 (sarana yang tidak dapat diakses masyarakat)	325	126
P5 (prasarana air bersih yang tidak dapat diakses masyarakat)	208	212
P6 (prasarana sanitasi yang tidak dapat diakses masyarakat)	153	121
P7 (Prasarana persampahan)	333	117
P8 (Rata-rata penduduk yang masuk/tahun)	313	180
P9 (Laju pertumbuhan penduduk/tahun)	257	269
P10 (Kepadatan penduduk)	163	284
P11 (Jumlah petani kehilangan pekerjaan karena berkurangnya lahan pertanian)	152	112
P12 (Penurunan pendapatan petani)	106	123
P13 (Jenis, skala, penyebab dan pihak yang terlibat konflik pembangunan perumahan)	135	104
P14 (Jenis, skala, penyebab dan pihak yang terlibat konflik pembatasan sarana)	189	123
P15 (Bentuk, fungsi dan keanggotaan kelembagaan kemasyarakatan)	341	302
P16 (Bentuk, fungsi dan keanggotaan kelompok kemasyarakatan)	337	299
P17 (Budaya masyarakat yang diikuti masyarakat lokal/pendatang)	314	323
P18 (Budaya masyarakat yang tidak diikuti masyarakat lokal/pendatang)	187	233
P19 (Budaya masyarakat pendatang yang tidak diikuti masyarakat lokal)	161	113
TOTAL	4301	3625

Sumber: Survey Primer dan Analisis

Toleransi Kelurahan Tunggulwulung secara keseluruhan tergolong sedang dengan jumlah toleransi 226 dan Desa Tegalondo tergolong rendah dengan jumlah toleransi 191. Toleransi tertinggi adalah toleransi terhadap lembaga kemasyarakatan yaitu 341 dan toleransi terendah adalah toleransi terhadap konflik sosial yaitu 104 sehingga pembagian klasifikasi toleransi adalah:

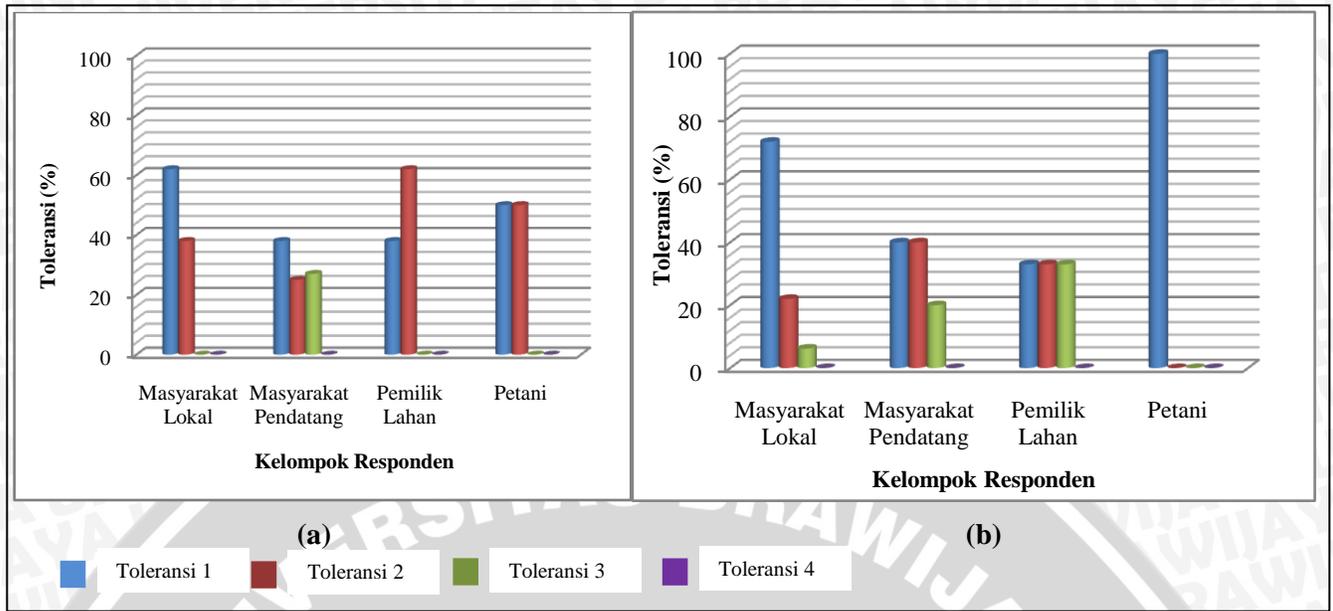
$$i = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k}$$

$i = \frac{341 - 104}{4} = 59$ Jadi interval kelas adalah 59, maka klasifikasi toleransi adalah:

Tabel 4.10 Klasifikasi Toleransi Masyarakat

Jumlah Toleransi	Klasifikasi
105-164	Sangat rendah
165-224	Rendah
225-284	Sedang
285-344	Tinggi

Sumber: Hasil

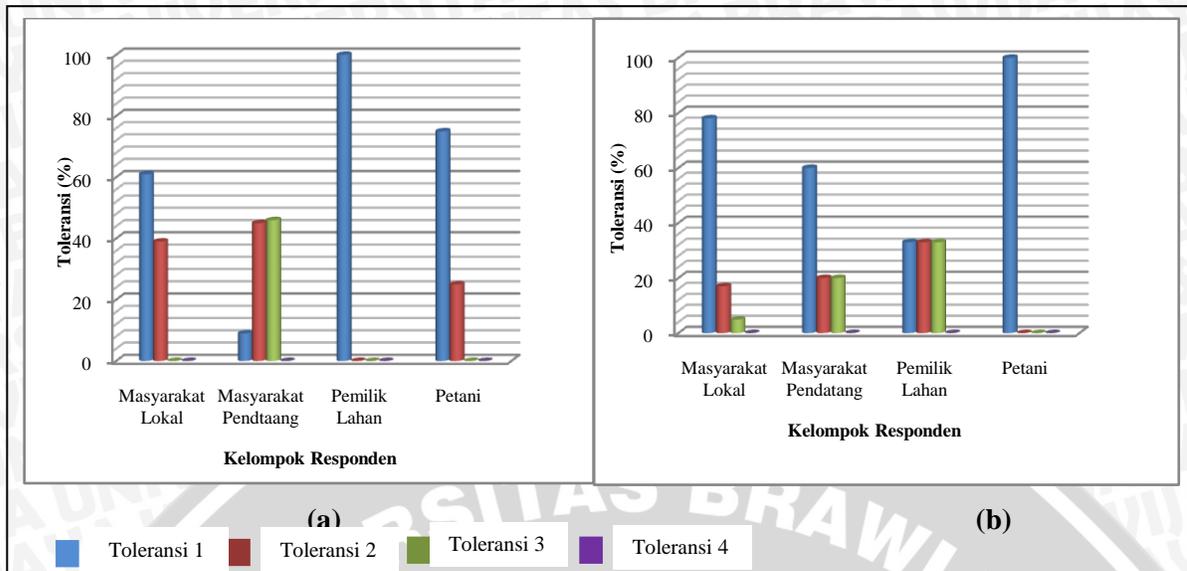


Gambar 4.19 Toleransi masyarakat terhadap parameter 1 (a) Kelurahan Tunggulwulung (b) Desa Tegalgondo

Toleransi masyarakat lokal, pemilik lahan dan petani Kelurahan Tunggulwulung untuk parameter luas konversi lahan sawah menjadi perumahan yang dibangun *developer* adalah toleransi 1 yaitu tidak dapat menerima dan 2 yaitu kurang dapat menerima. Sedangkan toleransi masyarakat pendatang lebih beragam yaitu tidak dapat menerima sampai dapat menerima dengan 38% tidak dapat menerima. Jadi diantara seluruh kelompok masyarakat, masyarakat pendatang adalah kelompok masyarakat yang memiliki toleransi 3 atau dapat menerima konversi lahan sawah menjadi perumahan.

Demikian pula dengan toleransi masyarakat Desa Tegalgondo yang didominasi toleransi 1 yaitu tidak dapat menerima konversi lahan sawah menjadi perumahan, masing-masing sebanyak 72% masyarakat lokal, 40% masyarakat pendatang, 33% pemilik lahan dan 100% petani. Selain memiliki toleransi 1 atau tidak dapat menerima konversi lahan sawah, terdapat pula masyarakat yang masih dapat menerima konversi lahan sawah menjadi perumahan, terutama pemilik lahan sebanyak 33%. Hal tersebut dikarenakan pemilik lahan mendapat keuntungan dengan menjual lahan sawah kepada *developer*.

Secara umum toleransi masyarakat terhadap konversi lahan sawah menjadi perumahan yang dibangun *developer* tergolong toleransi rendah. Masyarakat lebih banyak tidak dapat menerima konversi lahan sawah menjadi perumahan yang dibangun *developer*, terutama petani karena mempengaruhi mata pencaharian petani.



Gambar 4.20 Toleransi masyarakat terhadap parameter 2 (a) Kelurahan Tunggulwulung; (b) Desa Tegalgondo

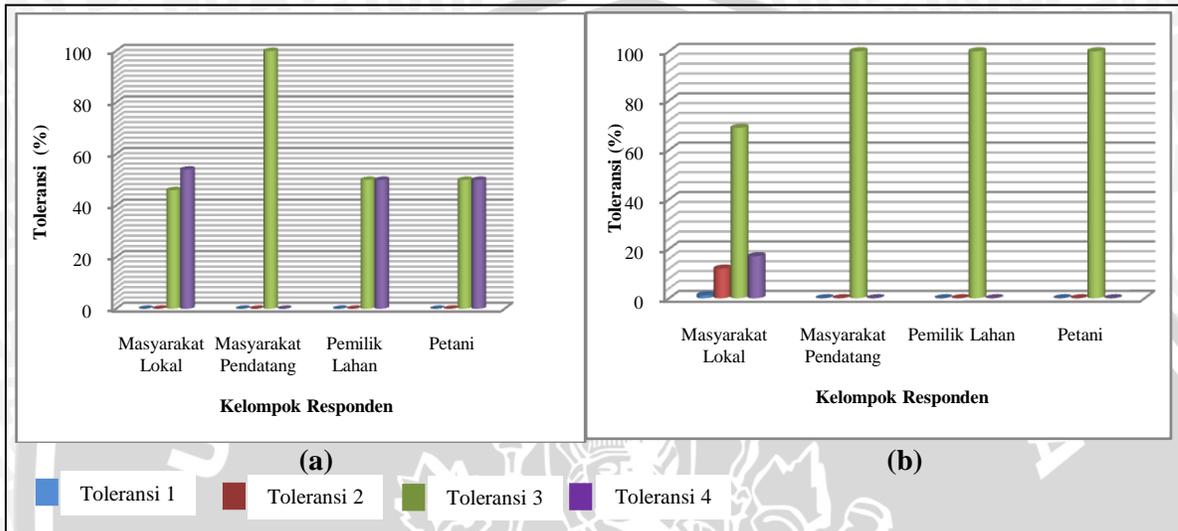
Adanya rencana pembangunan perumahan oleh *developer* tidak hanya ditolak oleh masyarakat lokal dan petani tetapi juga oleh masyarakat pendatang. Hal tersebut ditunjukkan oleh toleransi masyarakat lokal dan petani Kelurahan Tunggulwulung terhadap parameter 2 atau rencana konversi lahan sawah menjadi perumahan yang dibangun *developer*, yaitu tidak dapat menerima dan kurang dapat menerima masing-masing 61% dan 39% serta 75% dan 25%. Sedangkan pemilik lahan 100% kurang dapat menerima rencana konversi sawah karena menganggap sawah yang tersisa tidak perlu berkurang lagi. Nilai toleransi masyarakat pendatang terdiri dari toleransi 1 yaitu tidak dapat menerima dan didominasi toleransi 3 yaitu dapat menerima sebanyak 46%.

Toleransi masyarakat pendatang Desa Tegalgondo terhadap parameter adanya rencana pembangunan perumahan yang mengkonversi lahan sawah didominasi oleh toleransi tidak dapat menerima rencana tersebut yaitu sebanyak 60% masyarakat lokal, 78% masyarakat pendatang, 33% pemilik lahan dan 100% petani.

Masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo memiliki toleransi rendah terhadap rencana konversi lahan sawah. Hal tersebut disebabkan karena konversi lahan sawah akan mengurangi hasil produksi sawah sekaligus pendapatan petani, bahkan konversi lahan sawah tersebut dapat menyebabkan sebagian petani kehilangan pekerjaan.

Rendahnya toleransi masyarakat terhadap konversi lahan sawah menjadi perumahan dapat menyebabkan daya dukung sosial masyarakat rendah sehingga rentan terhadap konflik sosial. Oleh karena itulah diperlukan pembatasan terhadap konversi lahan sawah

menjadi perumahan yang berlangsung terus menerus. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melalui disinsentif bagi *developer* yang akan membangun perumahan dengan mengkonversi lahan sawah di wilayah pinggiran. Disinsentif tersebut dapat berupa penyediaan lahan sawah pengganti, penyediaan sarana dan prasarana permukiman maupun penyediaan lapangan kerja bagi petani yang akan kehilangan pekerjaan.

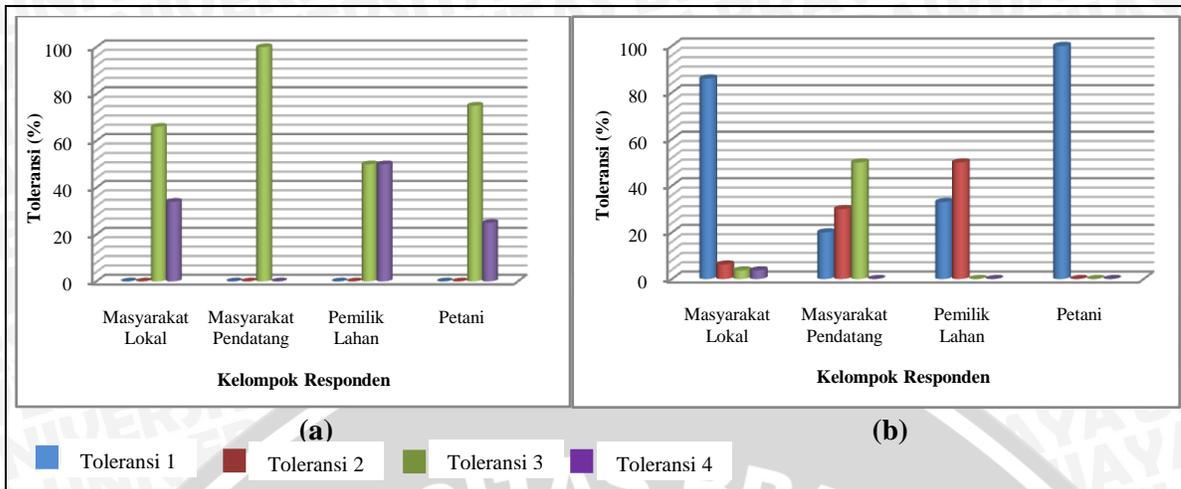


Gambar 4.21 Toleransi masyarakat terhadap parameter 3 (a) Kelurahan Tunggulwulung; (b) Desa Tegalgondo

Toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung terhadap parameter 3 yaitu kepadatan bangunan cenderung sama yaitu toleransi 3 yang berarti dapat menerima dan toleransi 4 yang berarti sangat dapat menerima kepadatan bangunan. Toleransi pemilik lahan dan petani masing-masing 50% untuk toleransi 3 dan 4. Sedangkan masyarakat pendatang 100% dapat menerima kepadatan bangunan.

Masyarakat Desa Tegalgondo lebih banyak dapat menerima kepadatan bangunan dimana sebanyak 69% masyarakat lokal dan 100% masyarakat pendatang, pemilik lahan dan petani dapat menerima kondisi eksisting kepadatan bangunan Desa Tegalgondo yang tergolong kepadatan rendah.

Secara keseluruhan terlihat bahwa masyarakat wilayah pinggiran memiliki toleransi yang tinggi terhadap kepadatan bangunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi eksisting kepadatan bangunan yang masih tergolong kepadatan sedang sehingga masyarakat masih dapat menerima kepadatan bangunan tersebut. Namun kepadatan bangunan yang tergolong sedang tetap diharapkan tidak bertambah karena dapat mengurangi lahan terbuka dan menyebabkan lingkungan permukiman menjadi tidak nyaman.



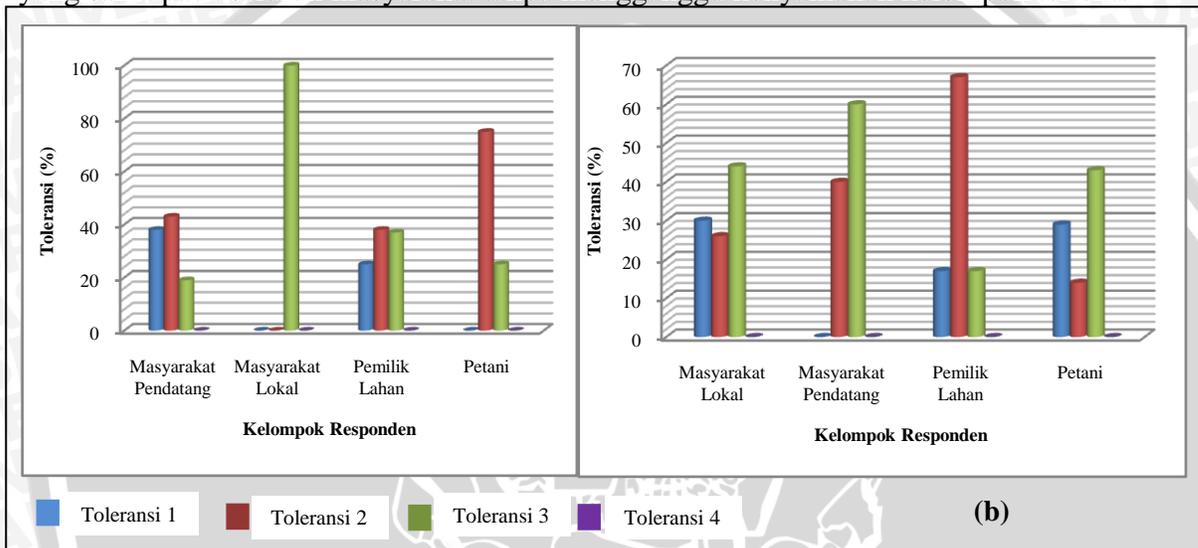
Gambar 4.23 Toleransi masyarakat terhadap parameter 4 (a) Kelurahan Tunggulwulung; (b) Desa Tegalgondo

Parameter 4 adalah akses masyarakat terhadap sarana, tetapi antara 2 wilayah pinggiran berbeda, yaitu sarana makam untuk Kelurahan Tunggulwulung dan sarana olahraga untuk Desa Tegalgondo. Toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung adalah dapat menerima dan sangat dapat menerima akses sarana makam dengan dominasi toleransi 3 atau dapat menerima sebanyak 66% masyarakat lokal, 50% pemilik lahan dan 75% petani. Sedangkan masyarakat pendatang 100% memiliki toleransi 3 terhadap akses sarana makam. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat wilayah pinggiran dapat menerima pemisahan sarana makam bagi masyarakat lokal dan pendatang. Masyarakat lokal dapat menerima pembatasan akses sarana makam khusus bagi masyarakat pendatang karena masyarakat lokal telah memiliki sarana makam umum. Demikian pula sebaliknya, masyarakat pendatang dapat menerima pembatasan akses terhadap makam umum karena pihak *developer* menyiapkan sarana makam bagi masyarakat pendatang. Jadi toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung terhadap akses sarana adalah toleransi tinggi.

Berbeda dengan Kelurahan Tunggulwulung, toleransi masyarakat Desa Tegalgondo terhadap parameter 4 adalah toleransi rendah. Hal tersebut disebabkan karena kondisi eksisting akses masyarakat terhadap sarana olahraga yang terdapat di dekat perumahan yang dibangun *developer* terbatas. Rendahnya toleransi masyarakat Desa Tegalgondo terhadap aksesibilitas sarana olahraga ditunjukkan oleh toleransi masyarakat yang didominasi toleransi 1 yang berarti tidak dapat menerima pembatasan akses tersebut, terutama 86% masyarakat lokal dan 100% petani. Sedangkan toleransi masyarakat pendatang lebih beragam tetapi didominasi oleh toleransi 3 yang berarti dapat menerima

pembatasan akses sarana yaitu sebanyak 50%. Masyarakat pendatang berpendapat bahwa pembatasan akses sarana olahraga perlu dilakukan untuk beberapa kegiatan skala besar seperti bersih desa karena kegiatan tersebut dapat mengganggu kenyamanan masyarakat pendatang yang tinggal di perumahan yang dibangun *developer*.

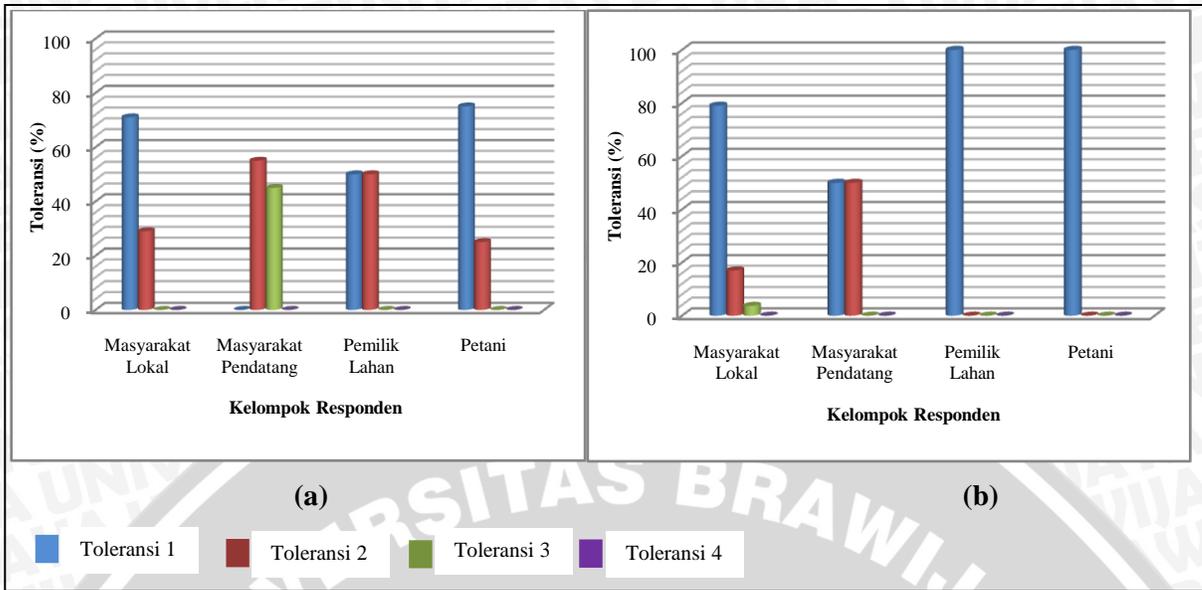
Toleransi masyarakat terhadap pembatasan akses sarana olahraga yang rendah sangat rentan terhadap konflik sosial. Melalui pengaturan kegiatan yang memanfaatkan sarana olahraga maupun sarana permukiman lainnya diharapkan dapat memberikan akses yang sama pada seluruh masyarakat tanpa mengganggu kenyamanan kelompok tertentu.



Gambar 4.24 Toleransi masyarakat terhadap parameter 5 (a) Kelurahan Tunggalwulung; (b) Desa Tegalondo

Toleransi masyarakat terhadap parameter 5 yaitu pelayanan air bersih cukup beragam, yaitu toleransi 1 sampai 3 (tidak dapat menerima-dapat menerima). Masyarakat lokal, pemilik lahan dan petani lebih banyak memiliki toleransi 2 yang berarti kurang dapat menerima pelayanan air bersih dimana masing-masing sebanyak 43%, 38% dan 75%. Sedangkan masyarakat pendatang 100% dapat menerima kondisi pelayanan air bersih.

Keragaman toleransi terhadap pelayanan air bersih juga terlihat dari masyarakat Desa Tegalondo dimana toleransi terdiri dari toleransi 1-3 dengan didominasi toleransi 3 masing-masing 44%, 60%, 17% dan 43% setiap kelompok masyarakat. Kondisi pelayanan air bersih dari PDAM yang hanya menjangkau 10% masyarakat lokal dan seluruh masyarakat pendatang lebih banyak dapat diterima masyarakat.

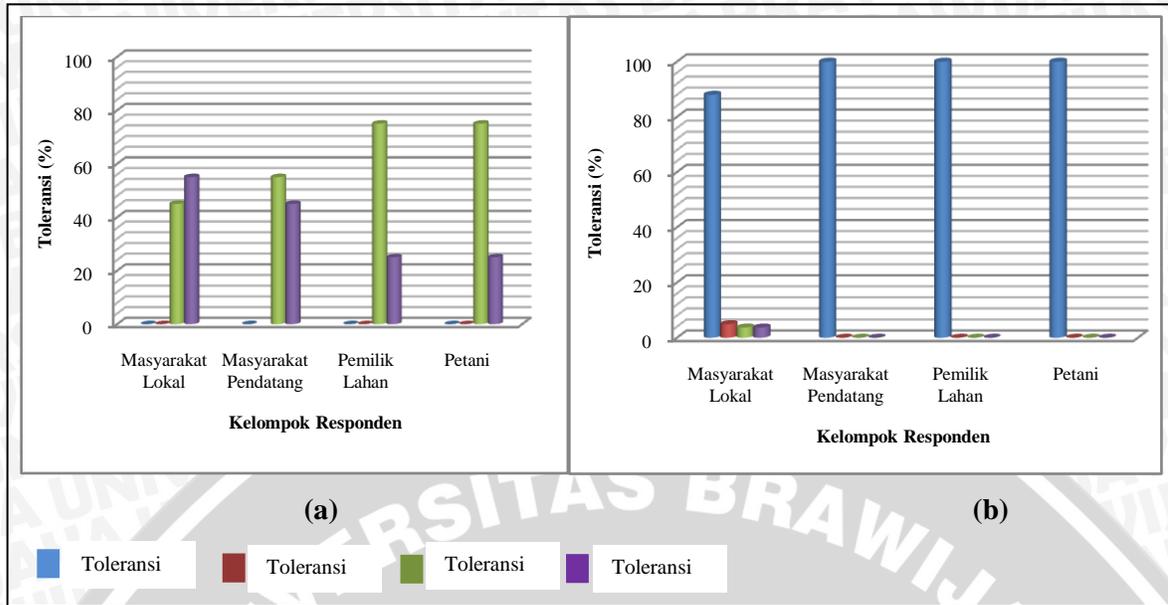


Gambar 4.25 Toleransi masyarakat terhadap parameter 6 (a) Kelurahan Tunggulwulung; (b) Desa Tegalgondo

Masyarakat lokal, pemilik lahan dan petani Kelurahan Tunggulwulung memiliki toleransi 1 dan 2 terhadap kondisi prasarana sanitasi dengan dominasi toleransi 1 (tidak dapat menerima). Sedangkan masyarakat pendatang memiliki toleransi 2 dan 3 masing-masing 55% dan 45%.

Toleransi masyarakat Desa Tegalgondo cenderung sama seperti toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung yang didominasi oleh toleransi 1, yaitu 79% masyarakat pendatang dan 100% pemilik lahan dan petani. Masyarakat lokal memiliki toleransi 2 dan 3 masing-masing 17% dan 3,7%. Sedangkan masyarakat pendatang memiliki toleransi 1 dan 2 masing-masing 50%.

Masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo memiliki toleransi rendah terhadap kondisi prasarana sanitasi di wilayah pinggiran. Rendahnya toleransi masyarakat tersebut disebabkan oleh kondisi eksisting prasarana sanitasi yang tidak memadai. Adanya masyarakat yang belum memiliki prasarana sanitasi menyebabkan masyarakat membuang limbah langsung ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu sehingga memperburuk kondisi lingkungan. Seharusnya limbah rumah tangga baik yang dihasilkan oleh masyarakat lokal, petani, pemilik lahan maupun masyarakat pendatang diolah terlebih dahulu melalui prasarana sanitasi seperti *septic tank* maupun IPAL sebelum dibuang ke lingkungan. Penyediaan prasarana sanitasi tersebut dapat dilakukan secara swadaya individu atau komunal oleh masyarakat maupun *developer*.

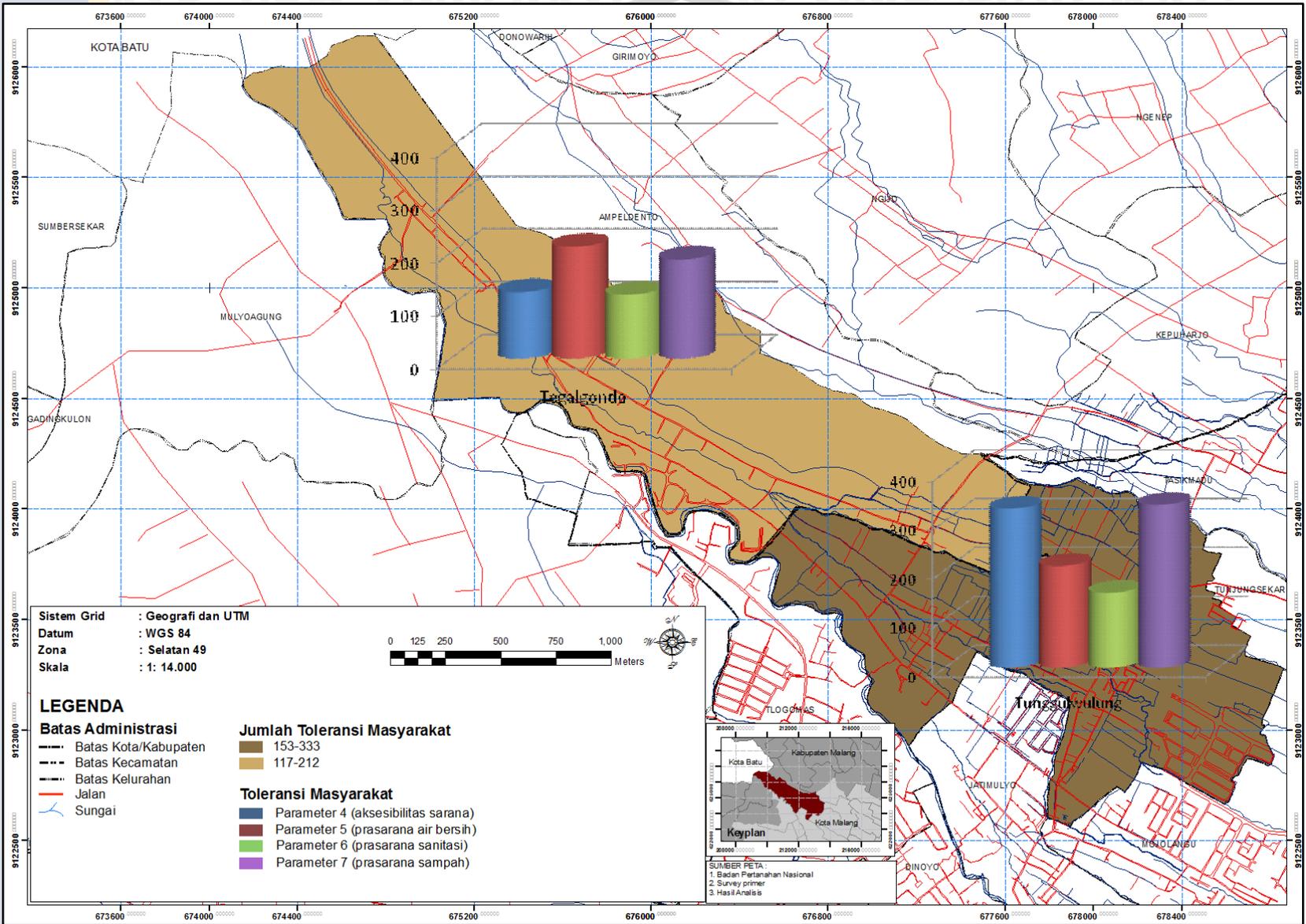


Gambar 4.26 Toleransi masyarakat terhadap parameter 7 (a) Kelurahan Tunggulwulung; (b) Desa Tegalgondo

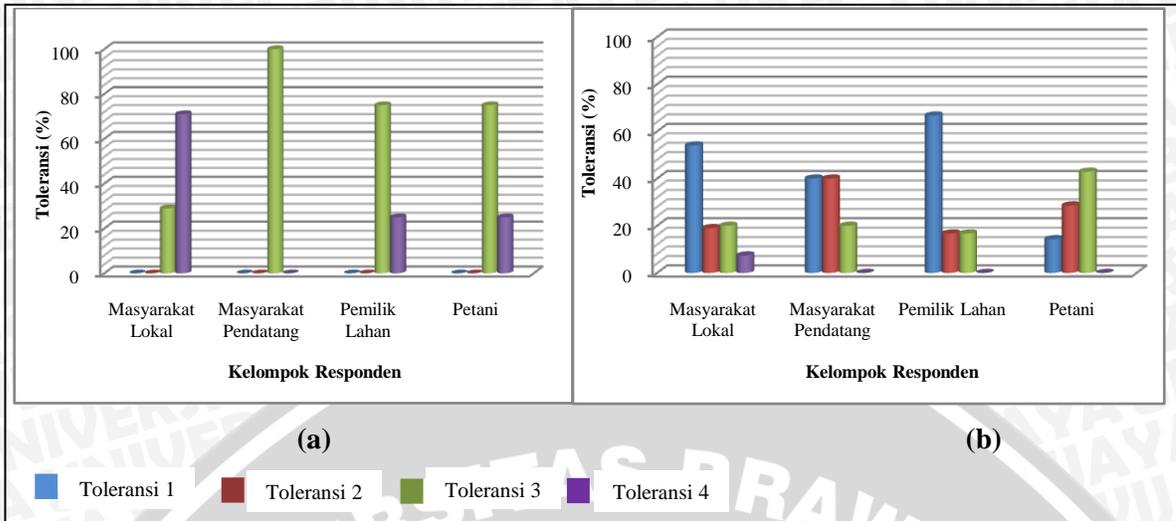
Toleransi masyarakat lokal, pemilik lahan dan petani terhadap kondisi eksisting pelayanan sampah melalui penilaian terdiri dari toleransi 3 yang berarti dapat menerima dan 4 yang berarti sangat dapat menerima dengan dominasi toleransi 3. Sedangkan masyarakat pendatang lebih banyak dapat menerima kondisi prasarana sampah yaitu sebanyak 55%. Toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung terhadap kondisi prasarana sampah tergolong toleransi tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dapat menerima kondisi pelayanan sampah karena telah menjangkau seluruh masyarakat.

Kondisi sebaliknya terjadi di Desa Tegalgondo, dengan adanya masyarakat lokal yang masih belum terlayani petugas kebersihan menyebabkan masyarakat mengolah sampah dengan langsung dibuang di sungai maupun dibakar. Sebaliknya masyarakat pendatang telah terlayani petugas kebersihan, walaupun demikian adanya masyarakat lokal yang belum terlayani petugas kebersihan tidak dapat diterima oleh seluruh masyarakat pendatang. demikian pula dengan masyarakat lokal, pemilik lahan dan petani yang masing-masing memiliki toleransi 1 terhadap parameter 7 tersebut sebanyak 88%, 100% dan 100%.

Toleransi masyarakat Desa Tegalgondo terhadap kondisi prasarana sampah tergolong toleransi rendah. Masyarakat membutuhkan prasarana sampah sehingga diperlukan penyediaan prasarana sampah seperti tempat sampah atau tempat pengelolaan sampah sekaligus pemerataan pelayanan petugas kebersihan.



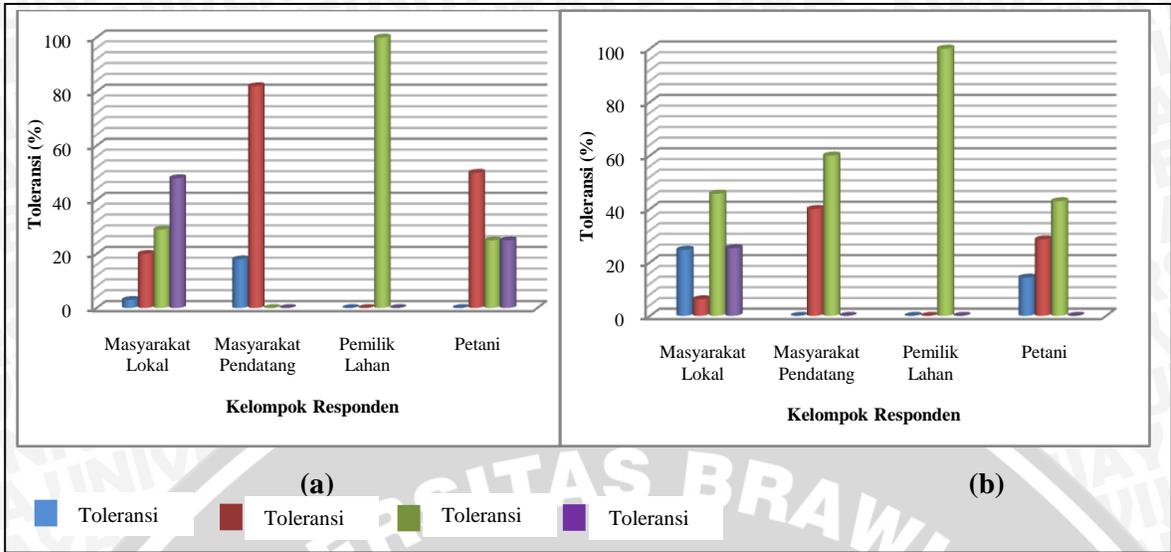
Gambar 4.27 Peta toleransi masyarakat terhadap kondisi sarana dan prasarana



Gambar 4.28 Toleransi masyarakat terhadap parameter 8 (a) Kelurahan Tunggulwulung; (b) Desa Tegalgondo

Toleransi masyarakat lokal Kelurahan Tunggulwulung terhadap tingkat perpindahan penduduk masuk didominasi oleh toleransi 4 (sangat dapat menerima) sebanyak 71%. Pemilik lahan dan petani memiliki toleransi 3 dan 4 dengan toleransi terbanyak adalah 75% toleransi 3 yang berarti dapat menerima perpindahan penduduk. Sedangkan masyarakat pendatang 100% dapat menerima tingkat perpindahan penduduk.

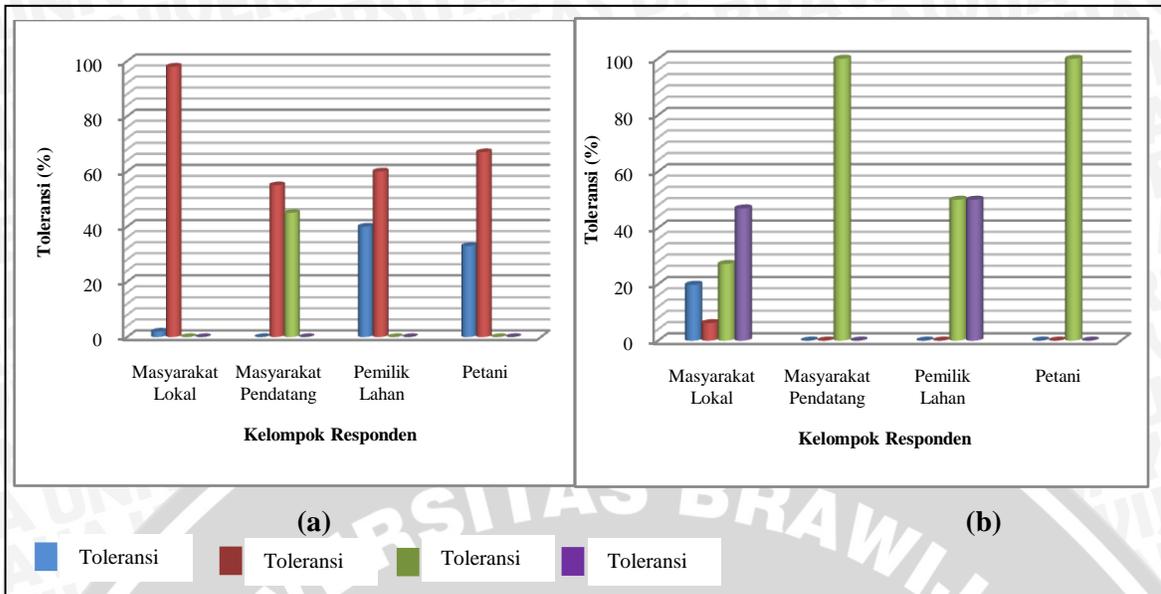
Toleransi masyarakat Desa Tegalgondo berkebalikan dengan toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung. Masyarakat Desa Tegalgondo memiliki toleransi yang beragam terhadap tingkat perpindahan penduduk masuk, yaitu toleransi 1-4. Toleransi masyarakat lokal didominasi oleh toleransi 1 yang berarti tidak dapat menerima perpindahan penduduk masuk yaitu sebanyak 54% demikian pula dengan masyarakat pendatang dan pemilik lahan masing-masing sebanyak 40% dan 66,7%. Sedangkan toleransi petani didominasi oleh toleransi 3 yang berarti dapat menerima perpindahan penduduk yaitu sebanyak 42,9%. Rendahnya toleransi masyarakat Desa Tegalgondo terhadap tingkat perpindahan penduduk masuk dipengaruhi oleh beberapa hal seperti meningkatnya kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan jika jumlah penduduk masuk terus bertambah.



Gambar 4.29 Toleransi masyarakat terhadap parameter 9 (a) Kelurahan Tunggulwulung; (b) Desa Tegalgondo

Masyarakat lokal Kelurahan Tunggulwulung memiliki toleransi yang sangat beragam terhadap laju pertumbuhan penduduk, yaitu mulai dari toleransi 1-4 dengan 48% toleransi 4 (sangat dapat menerima). Sedangkan masyarakat pendatang memiliki toleransi yang sangat berbeda dengan masyarakat lokal, pemilik lahan dan petani, yaitu 18% toleransi 1 dan 82% toleransi 2 (kurang dapat menerima). Toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung terhadap laju pertumbuhan penduduk tergolong toleransi sedang.

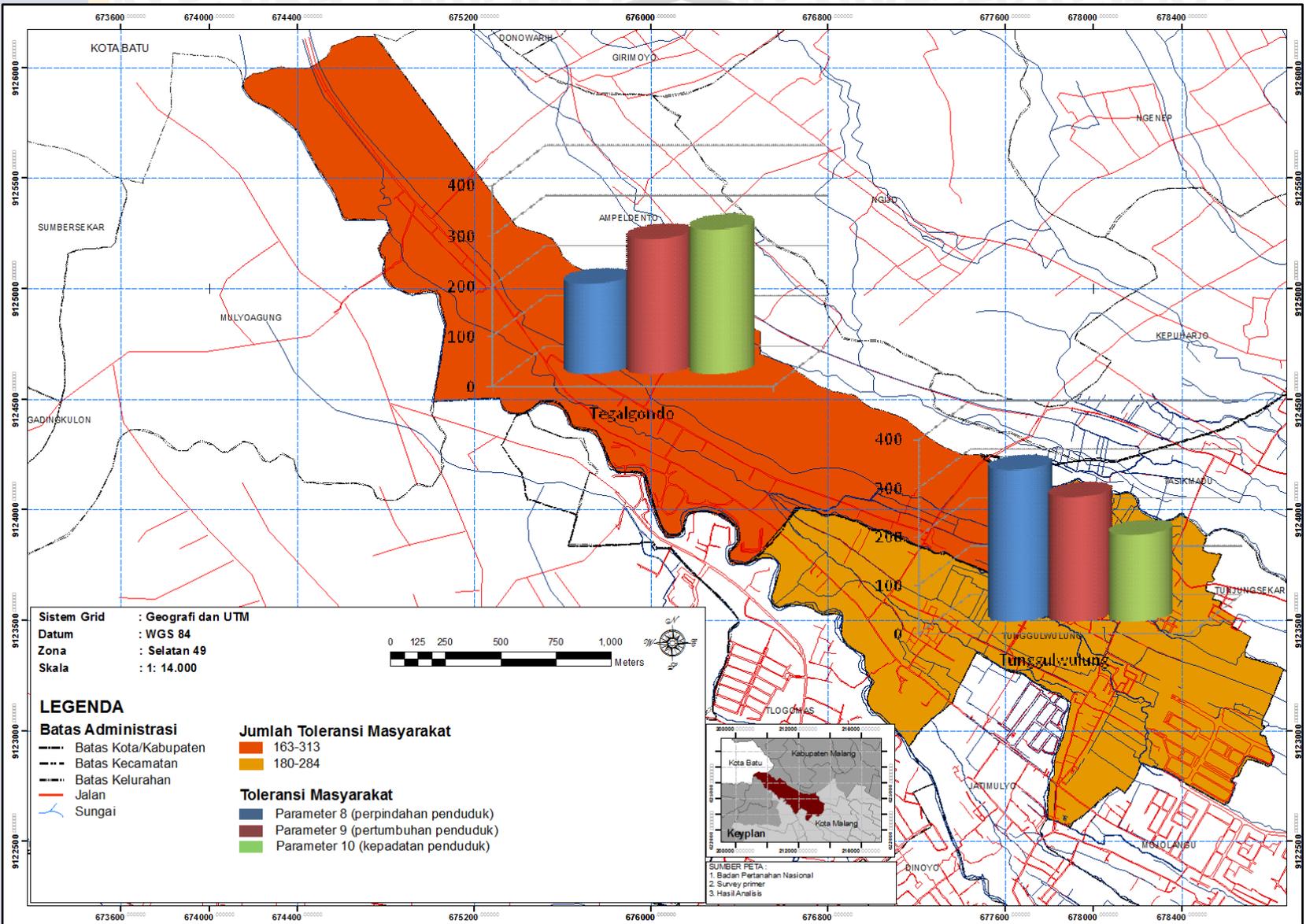
Toleransi masyarakat Desa Tegalgondo terhadap laju pertumbuhan penduduk didominasi oleh toleransi 3 yang berarti dapat menerima laju pertumbuhan penduduk. Pemilik lahan adalah kelompok masyarakat yang paling banyak dapat menerima parameter 9 tersebut yaitu sebanyak 100%. Sedangkan masyarakat lokal, pendatang dan petani masing-masing memiliki toleransi 3 sebanyak 45,7%, 60% dan 42,9%. Jadi masyarakat Desa Tegalgondo memiliki toleransi tinggi terhadap laju pertumbuhan penduduk.



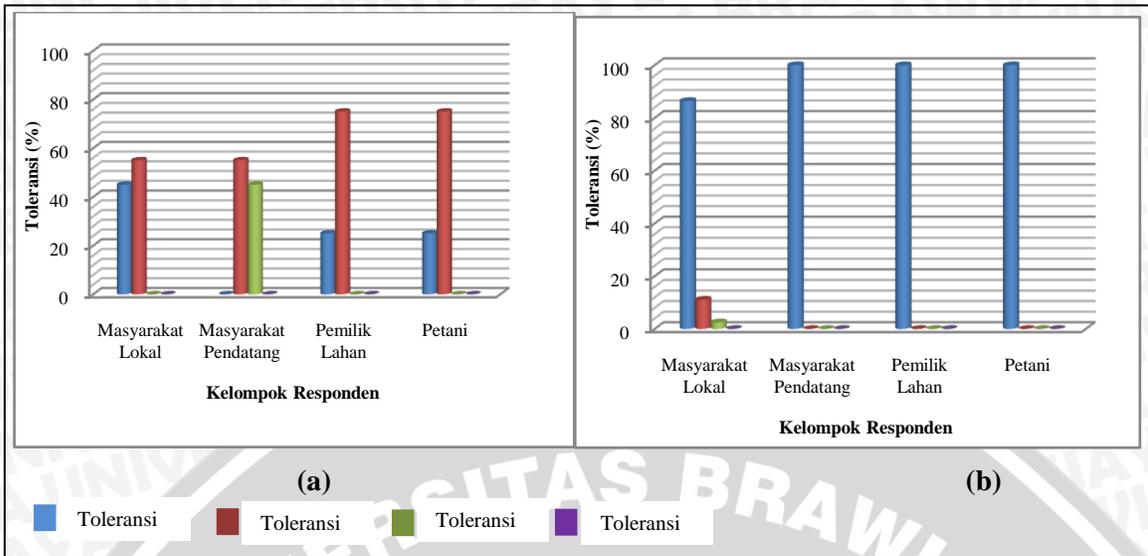
Gambar 4.30 Toleransi masyarakat terhadap parameter 10 (a) Kelurahan Tunggulwulung; (b) Desa Tegalgondo

Parameter 10 adalah kepadatan penduduk yang tergolong kepadatan sedang. Toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung baik masyarakat lokal, pemilik lahan dan petani terhadap kepadatan penduduk didominasi toleransi 2 (kurang dapat menerima kepadatan penduduk). Sedangkan masyarakat pendatang memiliki toleransi 2 dan 3 dengan toleransi terbanyak adalah toleransi 2 sebesar 55%. Toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung yang rendah terhadap kepadatan penduduk dipengaruhi oleh banyaknya perumahan yang dibangun oleh *developer* yang akan meningkatkan kepadatan penduduk sehingga menganggap bahwa kepadatan penduduk eksisting untuk saat ini sudah tidak boleh meningkat lagi.

Berbeda dengan toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung, masyarakat Desa Tegalgondo cenderung masih dapat menerima kepadatan penduduk wilayah pinggiran terutama karena luasnya lahan terbuka di Desa Tegalgondo. Masyarakat lokal lebih banyak dapat menerima kepadatan penduduk eksisting dan memiliki toleransi 4 yaitu sebanyak 46,9%. Sedangkan masyarakat pendatang dan petani seluruhnya memiliki toleransi 3 yang berarti dapat menerima kepadatan penduduk Desa Tegalgondo.



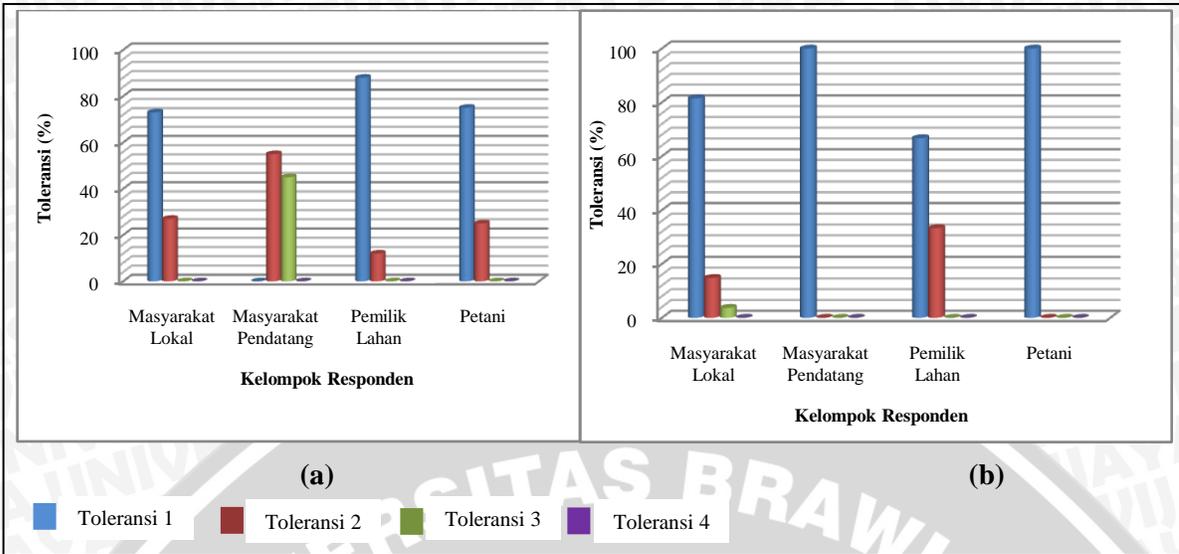
Gambar 4.31 Peta toleransi masyarakat terhadap kondisi sosial



Gambar 4.32 Toleransi masyarakat terhadap parameter 11 (a) Kelurahan Tunggulwulung; (b) Desa Tegalgondo

Banyaknya jumlah petani yang kehilangan pekerjaan sebagai petani akibat berkurangnya lahan sawah tidak dapat diterima oleh masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan oleh toleransi terhadap parameter 11 yang tergolong toleransi rendah. Masyarakat Kelurahan Tunggulwulung terutama masyarakat lokal, pemilik lahan dan petani memiliki toleransi 1 dan 2 dengan dominasi toleransi 2 yang berarti kurang dapat menerima parameter 11. Sedangkan masyarakat pendatang lebih didominasi toleransi 2 sebesar 55%.

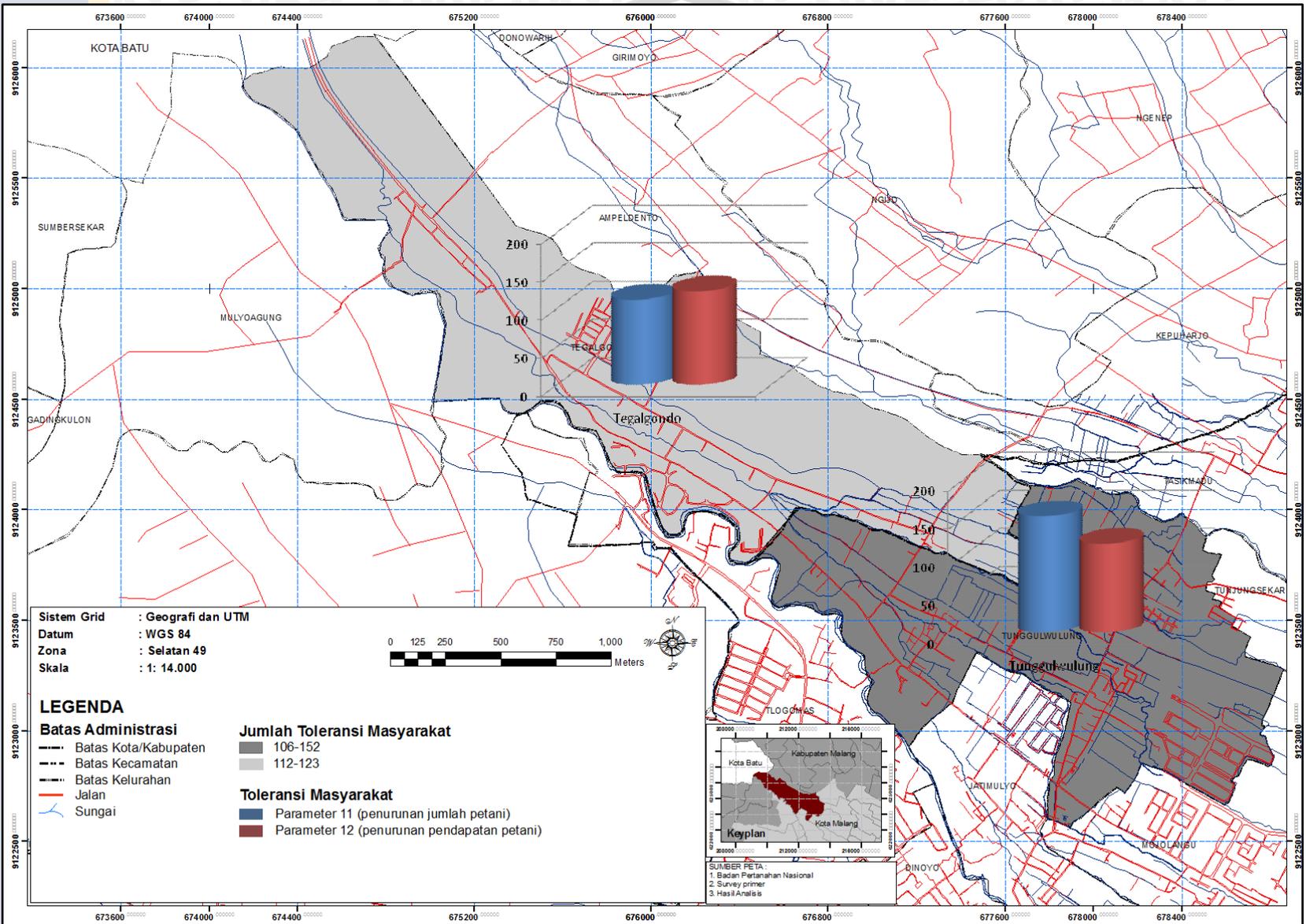
Masyarakat Desa Tegalgondo juga tidak dapat menerima jumlah petani yang kehilangan pekerjaan sebagai petani akibat berkurangnya lahan sawah yang ditunjukkan oleh toleransi masyarakat yang didominasi toleransi 1 (tidak dapat menerima) dimana seluruh masyarakat pendatang, pemilik lahan, petani dan 86,4% masyarakat lokal memiliki toleransi 1 yang berarti tidak dapat menerima penurunan jumlah petani. Jadi toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo tergolong toleransi rendah. Banyaknya jumlah petani yang kehilangan pekerjaan sebagai petani akibat berkurangnya lahan sawah memerlukan alternatif solusi. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah pembatasan konversi lahan sawah dan penyediaan lapangan kerja bagi petani.



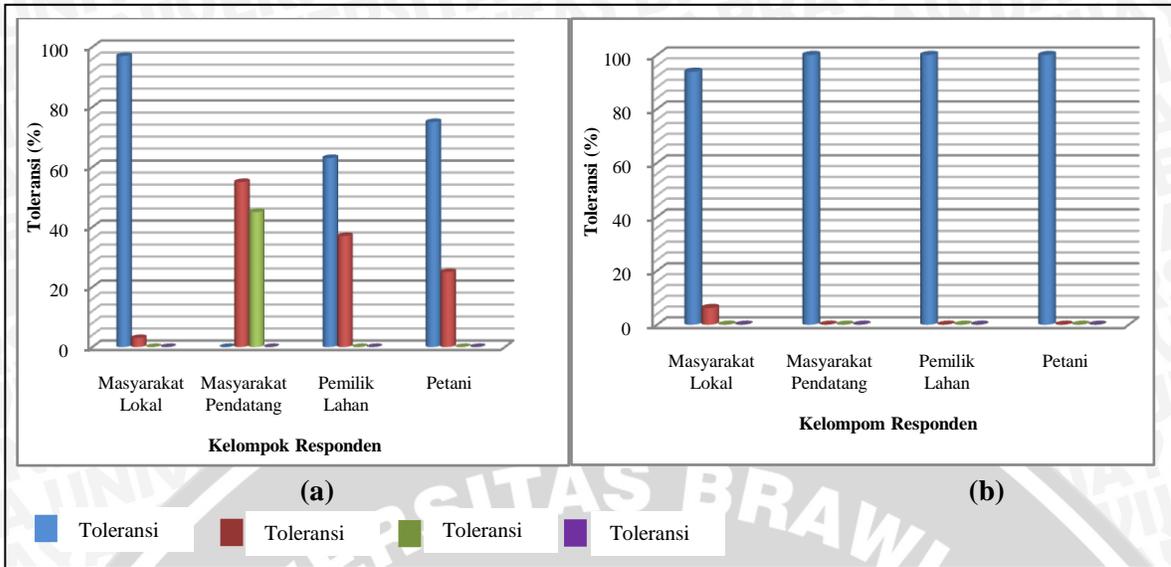
Gambar 4.33 Toleransi masyarakat terhadap parameter 12 (a) Kelurahan Tunggulwulung; (b) Desa Tegalgondo

Toleransi masyarakat terhadap parameter 12 yaitu penurunan pendapatan petani didominasi oleh toleransi 1 yang berarti tidak dapat menerima penurunan pendapatan petani baik di Kelurahan Tunggulwulung maupun di Desa Tegalgondo. Toleransi masyarakat lokal, pemilik lahan dan petani terdiri dari toleransi 1 dan 2 dimana toleransi terbanyak adalah toleransi 1 masing-masing sebanyak 73%, 88% dan 75%. Sedangkan masyarakat pendatang memiliki toleransi 2 dan 3 dengan toleransi terbanyak adalah toleransi 2 sebesar 55%.

Seluruh masyarakat pendatang dan petani di Desa Tegalgondo tidak dapat menerima penurunan pendapatan petani atau memiliki toleransi 1. Sedangkan masyarakat lokal dan pemilik lahan masing-masing memiliki toleransi 1 sebanyak 81,5% dan 66,7%.



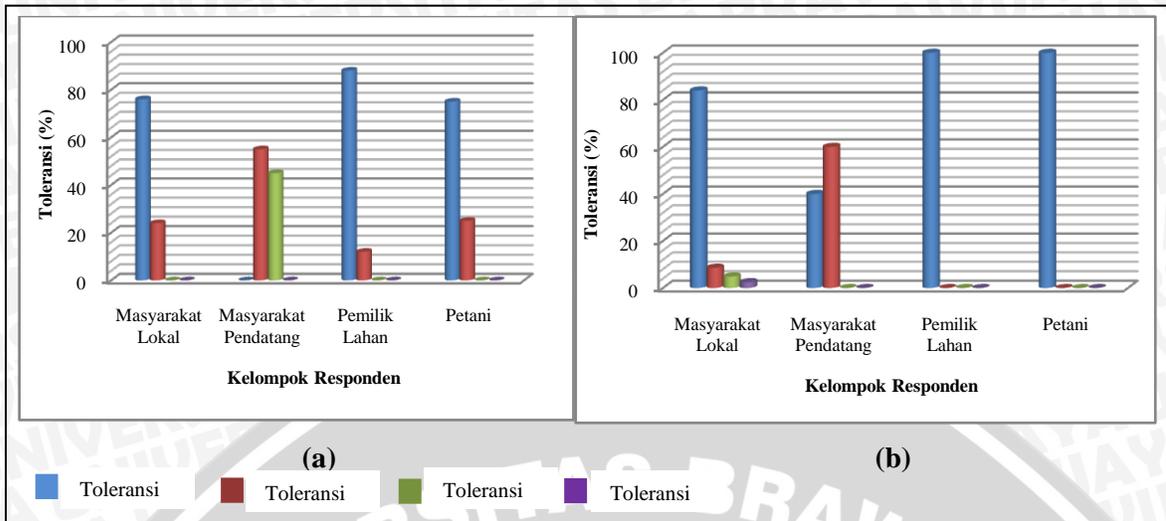
Gambar 4.34 Peta toleransi masyarakat terhadap kondisi ekonomi



Gambar 4.35 Toleransi masyarakat terhadap parameter 13 (a) Kelurahan Tunggulwulung; (b) Desa Tegalgondo

Konflik sosial yang terjadi di wilayah pinggiran terkait rencana pembangunan perumahan oleh *developer* cenderung tidak dapat diterima masyarakat. Toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung terhadap konflik tersebut didominasi oleh toleransi 1 baik masyarakat lokal, pemilik lahan maupun petani yang berarti tidak dapat menerima konflik tersebut. Sedangkan masyarakat pendatang masih memiliki toleransi 3 yang berarti dapat menerima konflik yaitu sebanyak 45%. Jadi masyarakat pendatang adalah masyarakat yang masih dapat menerima konflik sosial wilayah pinggiran.

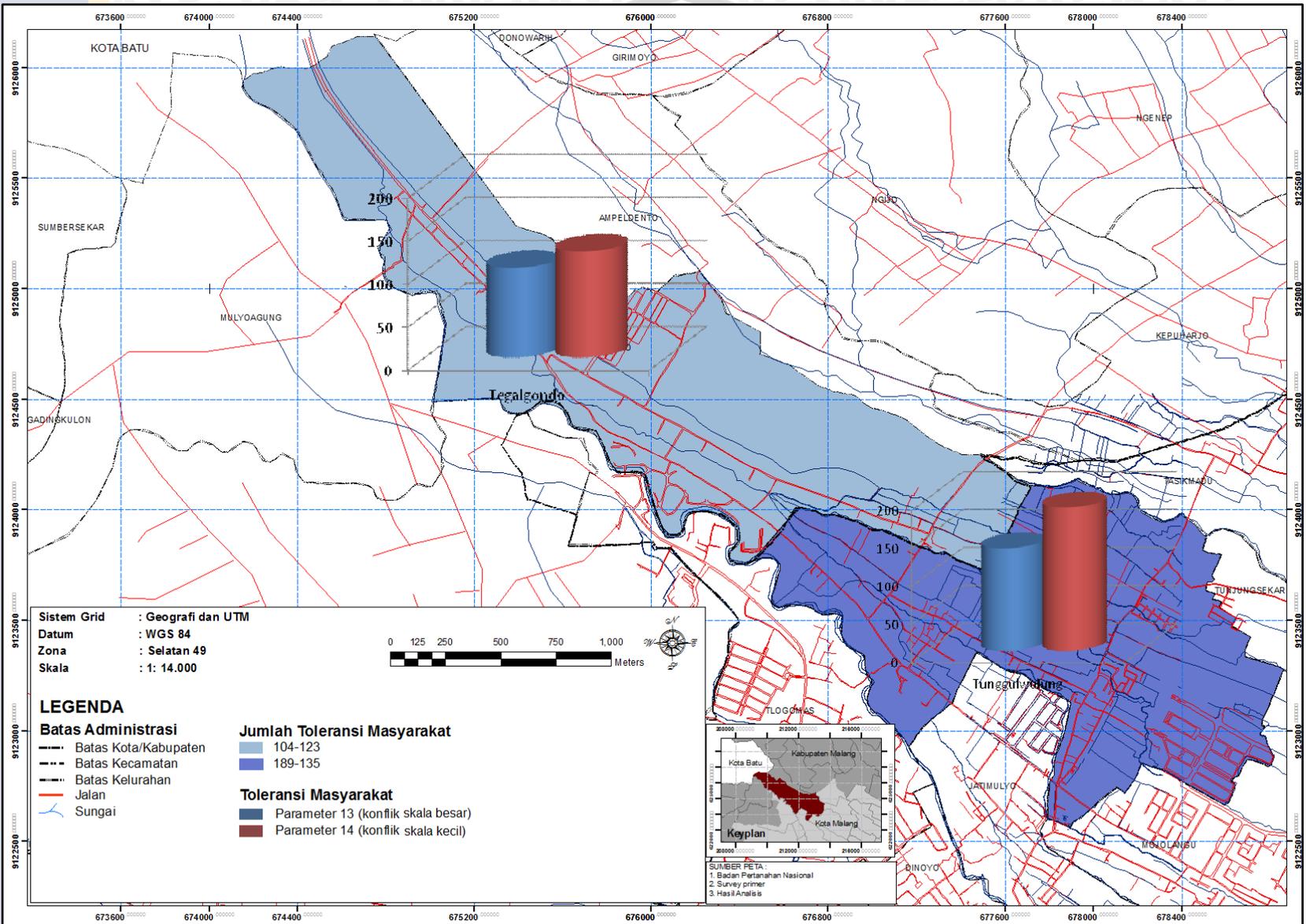
Parameter 13 yang merupakan konflik sosial adalah parameter yang paling tidak dapat diterima oleh masyarakat Desa Tegalgondo. Sebanyak 93,8% masyarakat lokal, seluruh masyarakat pendatang, pemilik lahan dan petani memiliki toleransi 1 terhadap konflik sosial antara masyarakat dan *developer* yang berarti tidak dapat menerima adanya konflik tersebut. Hal tersebut disebabkan karena adanya konflik sosial dapat menimbulkan suasana lingkungan sosial yang tidak nyaman bagi masyarakat. Jadi toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo terhadap konflik rencana pembangunan perumahan oleh *developer* tergolong toleransi rendah.



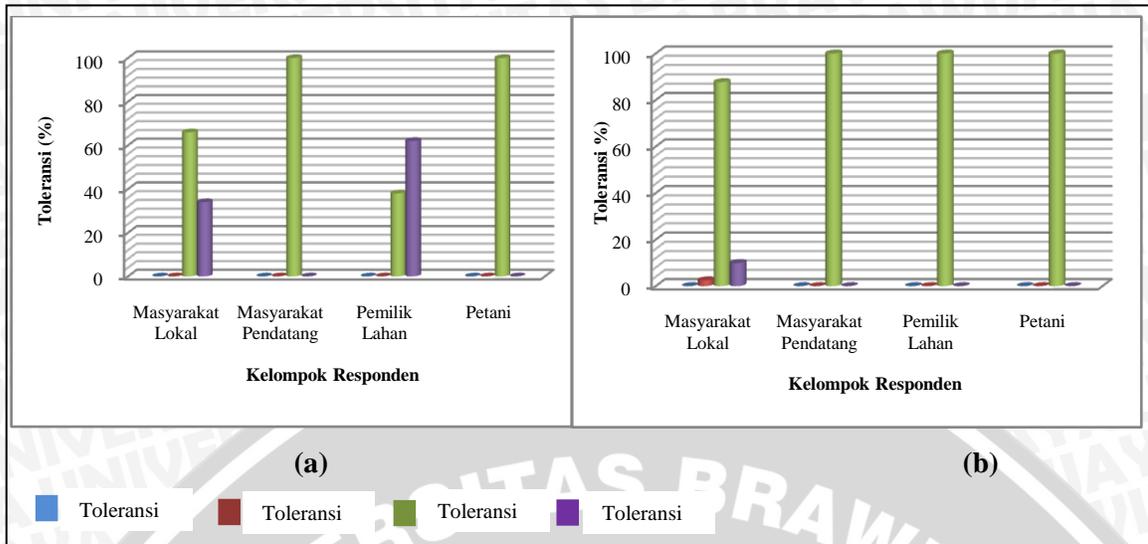
Gambar 4.36 Toleransi masyarakat kelurahan tunggulwulung terhadap parameter 14 (a) Kelurahan Tunggulwulung; (b) Desa Tegalgondo

Adanya konflik sosial skala kecil antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang dan antara petani dan *developer* merupakan parameter 14 untuk mengukur daya dukung sosial. Toleransi masyarakat lokal, pemilik lahan dan petani Kelurahan Tunggulwulung terdiri dari toleransi 1 yang berarti tidak dapat menerima dan toleransi 3 yang berarti dapat menerima adanya konflik tersebut dimana toleransi terbanyak adalah toleransi 1. Sedangkan masyarakat pendatang memiliki toleransi 2 dan 3 dengan toleransi terbanyak adalah toleransi 2 yang berarti kurang dapat menerima konflik yaitu sebesar 55%. Toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung terhadap konflik sosial sakala kecil tersebut tergolong toleransi rendah.

Toleransi yang sama juga ditunjukkan oleh masyarakat Desa Tegalgondo dimana toleransi masyarakat lokal, pemilik lahan dan petani terhadap adanya konflik skala kecil didominasi oleh toleransi 1 yang berarti tidak dapat menerima konflik tersebut dimana masing-masing sebanyak 84% dan 100%. Masyarakat pendatang memiliki toleransi 1 dan 2 sebanyak 40 % dan 60%. Jadi toleransi masyarakat Desa Tegalgondo terhadap konflik sosial skala kecil tergolong toleransi rendah. Hal tersebut disebabkan karena lingkungan sosial yang berkonflik menyebabkan masyarakat merasa tidak nyaman terutama dalam berinteraksi sehingga konflik tersebut harus segera diselesaikan melalui musyawarah bersama seluruh masyarakat agar dicapai penyelesaian yang diharapkan seluruh pihak.



Gambar 4.37 Peta toleransi masyarakat terhadap konflik sosial

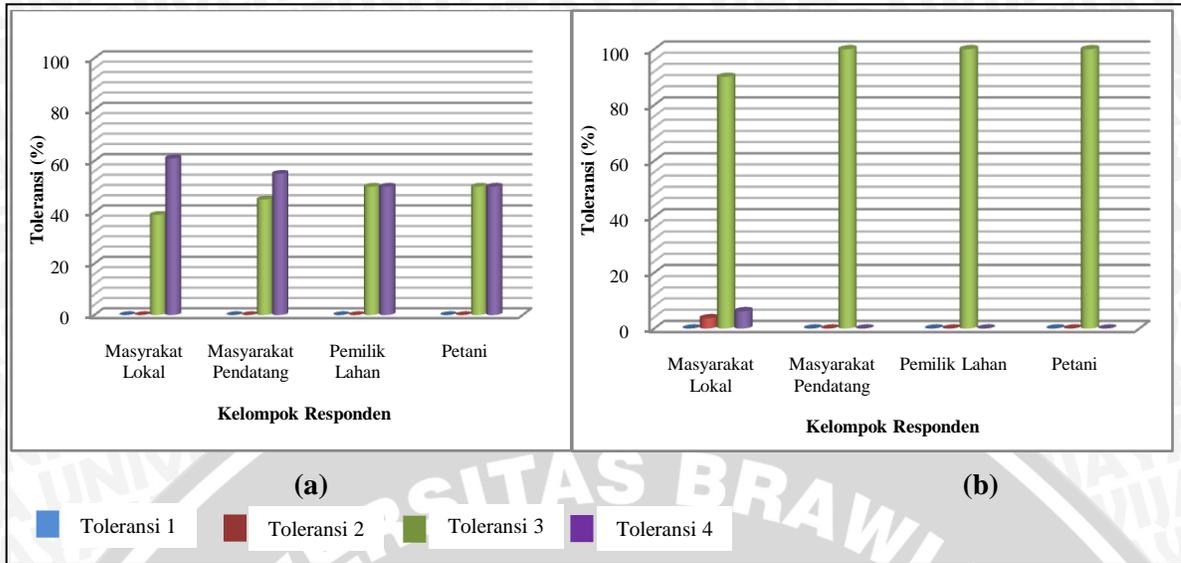


Gambar 4.38 Toleransi masyarakat terhadap parameter 15 (a) Kelurahan Tunggulwulung; (b) Desa Tegalgondo

Adanya masyarakat pendatang yang aktif mengikuti kegiatan kelembagaan desa dapat diterima dan mendapat respon yang positif dari masyarakat lokal, pemilik lahan dan petani. Hal tersebut ditunjukkan oleh toleransi masyarakat terhadap parameter 15 yaitu kelembagaan kemasyarakatan. Masyarakat Kelurahan Tunggulwulung memiliki toleransi yang cenderung sama terhadap kelembagaan kemasyarakatan. Masyarakat lokal dan pemilik lahan memiliki toleransi 3 yang berarti dapat menerima dan 4 yang berarti sangat dapat menerima kondisi kelembagaan. Sedangkan masyarakat pendatang dan petani 100% memiliki dapat menerima kondisi kelembagaan.

Demikian pula dengan masyarakat Desa Tegalgondo yang memiliki toleransi tinggi terhadap kondisi kelembagaan. Sebanyak 88,7% masyarakat lokal, seluruh masyarakat pendatang, pemilik lahan dan petani memiliki toleransi 3 yang berarti dapat menerima kondisi kelembagaan.

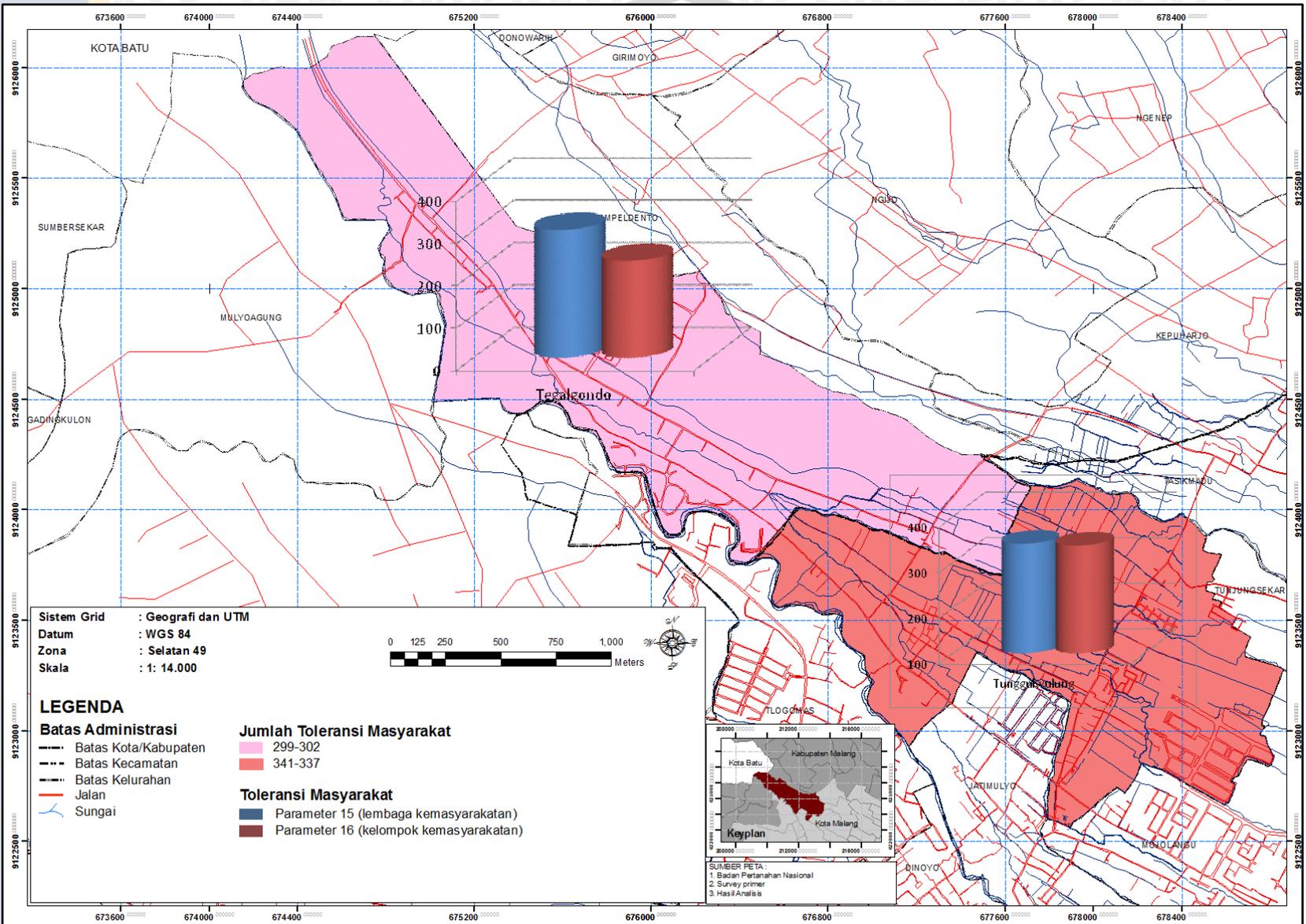
Tingginya toleransi masyarakat terhadap kondisi kelembagaan disebabkan oleh adanya masyarakat pendatang yang aktif mengikuti kelembagaan sehingga dapat mempererat hubungan antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang. Kondisi tersebut harus dipertahankan agar tercipta hubungan yang baik di dalam seluruh komponen sosial masyarakat wilayah pinggiran. Kondisi kelembagaan yang sangat positif tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah sosial terutama terkait konflik sosial dalam masyarakat wilayah pinggiran. Kelembagaan dapat menjadi wadah yang sesuai bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik.



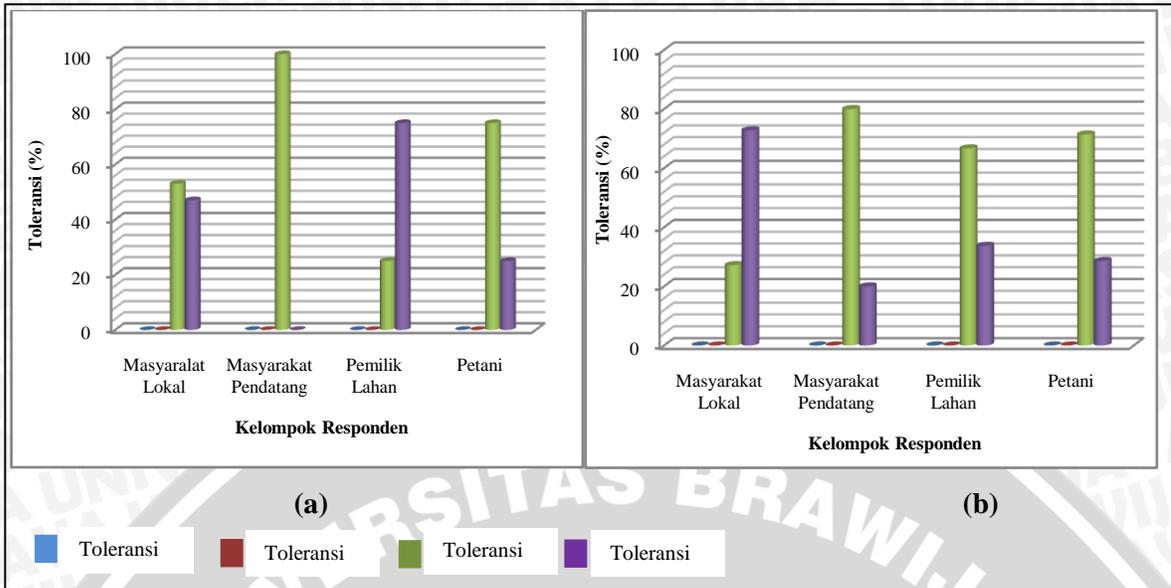
Gambar 4.39 Toleransi masyarakat terhadap parameter 16 (a) Kelurahan Tunggulwulung; (b) Desa Tegalondo

Toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung terhadap kondisi kelembagaan yang berupa kelompok masyarakat cenderung sama. Toleransi tersebut adalah toleransi 3 yang berarti dapat menerima dan 4 yang berarti sangat dapat menerima dengan dominasi toleransi 4 baik masyarakat lokal maupun pendatang, sedangkan pemilik lahan dan petani masing-masing memiliki 50% toleransi 3 dan 50% toleransi 4.

Toleransi masyarakat Desa Tegalondo lebih didominasi oleh toleransi 3. Sebanyak 90,1% masyarakat lokal dan seluruh masyarakat pendatang, pemilik lahan serta petani memiliki toleransi 3 terhadap parameter 16. Jadi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo memiliki toleransi yang tinggi terhadap parameter 16. Tingginya toleransi masyarakat disebabkan karena kelembagaan sosial yang berupa kelompok sosial di wilayah pinggiran telah diikuti oleh masyarakat pendatang dan dapat menjalankan fungsi dengan baik.

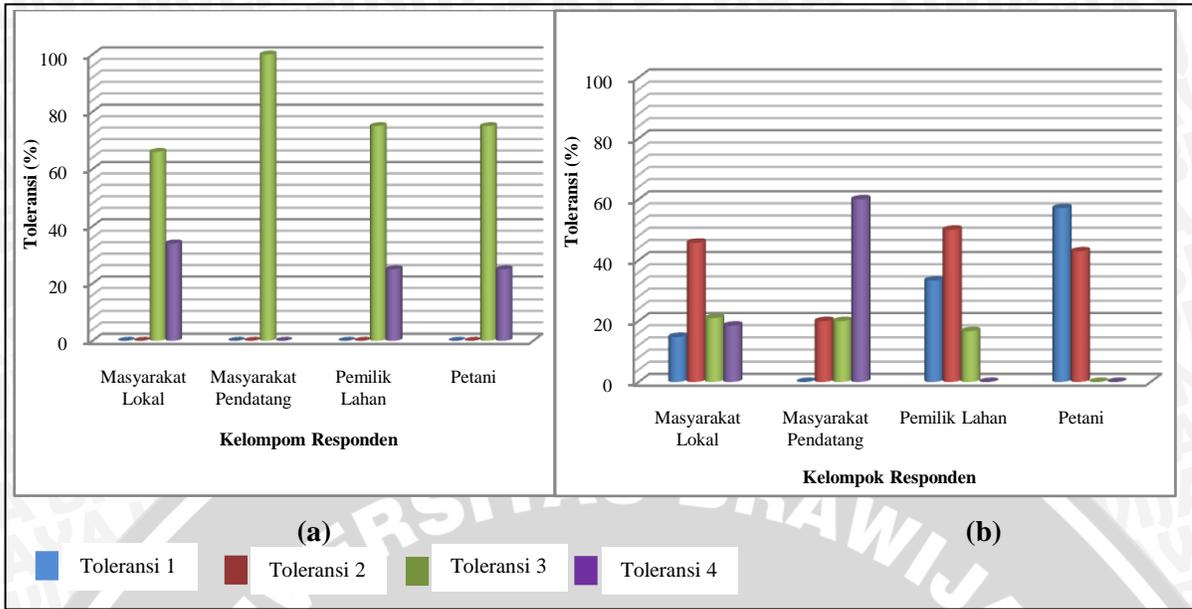


Gambar 4.40 Peta toleransi masyarakat terhadap kondisi kelembagaan



Gambar 4.41 Toleransi masyarakat terhadap parameter 17 (a) Kelurahan Tunggulwulung; (b) Desa Tegalondo

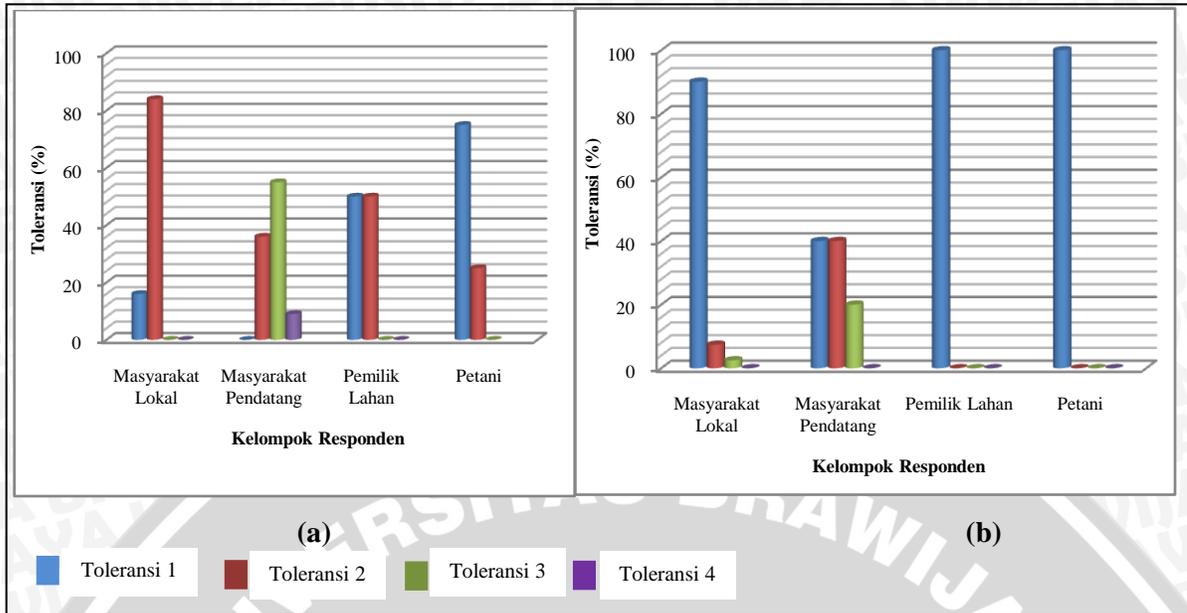
Adanya budaya keagamaan di wilayah pinggiran yang didikuti oleh masyarakat pendatang dapat diterima oleh masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan oleh banyaknya toleransi 3 yang berarti dapat menerima dan 4 yang berarti sangat dapat menerima adanya masyarakat pendatang yang mengikuti budaya keagamaan dan tidak adanya masyarakat yang tidak menerima budaya tersebut karena seluruh masyarakat mengikuti norma agama. Masyarakat Kelurahan Tunggulwulung sebanyak 53% masyarakat lokal, 100% masyarakat pendatang dan 75% petani memiliki toleransi 3 terhadap budaya keagamaan. Sedangkan 75% pemilik lahan memiliki toleransi 4. Demikian pula dengan masyarakat Desa Tegalondo yang memiliki toleransi 3 sebanyak 72% masyarakat lokal, 20% masyarakat pendatang, 33,7% pemilik lahan dan 28,6% petani. Tingginya toleransi masyarakat terhadap kondisi budaya keagamaan dipengaruhi oleh adanya budaya keagamaan yang dapat meningkatkan hubungan kekerabatan antar masyarakat lokal maupun pendatang.



Gambar 4.42 Toleransi masyarakat terhadap parameter 18 (a) Kelurahan Tunggulwulung; (b) Desa Tegalgondo

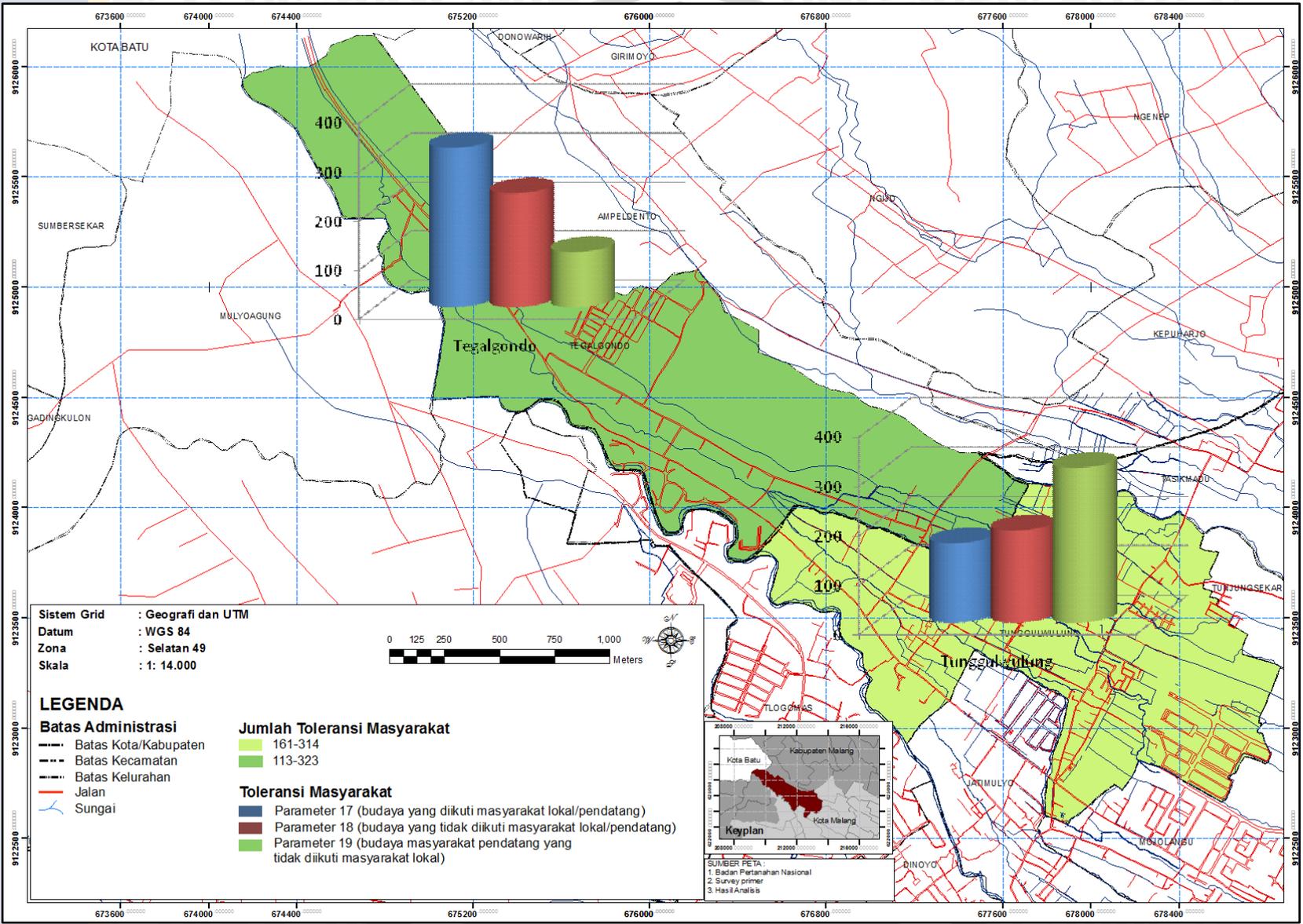
Toleransi masyarakat terhadap parameter 18 (budaya bersih desa) cenderung sama, yaitu toleransi 3 yang berarti dapat menerima dan 4 yang berarti sangat dapat menerima budaya bersih desa. Namun toleransi masyarakat lebih didominasi oleh toleransi 3 terutama pada masyarakat pendatang yang 100% memiliki toleransi 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Tunggulwulung memiliki toleransi yang tinggi dan dapat menerima kondisi budaya bersih desa.

Berbeda dengan budaya keagamaan yang cenderung dapat diterima oleh masyarakat, budaya bersih desa yang tidak diikuti oleh masyarakat pendatang dinilai beragam oleh masyarakat Desa Tegalgondo. Masyarakat lokal dan pemilik lahan lebih banyak memiliki toleransi 2 yang berarti kurang dapat menerima budaya bersih desa yang tidak diikuti seluruh masyarakat, masing-masing sebanyak 45,7% dan 50%. Sedangkan toleransi petani lebih didominasi oleh toleransi 1 yang berarti tidak dapat menerima kondisi tersebut yaitu sebanyak 57,1%. Masyarakat pendatang adalah kelompok masyarakat yang memiliki toleransi paling berbeda yaitu didominasi toleransi 4 yang berarti dapat menerima kondisi budaya bersih desa yaitu sebanyak 60%. Hal tersebut sangat berbeda dengan toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung, masyarakat Desa Tegalgondo memiliki toleransi yang lebih rendah terhadap parameter 18 daripada masyarakat Kelurahan Tunggulwulung.



Gambar 4.43 Toleransi masyarakat kelurahan tunggulwung terhadap parameter 19 (a) Kelurahan Tunggulwung; (b) Desa Tegalgondo

Toleransi masyarakat terhadap budaya masyarakat pendatang yang terbiasa beraktifitas hingga lebih dari jam 10 malam didominasi oleh toleransi 1 yang berarti tidak dapat menerima kondisi tersebut. Toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwung terhadap parameter 19 terdiri dari toleransi 1-4 dimana masyarakat pendatang memiliki toleransi 2, 3 dan 4 sebesar 36%, 55% dan 9%. Sedangkan kelompok masyarakat lainnya cenderung memiliki toleransi 1 dan 2. Demikian pula dengan masyarakat Desa Tegalgondo dimana seluruh pemilik lahan dan petani tidak dapat menerima budaya tersebut. Sedangkan masyarakat pendatang memiliki toleransi 1, 2 dan 3 sebanyak 40%, 40% dan 20% terhadap parameter 19. Masyarakat pendatang masih dapat menerima parameter 19 karena masyarakat pendatang lebih berorientasi pada rasionalitas dan profit yang mengharuskan masyarakat beraktifitas dalam waktu yang lama dan intensitas yang tinggi.



Gambar 4.44 Peta toleransi masyarakat terhadap adat budaya

Secara umum, terlihat bahwa terdapat nilai toleransi yang hampir sama untuk setiap kelompok masyarakat dan terdapat pula nilai toleransi yang sangat berbeda bahkan berkebalikan antar kelompok masyarakat. Toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung terhadap parameter kepadatan bangunan (parameter 3), sarana (parameter 4), perpindahan penduduk masuk (parameter 8), konflik sosial (parameter 13), kelembagaan (parameter 16) dan adat budaya (parameter 17 dan 18) cenderung sama. Parameter kepadatan bangunan, sarana, konflik sosial, kelembagaan dan adat budaya masih dapat diterima oleh masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dengan toleransi dapat menerima dan sangat dapat menerima (toleransi 3 dan 4). Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi eksisting dari setiap parameter yang tidak menimbulkan masalah di dalam kehidupan masyarakat seperti perpindahan penduduk masuk yang rendah, adanya sarana makam yang berbeda untuk masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang dan adanya kelembagaan yang diikuti oleh masyarakat. Sedangkan parameter konflik pembangunan perumahan oleh *developer* (parameter 13) sangat tidak dapat diterima masyarakat dengan toleransi tidak dapat menerima dan kurang dapat menerima (toleransi 1 dan 2). Masyarakat lokal, pendatang, pemilik lahan maupun petani memiliki toleransi yang sama terhadap parameter konflik pembangunan perumahan oleh *developer*. Hal tersebut disebabkan karena adanya konflik sosial menghambat pembangunan perumahan dan menciptakan suasana lingkungan yang tidak nyaman.

Parameter dengan toleransi yang sangat berbeda antar kelompok masyarakat adalah parameter kondisi pelayanan prasarana sanitasi (parameter 7), prasarana sampah (parameter 10), kepadatan penduduk (parameter 11), ketenagakerjaan (parameter 12), konflik pembatasan sarana (parameter 14) dan adat budaya masyarakat pendatang (parameter 19). Toleransi masyarakat terhadap parameter tersebut sangat berbeda terutama antara masyarakat pendatang dengan kelompok masyarakat lainnya. Sebanyak 45% masyarakat pendatang dapat menerima kondisi prasarana sanitasi yang terdapat di wilayah pinggiran. Hal tersebut disebabkan karena seluruh masyarakat pendatang telah memiliki prasarana sanitasi yang memadai sehingga lingkungan perumahan yang dibangun *developer* tidak terganggu oleh limbah rumah tangga.

Masyarakat Desa Tegalgondo juga memiliki toleransi yang cenderung sama atau berkebalikan untuk beberapa parameter daya dukung sosial. Toleransi masyarakat yang cenderung sama adalah toleransi terhadap kondisi prasarana sanitasi (parameter 6), pelayanan sampah (parameter 7), ketenagakerjaan (parameter 11), konflik pembangunan perumahan oleh *developer* (parameter 13), konflik pembatasan sarana dan perbedaan

budaya (parameter 14), kelembagaan (parameter 15 dan 16) dan budaya keagamaan. (parameter 17). Masyarakat memiliki toleransi 3-4 untuk parameter kelembagaan dan budaya keagamaan. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat dapat menerima adanya masyarakat pendatang yang mengikuti kelembagaan desa dan budaya keagamaan yang dapat meningkatkan keakraban hubungan sosial. Sedangkan toleransi masyarakat untuk parameter prasarana sanitasi, sampah, ketenagakerjaan dan konflik sosial adalah toleransi 1-2 yang berarti masyarakat tidak dapat menerima parameter tersebut.

Parameter dengan toleransi yang sangat berbeda atau berkebalikan antar kelompok masyarakat adalah parameter akses sarana dan budaya bersih desa dan upacara kematian. Masyarakat lokal, pemilik lahan dan petani memiliki toleransi 1-2 terhadap kondisi akses sarana, sedangkan masyarakat pendatang memiliki toleransi yang didominasi oleh toleransi 3. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lokal tidak dapat menerima pembatasan akses sarana olahraga yang dilakukan oleh masyarakat pendatang. Namun masyarakat pendatang dapat menerima pembatasan akses tersebut karena dianggap dapat mengganggu kenyamanan masyarakat pendatang.

Selain kondisi akses sarana, toleransi masyarakat yang berbeda dan berkebalikan adalah toleransi terhadap budaya bersih desa. Adanya budaya bersih desa di wilayah pinggiran yang tidak diikuti oleh masyarakat pendatang kurang dapat diterima oleh masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat lokal, pemilik lahan dan petani yang memiliki toleransi 2 terhadap parameter budaya bersih desa. Sedangkan masyarakat pendatang memiliki toleransi 4 terhadap yang berarti bahwa masyarakat dapat menerima kondisi eksisting tersebut. Masyarakat pendatang memiliki orientasi tidakan yang didasarkan pada rasio sehingga tidak mengikuti adat budaya yang dianggap diluar rasio manusia.

Secara umum toleransi masyarakat wilayah pinggiran cenderung sama terutama masyarakat lokal dan petani, sedangkan masyarakat pendatang memiliki toleransi yang cenderung lebih berbeda dari kelompok masyarakat lainnya. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan perumahan oleh *developer* di wilayah pinggiran dianggap tidak memberikan pengaruh negatif bagi masyarakat pendatang sehingga masyarakat pendatang lebih cenderung memiliki toleransi 3 yang berarti dapat menerima pembangunan perumahan oleh *developer* di wilayah pinggiran.

Total jumlah toleransi masyarakat menjadi penentu kelas daya dukung sosial wilayah pinggiran. Daya dukung sosial dapat dihitung melalui sebaran frekuensi

toleransi masyarakat terhadap parameter daya dukung sosial. Berikut ini adalah analisis sebaran frekuensi toleransi masyarakat:

Tabel 4.11 Analisis Sebaran Frekuensi Toleransi Masyarakat Kelurahan Tunggulwulung

Kelas	Frekuensi	Frekuensi Relatif
1	562	0,30
2	496	0,26
3	545	0,29
4	278	0,15
Total	1881	1,00

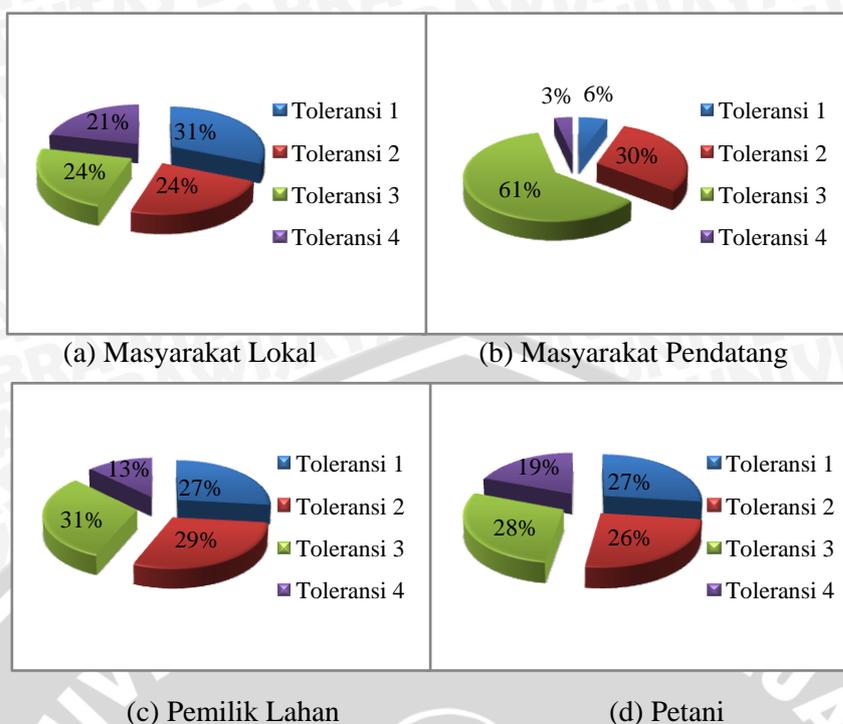
Berdasarkan perhitungan sebaran frekuensi toleransi, terlihat bahwa 56% masyarakat menolak kondisi eksisting wilayah pinggiran dan 44% menerima kondisi tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa daya dukung sosial Kelurahan Tunggulwulung adalah rendah dimana 56% masyarakat menolak kondisi eksisting wilayah pinggiran.

Perkembangan pembangunan perumahan oleh *developer* di Desa Tegalgondo tidak secepat dan sebanyak di Kelurahan Tunggulwulung. Dalam kurun waktu 10 tahun (2002-2012) hanya terdapat 1 blok perumahan yang dibangun *developer* dan ditempati masyarakat pendatang sejak tahun 2002 dan 1 blok perumahan yang direncanakan akan selesai dibangun tahun 2013. Sedikitnya pembangunan perumahan oleh *developer* di Desa Tegalgondo tidak berarti bahwa masyarakat dapat menerima dan mendukung pembangunan tersebut, sebaliknya masyarakat tidak setuju dengan pembangunan tersebut.

Tabel 4.12 Analisis Sebaran Frekuensi Toleransi Masyarakat Desa Tegalgondo

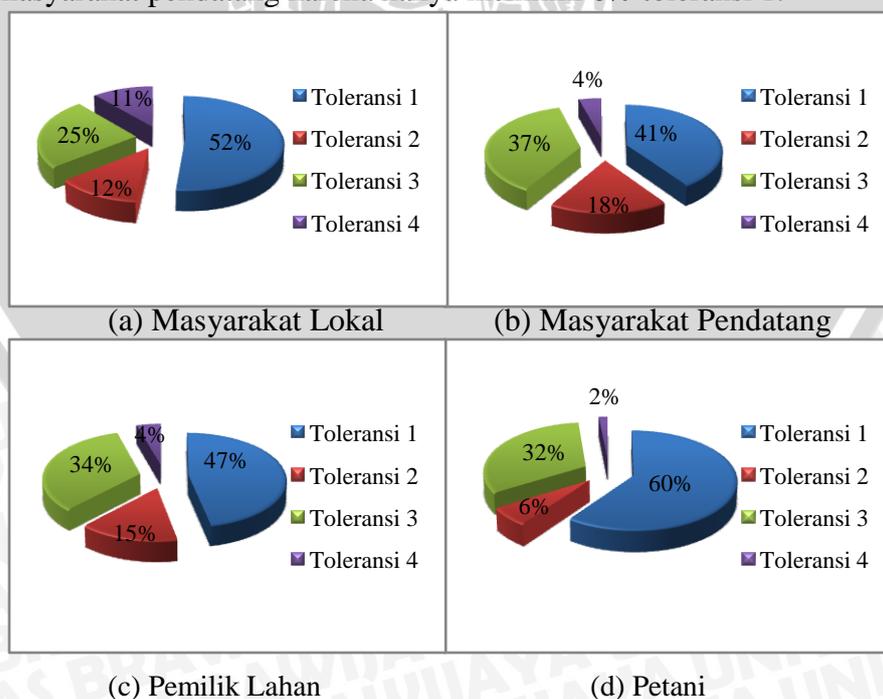
Kelas	Frekuensi	Frekuensi Relatif
1	958	0,51
2	235	0,12
3	555	0,30
4	133	0,07
Total	1881	1,00

Berdasarkan analisis sebaran frekuensi toleransi dapat disimpulkan bahwa daya dukung sosial Desa Tegalgondo tergolong daya dukung sosial rendah dimana 63% toleransi masyarakat terhadap parameter daya dukung sosial adalah menolak kondisi parameter daya dukung sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak tidak dapat menerima kondisi eksisting wilayah pinggiran.



Gambar 4.45 Persentase toleransi masyarakat kelurahan tunggalwulung berdasarkan kelompok masyarakat

Nilai toleransi 1 paling banyak berasal dari masyarakat lokal karena toleransi masyarakat lokal terhadap parameter daya dukung sosial didominasi oleh toleransi 1 (sebanyak 31%). Hal tersebut menunjukkan masyarakat lokal memiliki toleransi yang lebih rendah terhadap kondisi eksisting Kelurahan Tunggalwulung dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Kelompok masyarakat yang memiliki toleransi paling tinggi adalah masyarakat pendatang karena hanya memiliki 6% toleransi 1.



Gambar 4.46 Persentase toleransi masyarakat desa tegalgondo berdasarkan kelompok masyarakat

Berbeda dengan toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung yang memiliki toleransi 1 paling banyak dari masyarakat lokal, masyarakat Desa Tegalondo yang memiliki toleransi 1 paling banyak adalah petani, yaitu sebanyak 60%. Namun sama seperti Kelurahan Tunggulwulung, kelompok masyarakat yang memiliki toleransi tinggi (toleransi 1 paling sedikit) adalah masyarakat pendatang, yaitu sebanyak 41%.

4.3 Perbedaan Daya Dukung Sosial Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo

Berdasarkan hasil analisis daya dukung sosial diketahui bahwa daya dukung sosial Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo adalah rendah. Rendahnya daya dukung sosial di kedua wilayah tersebut dipengaruhi oleh rendahnya toleransi masyarakat terhadap parameter daya dukung sosial yang berbeda-beda. Dengan demikian dilakukan analisis homogenitas untuk menguji perbedaan toleransi antara masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo. Berdasarkan analisis homogenitas diperoleh hasil berupa nilai signifikansi atau nilai p yang menunjukkan ada atau tidak perbedaan signifikan diantara kedua wilayah tersebut. Berikut ini adalah analisis perbedaan daya dukung sosial Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo berdasarkan toleransi masyarakat terhadap parameter daya dukung sosial:

Tabel 4.13 Perbedaan Daya Dukung Sosial Wilayah Pinggiran

Parameter Daya Dukung Sosial	Nilai Signifikansi (sig atau p-value)	Analisis
P1 (Luas lahan pertanian yang telah berubah menjadi perumahan yang dibangun <i>developer</i>)	0,406	 Nilai sig untuk parameter $1 > \alpha$ ($0,406 > 0,05$), hal tersebut menunjukkan bahwa nilai toleransi cenderung sama atau homogen antara masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo. Nilai toleransi kedua wilayah tersebut didominasi oleh toleransi 1. Jadi baik masyarakat Kelurahan Tunggulwulung maupun Desa Tegalondo tidak dapat menerima konversi lahan sawah menjadi perumahan yang dibangun <i>developer</i> dan memiliki toleransi yang rendah terhadap parameter 1 tersebut.
P2 (Luas lahan pertanian yang akan berubah menjadi perumahan yang dibangun <i>developer</i>)	0,84	Nilai signifikansi $> \alpha$ ($0,84 > 0,05$), berarti bahwa nilai variansi toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo cenderung sama atau homogen. Jadi masyarakat di kedua wilayah memiliki toleransi yang cenderung sama atau homogen untuk parameter 2. Toleransi masyarakat kedua wilayah tersebut didominasi oleh toleransi 3.
P3 (Kepadatan bangunan)	0,006	Nilai signifikansi $< \alpha$ ($0,006 < 0,05$) menunjukkan bahwa toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalondo terhadap parameter 3 tidak sama atau berbeda. Masyarakat Kelurahan Tunggulwulung memiliki toleransi 3 dan 4 terhadap parameter 3, sedangkan masyarakat Desa Tegalondo memiliki toleransi 2,3 dan 4. Perbedaan mendasar toleransi kedua wilayah tersebut disebabkan oleh toleransi masyarakat lokal, pemilik lahan dan petani. Toleransi kelompok masyarakat tersebut di Kelurahan Tunggulwulung terdiri

Parameter Daya Dukung Sosial	Nilai Signifikansi (sig atau p-value)	Analisis
P4 (sarana yang tidak dapat diakses masyarakat)	0,000	dari 50% toleransi 3 dan 50% toleransi 4, sedangkan di Desa Tegalgondo toleransi kelompok tersebut adalah 100% toleransi 3. Nilai signifikansi $<\alpha$ ($0,00<0,05$) menunjukkan bahwa toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo terhadap parameter 4 berbeda secara signifikan. Perbedaan tersebut terlihat dari nilai toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung yang terdiri dari toleransi 3 dan 4, sebaliknya toleransi masyarakat Desa Tegalgondo didominasi toleransi 1 dan 2. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan akses sarana kedua wilayah tersebut. Masyarakat lokal dan masyarakat pendatang masing-masing tidak dapat mengakses sarana makam khusus masyarakat perumahan yang dibangun <i>developer</i> dan makam umum masyarakat lokal. Namun kondisi tersebut tidak menimbulkan masalah karena kedua masyarakat telah memiliki sarana makam masing-masing. Berbeda dengan akses sarana masyarakat lokal Desa Tegalgondo terhadap sarana olahraga yang dibatasi oleh masyarakat pendatang ternyata tidak dapat diterima oleh masyarakat sehingga toleransi masyarakat Desa Tegalgondo terhadap parameter 4 rendah.
P5 (prasarana air bersih yang tidak dapat diakses masyarakat)	0,001	Nilai signifikansi $<\alpha$ ($0,001<0,05$), berarti bahwa terdapat perbedaan toleransi antara masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo terhadap parameter 5. Nilai toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung didominasi oleh toleransi 2, sedangkan nilai toleransi masyarakat Desa Tegalgondo didominasi oleh toleransi 3. Jadi toleransi masyarakat Desa Tegalgondo terhadap parameter 5 lebih tinggi daripada toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat lokal Desa Tegalgondo lebih memilih menggunakan sumur sebagai sumber air bersih yang dianggap lebih murah daripada PDAM.
P6 (prasarana sanitasi yang tidak dapat diakses masyarakat)	0,10	Nilai signifikansi $>\alpha$ ($0,10>0,05$) berarti bahwa nilai toleransi masyarakat di kedua wilayah memiliki toleransi yang cenderung sama untuk parameter 6 yang didominasi oleh toleransi 1. Jadi masyarakat di kedua wilayah lebih banyak tidak dapat menerima parameter 6.
P7 (Prasarana persampahan)	0,001	Nilai signifikansi $<\alpha$ ($0,001<0,05$) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan toleransi terhadap parameter 7 antara masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo. Perbedaan tersebut terlihat dari toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung yang lebih banyak dapat menerima parameter 7 (kondisi eksisting pelayanan sampah) karena seluruh masyarakat telah terlayani oleh petugas kebersihan sampah. Sebaliknya, masyarakat Desa Tegalgondo lebih banyak tidak dapat menerima parameter 7 karena adanya masyarakat lokal yang belum terlayani oleh petugas kebersihan sampah.
P8 (Rata-rata penduduk yang masuk/tahun)	0,000	Nilai signifikansi $<\alpha$ ($0,000<0,05$) menunjukkan bahwa toleransi terhadap parameter 8 antara masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo berbeda secara signifikan. Toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung didominasi oleh toleransi 3 dan 4, sedangkan masyarakat Desa Tegalgondo memiliki

Parameter Daya Dukung Sosial	Nilai Signifikansi (sig atau p-value)	Analisis
P9 (Laju pertumbuhan penduduk/tahun)	0,905	toleransi yang lebih beragam dengan dominasi toleransi 1. Nilai signifikansi $>\alpha$ ($0,905>0,05$) menunjukkan bahwa toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo cenderung sama. Toleransi masyarakat kedua wilayah sangat beragam tetapi didominasi oleh toleransi 3.
P10 (Kepadatan penduduk)	0,000	Nilai signifikansi $<\alpha$ ($0,000<0,05$) berarti bahwa toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung berbeda secara signifikan dengan toleransi masyarakat Desa Tegalgondo. Hal tersebut disebabkan oleh kepadatan penduduk Kelurahan Tunggulwulung yang lebih tinggi daripada kepadatan penduduk Desa Tegalgondo sehingga masyarakat Desa Tegalgondo lebih dapat menerima parameter 10. Jadi toleransi masyarakat Desa Tegalgondo lebih tinggi daripada toleransi masyarakat Tunggulwulung terhadap parameter 10.
P11 (Jumlah petani kehilangan pekerjaan karena berkurangnya lahan pertanian)	0,000	Nilai signifikansi $<\alpha$ ($0,000<0,05$) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo terhadap parameter 10. Perbedaan tersebut terlihat dari toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung yang didominasi oleh toleransi 2, sedangkan toleransi masyarakat Desa Tegalgondo didominasi oleh toleransi 1. Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa kedua wilayah memiliki toleransi yang berkebalikan. Pada dasarnya masyarakat kedua wilayah tersebut memiliki toleransi yang rendah terhadap parameter 10 tetapi toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung lebih tinggi daripada toleransi masyarakat Desa Tegalgondo.
P12 (Penurunan pendapatan petani)	0,29	Nilai signifikansi $>\alpha$ ($0,29>0,05$) berarti bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan toleransi masyarakat Desa Tegalgondo. Masyarakat di kedua wilayah tersebut memiliki lebih banyak memiliki toleransi 1 terhadap parameter 12 (penurunan pendapatan petani). Jadi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo tidak dapat menerima parameter 12.
P13 (Jenis, skala, penyebab dan pihak yang terlibat konflik pembangunan perumahan)	0,000	Nilai signifikansi $<\alpha$ ($0,000<0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan masyarakat Desa Tegalgondo terhadap parameter 13. Parameter 13 adalah konflik sosial yang terjadi di wilayah pinggiran terkait pembangunan perumahan oleh <i>developer</i> yang mengkonversi lahan sawah. Perbedaan toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan masyarakat Desa Tegalgondo terlihat dari dominasi toleransi masyarakat Desa Tegalgondo yang hampir 100% memiliki toleransi 1 atau tidak dapat menerima parameter 13, sedangkan masyarakat Kelurahan Tunggulwulung memiliki toleransi yang lebih beragam, terutama pada masyarakat pendatang yang memiliki toleransi 2 dan 3. Jadi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung memiliki toleransi yang lebih tinggi daripada masyarakat Desa Tegalgondo.
P14 (Jenis, skala, penyebab dan pihak)	2,51	Nilai signifikansi $>\alpha$ ($0,251>0,05$) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara toleransi

Parameter Daya Dukung Sosial	Nilai Signifikansi (sig atau p-value)	Analisis
yang terlibat konflik pembatasan sarana)		masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan toleransi masyarakat Desa Tegalgondo terhadap parameter 14. Masyarakat di kedua wilayah tersebut memiliki toleransi yang didominasi oleh toleransi 1 terhadap parameter 14. Jadi toleransi masyarakat di kedua wilayah tersebut cenderung sama, yaitu tidak dapat menerima.
P15 (Bentuk, fungsi dan keanggotaan kelembagaan kemasyarakatan)	0,000	Nilai signifikansi $<\alpha$ ($0,000 < 0,05$) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan toleransi yang signifikan antara masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan masyarakat Desa Tegalgondo terhadap parameter 15. Perbedaan tersebut terlihat dari adanya masyarakat Desa Tegalgondo yang memiliki toleransi 2 terhadap parameter 15, sedangkan masyarakat Kelurahan Tunggulwulung hanya memiliki toleransi 3 dan 4. Selain itu perbedaan juga terlihat dari pemiliki lahan di Kelurahan Tunggulwulung memiliki toleransi 3 dan 4, sedangkan pemilik lahan di Desa Tegalgondo seluruhnya memiliki toleransi 3 terhadap parameter 15. Namun perbedaan tersebut tidak berarti bahwa toleransi masyarakat kedua wilayah saling berkebalikan karena masyarakat di kedua wilayah dapat menerima parameter 15.
P16 (Bentuk, fungsi dan keanggotaan kelompok kemasyarakatan)	0,000	Nilai signifikansi $<\alpha$ ($0,000 < 0,05$) berarti bahwa terdapat perbedaan toleransi yang signifikan antara masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan masyarakat Desa Tegalgondo. Masyarakat Kelurahan Tunggulwulung cenderung memiliki toleransi 3 dan 4, sedangkan masyarakat Desa Tegalgondo lebih banyak memiliki toleransi 3. Namun perbedaan tersebut tidak berarti bahwa toleransi masyarakat kedua wilayah saling berkebalikan karena masyarakat di kedua wilayah dapat menerima parameter 16.
P17 (Budaya masyarakat yang diikuti masyarakat lokal/pendatang)	0,20	Nilai signifikansi $>\alpha$ ($0,20 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan toleransi yang signifikan antara masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo. Hal tersebut disebabkan karena baik di Kelurahan Tunggulwulung maupun di Desa Tegalgondo, budaya kagamaan telah diikuti oleh masyarakat pendatang. kondisi tersebut dapat diterima oleh masyarakat di kedua wilayah dengan toleransi 3 dan 4.
P18 (Budaya masyarakat yang tidak diikuti masyarakat lokal/pendatang)	0,000	Nilai signifikansi $<\alpha$ ($0,000 < 0,05$) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan toleransi yang signifikan antara masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan masyarakat Desa Tegalgondo. Perbedaan tersebut terlihat dari toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung yang cenderung dapat menerima (toleransi 3 dan 4), sebaliknya toleransi masyarakat Desa Tegalgondo lebih beragam dan didominasi oleh toleransi 2 yang berarti tidak dapat menerima.
P19 (Budaya masyarakat pendatang yang tidak diikuti masyarakat lokal)	0,000	Nilai signifikansi $<\alpha$ ($0,000 < 0,05$) berarti bahwa terdapat perbedaan signifikan antara toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo terhadap parameter 19. Toleransi masyarakat di kedua wilayah tersebut sangat beragam tetapi lebih didominasi oleh toleransi 1 dan 2. Toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung didominasi oleh toleransi 2 sedangkan toleransi masyarakat Desa Tegalgondo didominasi oleh

Parameter Daya Dukung Sosial	Nilai Signifikansi (sig atau p-value)	Analisis
		toleransi 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo tidak dapat menerima parameter 19.

Berdasarkan analisis uji homogenitas dapat disimpulkan bahwa terdapat toleransi yang berbeda antara Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo. Perbedaan toleransi masyarakat di kedua wilayah disebabkan oleh perbedaan kondisi eksisting. Perbedaan tersebut berupa perbedaan yang saling berkebalikan (tinggi dan rendah) dan tidak saling berkebalikan. Toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo yang berbeda tetapi tidak berkebalikan adalah toleransi terhadap kondisi kepadatan bangunan (parameter 3), jumlah penduduk yang kehilangan pekerjaan sebagai petani akibat berkurangnya lahan sawah (parameter 11), konflik pembangunan perumahan oleh *developer* (parameter 13), kelembagaan (parameter 15 dan 16) dan budaya masyarakat pendatang (parameter 19). Toleransi yang berbeda dan saling berkebalikan adalah toleransi terhadap kondisi sarana (parameter 4), pelayanan air bersih (parameter 5), pelayanan sampah (parameter 7), tingkat perpindahan penduduk (parameter 8), kepadatan penduduk (parameter 10) dan budaya masyarakat lokal yang tidak diikuti masyarakat pendatang (parameter 18). Toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo yang sama, yaitu toleransi terhadap kondisi penggunaan lahan sawah yang telah dan akan berubah menjadi perumahan yang dibangun *developer* (parameter 1 dan 2), kondisi prasarana sanitasi (parameter 6), laju pertumbuhan penduduk (parameter 9), penurunan pendapatan petani (parameter 12), konflik eksklusifitas (parameter 14) dan perbedaan budaya serta budaya masyarakat lokal yang diikuti masyarakat pendatang (parameter 17).

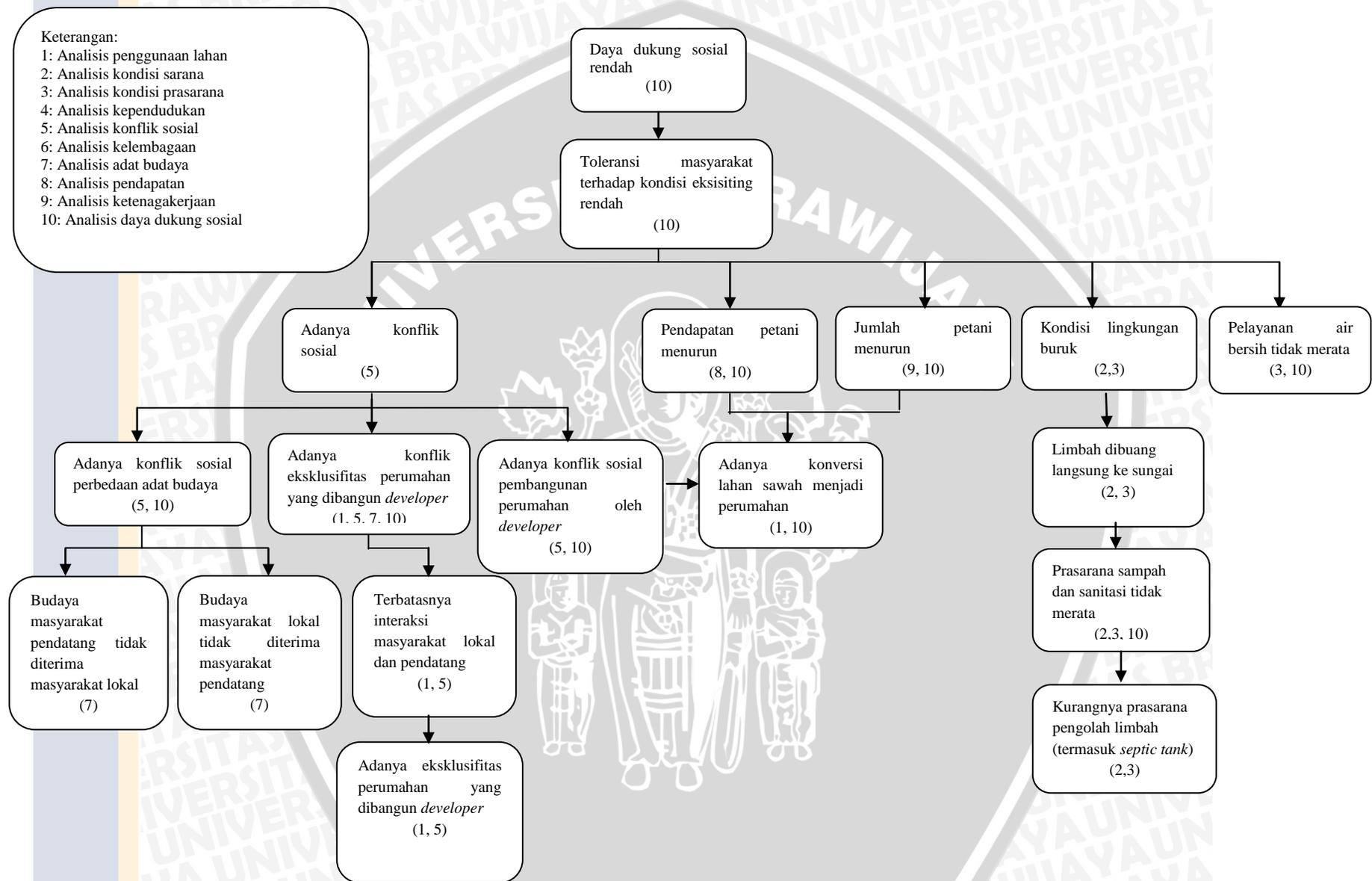
Perbedaan toleransi antara Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo terutama disebabkan oleh perbedaan kondisi sarana dan prasarana kedua wilayah. Perbedaan kondisi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun rekomendasi terkait daya dukung sosial wilayah pinggiran salah satunya adalah toleransi masyarakat Kelurahan Tunggulwulung terhadap kondisi sarana dan prasarana yang lebih tinggi daripada toleransi masyarakat Desa Tegalgondo. Hal tersebut disebabkan kondisi eksisting sarana dan prasarana Kelurahan Tunggulwulung telah merata dan melayani seluruh masyarakat. Kondisi sebaliknya terlihat di Desa Tegalgondo yang belum memiliki sarana dan prasarana yang merata sehingga rekomendasi yang dapat diberikan adalah melakukan penyediaan dan pemerataan prasarana serta pengaturan sarana yang tepat.

4.4 Analisis Akar Masalah dan Akar Tujuan

Berdasarkan analisis deskriptif kondisi eksisting wilayah pinggiran terlihat bahwa terdapat beberapa masalah yang ada di wilayah pinggiran. Melalui analisis akar masalah dapat diketahui hubungan di antara masalah-masalah yang terdapat di wilayah pinggiran.

Masalah utama terkait pembangunan perumahan oleh *developer* di wilayah pinggiran adalah adanya toleransi yang rendah terhadap parameter daya dukung sosial. Toleransi yang rendah akan berpotensi menimbulkan konflik sosial karena tidak diterima secara sosial oleh masyarakat. Masalah tersebut disebabkan oleh danya konflik sosial, penurunan pendapatan petani, penurunan jumlah petani, adanya konversi lahan sawah menjadi perumahan yang dibangun *developer* dan buruknya kondisi lingkungan.





Gambar 4.47 Analisis Akar Masalah Kelurahan Tunggulwulung

Berdasarkan gambar analisis akar masalah dapat diketahui berbagai masalah yang menjadi penyebab masalah utama di Kelurahan Tunggulwulung, yaitu:

a. Adanya perbedaan budaya antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang

Perbedaan budaya antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang lebih disebabkan oleh orientasi tindakan atau sikap masyarakat yang berbeda. Masyarakat lokal memiliki orientasi kolektif yang didasarkan pada nilai atau norma sosial sebaliknya masyarakat lokal lebih berorientasi natralis yang didasarkan pada rasionalitas. Perbedaan budaya yang paling berpotensi menimbulkan konflik sosial adalah budaya atau kebiasaan masyarakat pendatang yang berakstifitas hingga lebih dari jam 10 malam sedangkan masyarakat lokal tidak mengizinkan aktiftas lebih dari jam 10 malam. Budaya yang berbeda tersebut seharusnya dapat saling dihormati oleh seluruh masyarakat. Masyarakat lokal dan dan masyarakat pendatang dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui musyawarah untuk menentukan peraturan terkait jam beraktifitas yang dapat disepakati kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan konflik sosial.

b. Adanya eksklusifitas perumahan yang dibangun *developer*

Perumahan yang dibangun *developer* di Kelurahan Tunggulwulung ada yang termasuk kedalam perumahan eksklusif yang ditandai oleh 1 akses masuk berupa pintu atau gerbang masuk menuju perumahan dan perumahan non eksklusif. Eksklusifitas tersebut menyebabkan interaksi antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang menjadi terbatas. Selain itu eksklusifitas perumahan menyebabkan masyarakat pendatang terkesan individualis. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan budaya masyarakat yang sangat guyub dan tidak individualis sehingga menyebabkan konflik sosial. Agar tidak terjadi konflik sosial karena eksklusifitas perumahan, interaksi antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang perlu dipermudah. Alternatif yang dapat dilakukan untuk mempermudah interaksi antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang adalah melalui kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat lokal dan pendatang.

c. Adanya konversi lahan sawah menjadi perumahan yang dibangun oleh *developer*

Konversi lahan pertanian menjadi perumahan yang dibangun *developer* mempengaruhi pendapatan petani karena luas lahan sawah yang terus berkurang

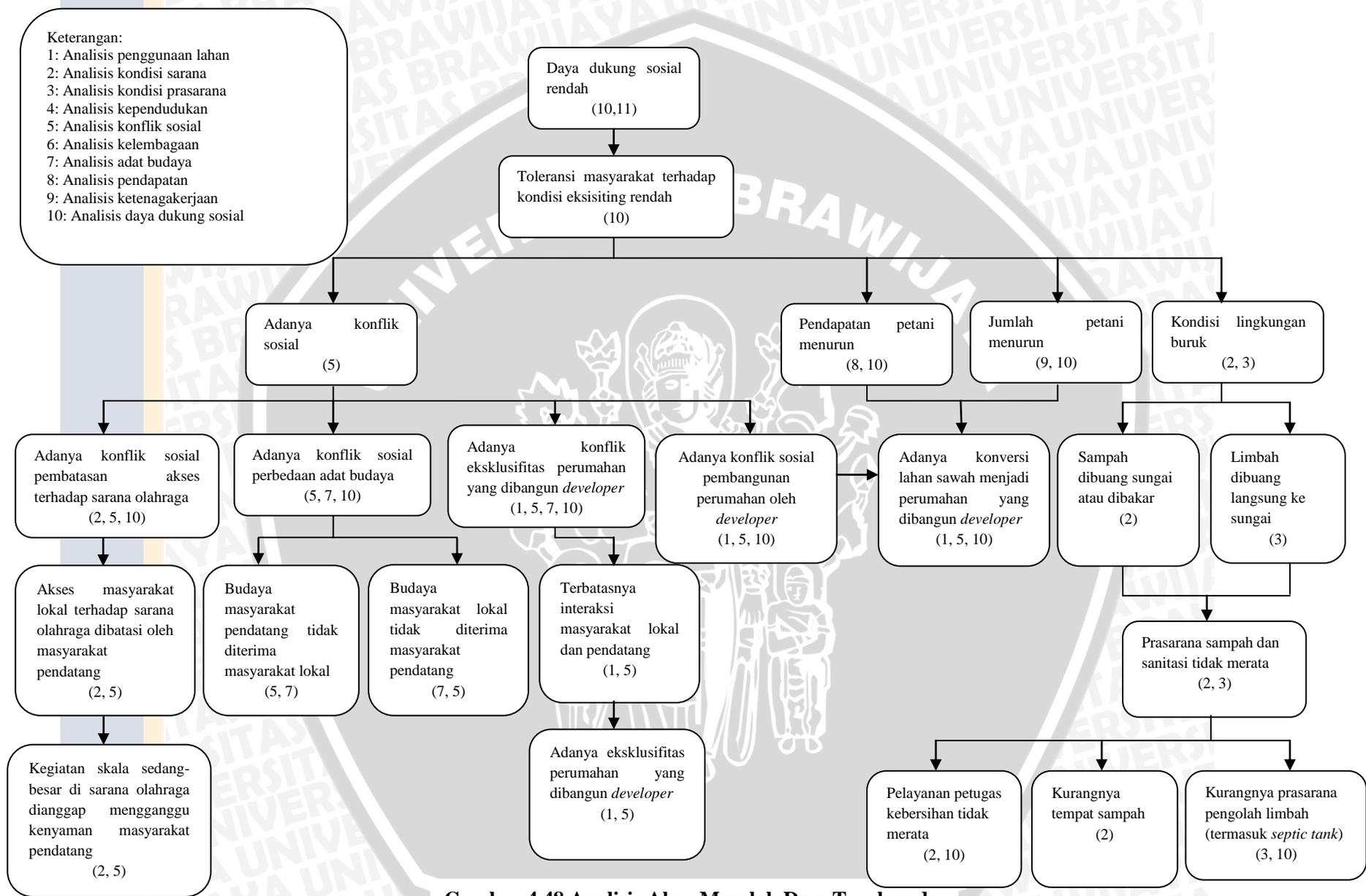
menyebabkan hasil produksi berkurang sehingga pendapatan petani juga berkurang. Selain itu berkurangnya lahan sawah juga menyebabkan pemilik lahan hanya mempekerjakan sedikit petani sehingga banyak petani yang kehilangan pekerjaan atau beralih menjadi buruh. Konversi lahan sawah menjadi perumahan dapat dihindari dengan peraturan yang tegas terkait konservasi lahan pertanian. Selain itu pemerintah juga dapat memberikan disinsentif pada *developer* yang akan membangun perumahan di wilayah pinggiran dengan mengharuskan *developer* menyediakan lahan sawah pengganti maupun lapangan pekerjaan baru bagi petani yang mungkin akan kehilangan pekerjaan dengan adanya pembangunan perumahan tersebut.

d. Kurangnya prasarana pengolahan limbah

Masalah yang menjadi penyebab buruknya kondisi lingkungan adalah kurangnya prasarana pengolahan limbah seperti *septic tank* maupun TPL. Seluruh masyarakat pendatang telah memiliki *septic tank*, sedangkan masyarakat lokal hanya sebagian yang telah memiliki *septic tank*. Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki prasarana pengolahan limbah menyebabkan kondisi lingkungan buruk karena masyarakat membuang limbah langsung ke sungai. Perbaikan kondisi lingkungan dapat dilakukan dengan pengadaan prasarana *septic tank* pribadi maupun komunal dan TPL di Kelurahan Tunggulwulung.

e. Prasarana air bersih tidak merata

Sumber air bersih di Kelurahan Tunggulwulung terdiri dari sumber yang berasal dari PDAM dan sumur. Seluruh perumahan yang dibangun *developer* telah dilengkapi dengan jaringan PDAM sebagai sumber air bersih, sedangkan perumahan swadaya yang dibangun masyarakat lebih banyak menggunakan sumur sebagai sumber air bersih. Oleh karena itu diperlukan pemerataan pelayanan air bersih baik menggunakan PDAM maupun sumur agar seluruh masyarakat dapat memperoleh air bersih dengan kualitas yang baik. Penyediaan sumber air bersih dari sumur maupun PDAM dapat dilakukan swadaya oleh masyarakat dengan *developer* sebagai bentuk komitmen dalam membangun perumahan di wilayah pinggiran tanpa mengabaikan perumahan dan masyarakat lokal yang telah ada lebih dahulu.



Gambar 4.48 Analisis Akar Masalah Desa Tegalgondo

Berdasarkan gambar analisis akar masalah dapat diketahui berbagai masalah yang menjadi penyebab masalah utama di Desa Tegalondo, yaitu:

- a. Adanya pembatasan akses sarana olahraga oleh masyarakat pendatang terhadap masyarakat lokal.

Pembatasan tersebut berupa pelarangan untuk menggunakan sarana olahraga sebagai salah satu tempat menyelenggarakan kegiatan bersih desa. Masyarakat pendatang berpendapat bahwa dengan adanya masyarakat lokal yang menggunakan sarana olahraga untuk kegiatan skala sedang maupun besar akan mengganggu kenyamanan masyarakat pendatang karena lokasi sarana olahraga yang dekat dengan perumahan yang dibangun *developer* sebagai tempat tinggal masyarakat pendatang. Kondisi tersebut akhirnya menimbulkan konflik sosial antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal Desa Tegalondo. Oleh karena itu untuk menghindari konflik kembali terjadi maka diperlukan suatu pengaturan penggunaan sarana olahraga. Pengaturan tersebut dapat berupa pengaturan terhadap jenis, waktu dan skala kegiatan yang akan dilakukan dengan memanfaatkan sarana olahraga sebagai lokasi kegiatan. Pengaturan tersebut harus dilakukan oleh seluruh masyarakat dan pemerintah lokal agar dapat dibuat peraturan atau ketentuan yang diterima oleh seluruh masyarakat. Selain itu *developer* juga dapat membangun sarana umum lainnya untuk masyarakat lokal maupun pendatang, jadi penyediaan sarana umum tidak hanya dilakukan oleh pemerintah lokal tetapi juga *developer* seperti penyediaan sarana umum di Kelurahan Tunggulwulung. Dengan demikian maka akan tercipta lingkungan kondusif tanpa adanya konflik sosial yang sekaligus dapat meningkatkan toleransi masyarakat terhadap kondisi akses sarana

- b. Adanya budaya yang berbeda antara masyarakat lokal dan pendatang

Perbedaan budaya antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang lebih disebabkan oleh orientasi tindakan atau sikap masyarakat yang berbeda. Masyarakat lokal memiliki orientasi kolektif yang didasarkan pada nilai atau norma sosial sebaliknya masyarakat lokal lebih berorientasi natralis yang didasarkan pada rasionalitas. Perbedaan budaya yang paling berpotensi menimbulkan konflik sosial adalah budaya atau kebiasaan masyarakat pendatang yang berakstifitas hingga lebih dari jam 10 malam sedangkan masyarakat lokal tidak mengijinkan aktiftas lebih dari

jam 10 malam. Budaya yang berbeda tersebut seharusnya dapat saling dihormati oleh seluruh masyarakat. Masyarakat lokal dan masyarakat pendatang dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui musyawarah untuk menentukan peraturan terkait jam beraktifitas yang dapat disepakati kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan konflik sosial.

- c. Adanya konversi lahan pertanian menjadi perumahan yang dibangun *developer*
Konversi lahan pertanian menjadi perumahan yang dibangun oleh *developer* mempengaruhi pendapatan petani karena luas lahan sawah yang terus berkurang menyebabkan hasil produksi berkurang sehingga pendapatan petani juga berkurang. Selain itu berkurangnya lahan sawah juga menyebabkan pemilik lahan hanya mempekerjakan sedikit petani sehingga banyak petani yang kehilangan pekerjaan atau beralih menjadi buruh. Konversi lahan sawah menjadi perumahan yang dibangun *developer* dapat dihindari dengan peraturan yang tegas terkait konservasi lahan pertanian. Selain itu pemerintah juga dapat memberikan disinsentif pada *developer* yang akan membangun perumahan di wilayah pinggiran dengan mengharuskan *developer* menyediakan lahan sawah pengganti maupun lapangan pekerjaan baru bagi petani yang mungkin akan kehilangan pekerjaan dengan adanya pembangunan perumahan tersebut.
- d. Adanya eksklusifitas perumahan yang dibangun *developer*
Perumahan yang dibangun *developer* di Desa Tegalgondo termasuk kedalam perumahan eksklusif yang ditandai oleh satu akses masuk berupa pintu atau gerbang masuk menuju perumahan. Eksklusifitas tersebut menyebabkan interaksi antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang menjadi terbatas. Selain itu eksklusifitas perumahan menyebabkan masyarakat pendatang terkesan individualis. Hal tersebut sangat betolak belakang dengan budaya masyarakat yang sangat guyub dan tidak individualis sehingga menyebabkan konflik sosial. Agar tidak terjadi konflik sosial karena eksklusifitas perumahan, interaksi antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang perlu dipermudah. Alternatif yang dapat dilakukan untuk mempermudah interaksi antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang adalah melalui kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat

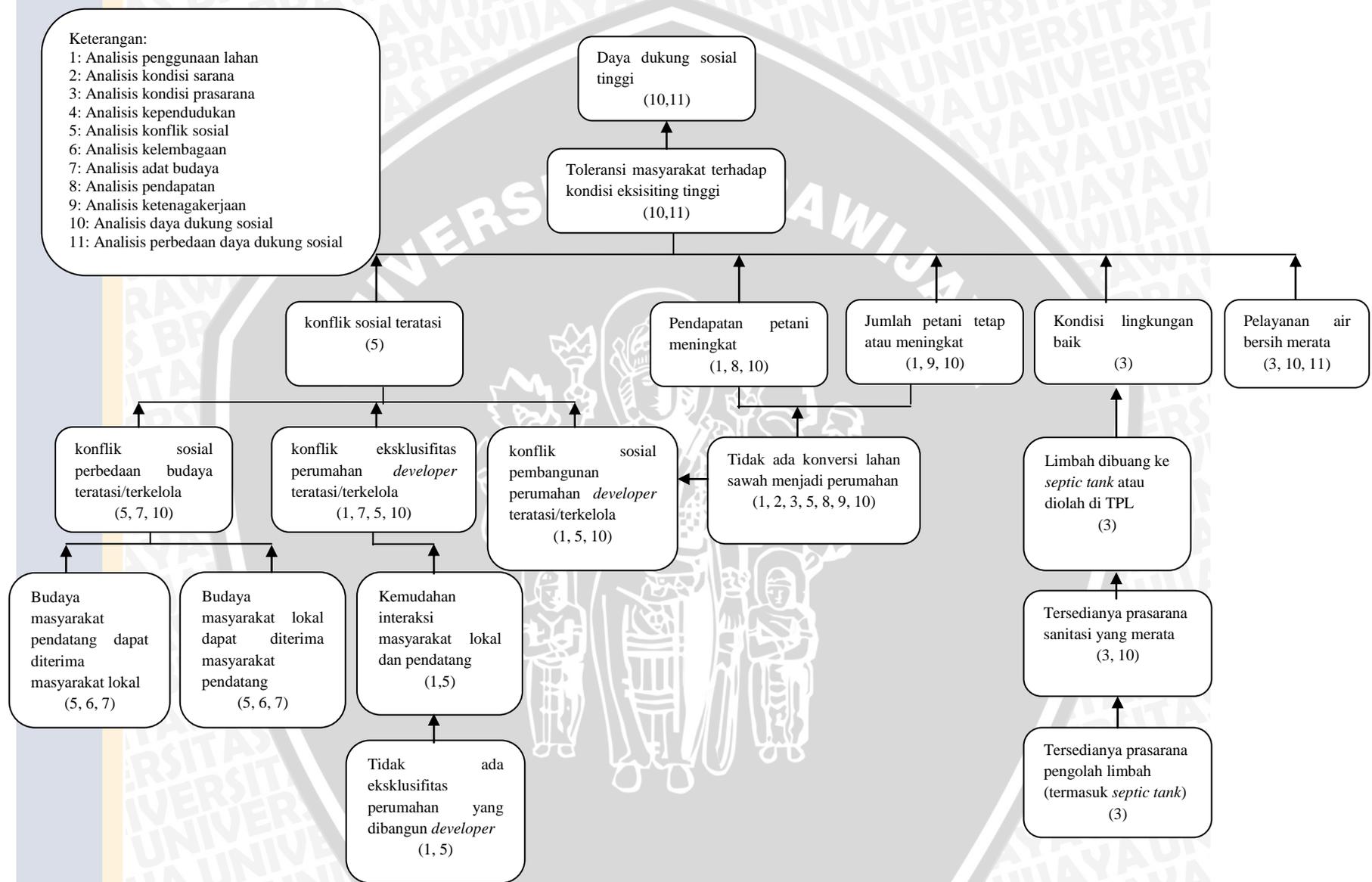
pendatang. Selain itu *developer* dapat membuat desain perumahan yang tidak terlalu eksklusif yaitu dengan memberikan akses untuk masyarakat lokal.

e. Pelayanan petugas kebersihan tidak merata

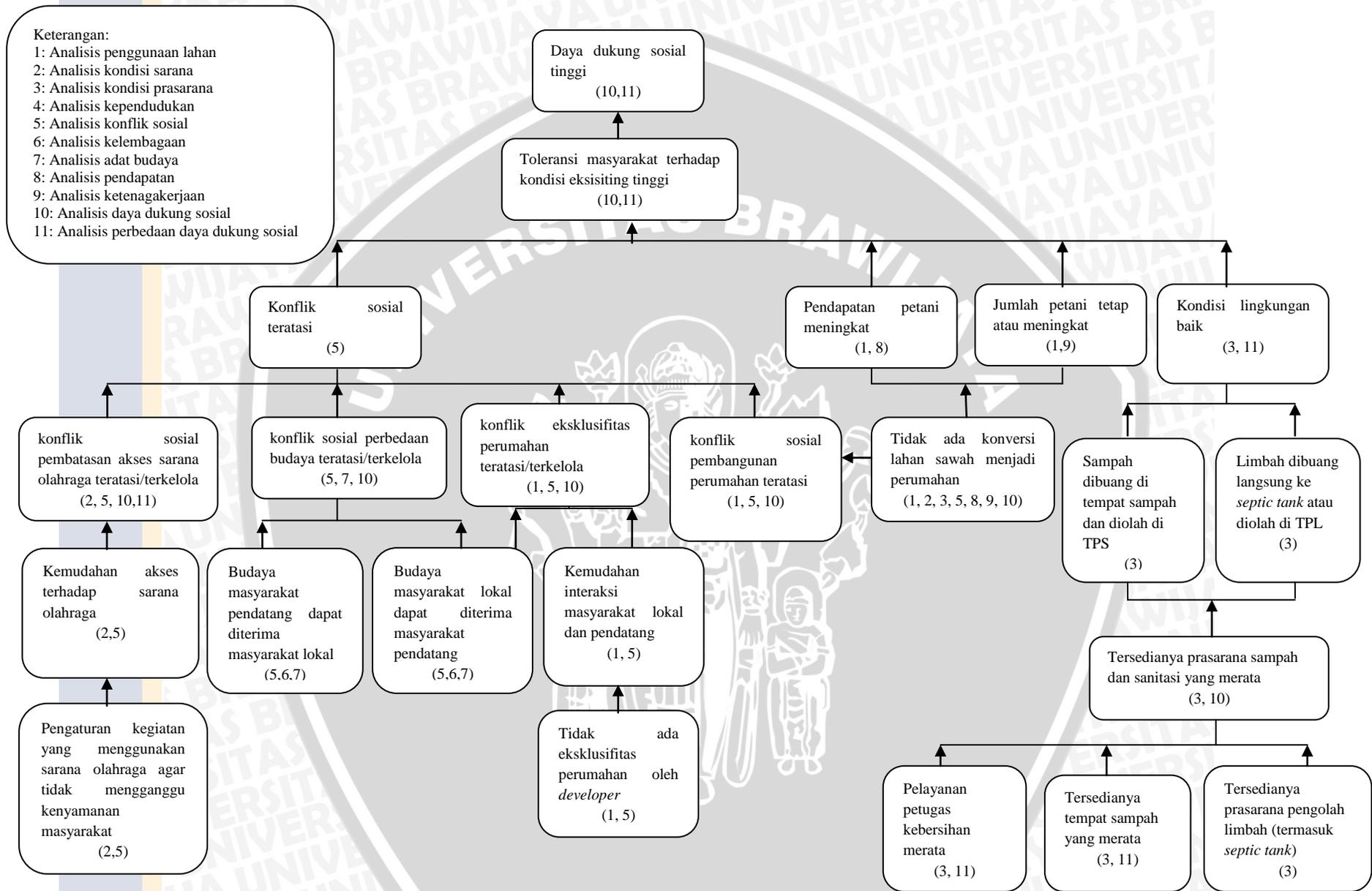
Masyarakat di Desa Tegalgondo tidak seluruhnya telah terlayani oleh petugas kebersihan dan memiliki tempat sampah. Sebaliknya masyarakat pendatang seluruhnya telah terlayani oleh petugas kebersihan dan memiliki tempat sampah pribadi maupun komunal. Pelayanan petugas kebersihan yang tidak merata dan hanya menjangkau sebagian wilayah Desa Tegalgondo menyebabkan masyarakat lokal yang tidak terlayani petugas kebersihan membuang sampah langsung ke sungai atau dibakar. Hal tersebut memperburuk kondisi lingkungan permukiman masyarakat lokal dan banyak tidak dapat diterima oleh masyarakat sehingga. Sebaliknya di Kelurahan Tunggulwulung, seluruh wilayah telah terlayani oleh petugas kebersihan sehingga toleransi masyarakat terhadap prasarana sampah tinggi. Perbaikan kondisi lingkungan dapat dilakukan dengan memperluas pelayanan petugas kebersihan agar dapat menjangkau seluruh wilayah Desa Tegalgondo seperti halnya di Kelurahan Tunggulwulung. Selain itu juga diperlukan pengadaan tempat sampah komunal untuk memfasilitasi masyarakat membuang sampah.

f. Kurangnya prasarana pengolahan limbah

Masalah yang menjadi penyebab buruknya kondisi lingkungan adalah kurangnya prasarana pengolahan limbah seperti *septic tank* maupun TPL. Seluruh masyarakat pendatang telah memiliki *septic tank*, sedangkan masyarakat lokal hanya sebagian yang telah memiliki *septic tank*. Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki prasarana pengolahan limbah menyebabkan kondisi lingkungan buruk karena masyarakat membuang limbah langsung ke sungai. Perbaikan kondisi lingkungan dapat dilakukan dengan pengadaan prasarana *septic tank* pribadi maupun komunal dan TPL di Desa Tegalgondo.



Gambar 4.49 Analisis Akar Tujuan Kelurahan Tunggulwulung



Gambar 4.50 Analisis Akar Tujuan Desa Tegalgondo

4.5 Rekomendasi

Berdasarkan analisis deskriptif dan evaluatif mengenai kondisi eksisting dan daya dukung wilayah pinggiran serta analisis akar masalah dan akar tujuan, maka dapat dibuat beberapa rekomendasi sebagai alternatif penyelesaian masalah di wilayah pinggiran sebagai berikut:

1. Rekomendasi yang dapat diberikan terkait toleransi masyarakat terhadap kondisi prasarana sampah yang rendah adalah melalui pemerataan pelayanan prasarana sampah dengan pengadaan tempat sampah individu maupun komunal dan memperluas pelayanan petugas kebersihan hingga menjangkau seluruh wilayah di Desa Tegalgondo seperti di Kelurahan Tunggulwulung yang seluruh wilayahnya telah terlayani petugas kebersihan dan dilengkapi tempat sampah. Pengadaan tempat sampah dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat atau dilakukan oleh *developer* sebagai bentuk komitmen dalam membangun perumahan tanpa mengabaikan perumahan masyarakat lokal yang sudah ada. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial di dalam masyarakat yang secara langsung dapat memicu terjadinya konflik sosial;
2. Pemerataan prasarana sanitasi melalui pembuatan TPL maupun *septic tank* individu dan komunal untuk seluruh wilayah di Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo. Pembuatan TPL dan *septic tank* dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat atau dilakukan oleh *developer* sebagai bentuk komitmen dalam membangun perumahan tanpa mengabaikan perumahan lokal yang sudah ada. Pemerataan prasarana sanitasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas prasarana sanitasi sehingga toleransi masyarakat terhadap kondisi prasarana sanitasi tersebut juga dapat meningkat. Pemerataan prasarana sanitasi ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang secara langsung dapat memicu terjadinya konflik sosial;
3. Pemerataan prasarana air bersih baik menggunakan sumber air dari PDAM maupun sumur di Kelurahan Tunggulwulung agar seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air bersih. Sedangkan di Desa Tegalgondo, seluruh masyarakat telah dapat memenuhi kebutuhan air bersih baik dari sumur maupun PDAM sehingga toleransi masyarakat terhadap prasarana air bersih tinggi. Dengan demikian perlu

dilakukan pemerataan air bersih di Kelurahan Tunggulwulung sebagaimana prasarana air bersih di Desa Tegalgondo baik menggunakan sumur maupun PDAM dengan kualitas dan kuantitas air yang baik agar seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air bersih;

4. Pengaturan kegiatan yang memanfaatkan sarana olahraga di Dusun Tegalgondo agar dapat diakses seluruh masyarakat tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat pendatang. Pengaturan kegiatan yang menggunakan setiap sarana umum di Desa Tegalgondo harus dilakukan dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh pengaturan tersebut. Pengaturan tersebut dapat berupa pengaturan terkait waktu, bentuk kegiatan dan skala kegiatan yang memanfaatkan sarana olahraga maupun sarana umum lainnya. Pengaturan kegiatan yang memanfaatkan sarana umum perlu dilakukan karena toleransi masyarakat terhadap kondisi akses sarana tersebut rendah yang menyebabkan konflik sosial antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang. Melalui pengaturan ini diharapkan seluruh masyarakat dapat mengakses sarana olahraga maupun sarana umum lainnya tanpa mengganggu pihak-pihak tertentu. Selain itu *developer* juga dapat membangun sarana umum lainnya untuk masyarakat lokal maupun pendatang, jadi penyediaan sarana umum tidak hanya dilakukan oleh pemerintah lokal tetapi juga *developer* seperti penyediaan sarana umum di Kelurahan Tunggulwulung. Dengan demikian maka akan tercipta lingkungan kondusif tanpa adanya konflik sosial yang sekaligus dapat meningkatkan toleransi masyarakat terhadap kondisi akses sarana;
5. Pengaturan jam beraktifitas yang diberlakukan untuk seluruh masyarakat Kelurahan Tunggulwulung dan Desa Tegalgondo agar tidak terjadi konflik sosial karena perbedaan budaya. Pengaturan jam beraktifitas ini penting dilakukan karena perbedaan budaya antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang didasari oleh orientasi sikap masyarakat yang berbeda sehingga memicu terjadinya konflik sosial dan menyebabkan toleransi masyarakat terhadap kondisi tersebut rendah. Oleh karena itu dengan adanya pengaturan ini diharapkan seluruh masyarakat dapat beraktifitas tanpa saling terganggu. Pengaturan dapat didasarkan pada musyawarah seluruh masyarakat sehingga dapat dicapai kesepakatan terkait perbedaan budaya

tersebut. Selain itu masyarakat harus dapat lebih menghormati perbedaan budaya yang ada di dalam sistem sosial wilayah pinggiran dan mempererat hubungan dan interaksi antara masyarakat lokal dan pendatang dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial;

6. Pemberian disinsentif pada *adeveloper* yang akan mengkonversi lahan sawah menjadi perumahan di wilayah pinggiran. pemberian disinsentif menjadi hal penting yang perlu dilakukan untuk mencegah konversi lahan sawah menjadi perumahan yang dibangun oleh *developer*. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa konversi lahan sawah menjadi perumahan menyebabkan pendapatan petani dan jumlah petani terus menurun sehingga menimbulkan berbagai konflik sosial sekaligus menyebabkan toleransi masyarakat terhadap konversi lahan sawah menjadi perumahan sangat rendah. Disinsentif yang dapat diberikan kepada *developer* adalah dengan mengharuskan *developer* membuat desain perumahan yang tidak membatasi interaksi masyarakat pendatang dan masyarakat lokal sehingga tidak menimbulkan eksklusifitas perumahan, menyediakan sarana dan prasarana permukiman seperti prasarana sampah, sanitasi dan air bersih baik di perumahan yang dibangun *developer* maupun perumahan yang dibangun swadaya masyarakat lokal agar tidak terjadi kecemburuan sosial serta menyediakan lahan pengganti sawah yang telah dikonversi sekaligus lapangan kerja baru bagi petani yang berpotensi kehilangan pekerjaan karena adanya konversi lahan sawah menjadi perumahan.